



POLITIK SOSIAL & KEPEMIMPINAN & WANITA

Negara sebuah tempat yang memiliki sistem pemerintahan yang berlandaskan pada undang-undang yang lahir atas keputusan legeslatif. Peraturan tersebut diarahkan pada kondisi masyarakat yang memiliki struktur masyarakat yang variatif yang berlatar belakang suku, ideologi dan keyakinan yang berbeda. Penyatuan masyarakat yang bernegara harus diiringi politik sosial yang komprehensif, mengacu pada asas-asas bernegara dan Pancasila, hingga masyarakat itu makmur dan memiliki penduduk yang heterogen dinamis dan konstruktif. Paradigma negara maju bukan hanya dipimpin oleh laki-laki tetapi konsep cender memberikan kesempatan perempuan untuk mengatur lembaga birokrasi maupun lembaga akademik. Kiprah kepemimpinan di negara-negara maju mendapat sambutan cempol, sebab wanita bukan hanya statusnya sebagai pekerja domestik tetapi memiliki kemampuan menjalankan pemerintah atau negara secara politik sosial.

Buku "Politik Sosial dan Kepemimpinan Wanita" memberikan pencerahan para generasi khususnya masyarakat yang berkecimpung dalam dunia lembaga birokrasi, lembaga akademik, lembaga kemasyarakatan, lembaga politik, dunia usaha maupun profesi lain, olehnya dalam buku tersebut penulis menjelaskan tentang: Cengkraman politik dalam definisi sosial baik itu realitas politik, ruang lingkup ilmu politik, cakupan teori politik, teori-teori politik, metode ilmu politik, ideologi politik. Disamping itu menjelaskan ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan mencakup politik dan ilmu pengetahuan, objek ilmu politik. Penulis juga menjelaskan negara dan pemerintah, mencakup kronologis sebuah negara, kekuasaan, tujuan dan tugas negara, pemerintah, organisasi masyarakat. Hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan mencakup ilmu pengetahuan dengan pendekatan filsafat, hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Dan unsur-unsur negara sebagai konsep politik, baik itu negara sebagai konsep politik, unsur-unsur negara. Terkhusus kiprah kepemimpinan wanita sebagai konteks realitas cender dilembaga birokrasi maupun akademik.

buaisbuku.com | Penerbit Wade | @PenerbitWade | 0821-3954-7339 | eadess@buaisbuku.com



POLITIK SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN WANITA

Dr. H. Abd Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.



POLITIK SOSIAL & KEPEMIMPINAN & WANITA



Dr. H. Abd Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.

POLITIK SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN WANITA

Dr. H. Abd Rasyid M., S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.

Penerbit WADE GROUP

Jln. Pos Barat Km.1 Melikan Ngimput Purwosari
Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491
Website. BuatBuku.com Email. redaksi@buatbuku.com
Phone. 0821 3954 7339

Sanksi Pelanggaran Pasal 72**Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002****Tentang Hak Cipta :**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak ciptaan pencipta atau memberi izin untuk itu, dapat dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POLITIK SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN WANITA

POLITIK SOSIAL DAN KEPEMIMPINAN WANITA

© Dr. H. Abd Rasyid M., S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.

Editor : Team WADE Publish

Layout : Team WADE Publish

Design Cover : Team WADE Publish

Sumber gambar: www.freepik.com

Diterbitkan oleh:



Jln. Pos Barat Km.1 Melikan Ngimput Purwosari

Babadan Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63491

Website : BuatBuku.com

Email : redaksi@buatbuku.com

Phone : 0821 3954 7339

Anggota IKAPI 182/JTI/2017

Cetakan Pertama, November 2017

ISBN: 978-602-5498-08-4

Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

viii+212 hlm.; 15x23 cm

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat-Nya atas segala rahmat dan berkah-Nya, sehingga penyusunan buku ini dengan judul *"Politik Sosial dan Kepemimpinan Wanita"*, dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini guna untuk dijadikan salah satu landasan (leteratur) untuk mengkaji masalah-masalah politik yang terkait sosial kehidupan berbangsa dan bernegara, tatanan bernegara, menjalankan pemerintahan dan kekuasaan, hubungan politik dengan ilmu-ilmu sosial dan budaya, yang lebih spesifik mengkaji tentang kepemimpinan wanita.

Proses penyelesaian buku ini sungguh merupakan suatu proses perjuangan panjang terhadap penulis siang dan malam melakukan kontemplasi untuk melahirkan ide-ide yang konstruktif mengenai masalah tatanan bernegara khususnya di Indonesia maupun kipra wanita dalam dunia pemerintahan baik itu lembaga birokrasi maupun akademis. Selama proses penulisan berlangsung tidak sedikit kendala yang dihadapi, baik itu keterlibatan langsung masalah-masalah tugas selaku pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, maupun keterlibatan aktif kegiatan seminar yang berskala nasional maupun internasional, pelatihan maupun pemberian materi masalah politik maupun cender, penajaman keilmuan metodologi lewat transfer ilmu kepada mahasiswa, penguji internal/eksternal S1, S2 dan S3, pendalaman literatur penelitian maupun kegiatan-kegiatan yang dapat membuka cakrawala penulis, denganberkat kesungguhandan keseriusan mengikuti rentetan kegiatan tersebut sehingga menimbulkan inspirasi melahirkan dan merampungkan tulisan ini walaupun dalam bentuk sederhana.

Patutlah kiranya penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan kerja dengan gagasan atau ide yang konstruktif, harapan dan doanya yang ikhlas serta nasihat beliau, terkhusus adik Dr. Syamsuddin AB, S.Ag., M.Pd. yang banyak memberikan sumbang saran maupun ide-ide yang cemerlang yang terkait isi buku tersebut,

sehingga penulis mampu menyelesaikan buku ini. Semoga semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dan setimpal dari Allah SWT. Amin.

Makassar, Oktober 2017

Dr. H. Abd Rasyid M., S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii

BAB. I DEFENISI SOSIAL CENGKRAMAN POLITIK1

A. Defenisi Politik.....	1
B. Ruang Lingkup Ilmu Politik	15
C. Cakupan Teori Politik	17
D. Metode Ilmu Politik.....	26
E. Realitas Politik	31
F. Idiologi Politik	34

BAB. II ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU

PENGETAHUAN38

A. Politik dan Ilmu Pengetahuan	38
B. Objek Ilmu Politik.....	45

BAB. III NEGARA dan PEMERINTAH.....54

A. Kronologis Sebuah Negara	54
B. Kekuasaan	72
C. Tujuan dan Tugas Negara.....	81
D. Pemerintah	97
E. Organisasi Masyarakat.....	100

BAB. IV HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU

PENGETAHUANLAIN102

A. Ilmu Pengetahuan dengan Pendakatan Filsafat	103
B. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya.....	104

BAB. V UNSUR-UNSUR NEGARA SEBAGAI KONSEP	
POLITIK	117
A. Negara Kearah Politik	117
B. Unsur-Unsur Negara	118
 BAB. VI KEPEMIMPINAN WANITA DALAM	
BIROKRASI PEMERINTAHAN	132
A. Kepemimpinan	137
B. Kepemimpinan Wanita	143
C. Realitas Hakikat Sikap.....	147
D. Birokrasi	151
E. Realitas SosialKepemimpinan Wanita	157
 Daftar Pustaka	201
Riwayat Penulis	211

BAB. I

DEFENISI SOSIAL CENGKRAMAN POLITIK

A. Defenisi Politik

Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau *politices* atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Indonesia kita teringat pepatah, *gemah ripah loh jinawi*. Orang Yunani kuno terutama Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai *en dam onia* atau *thegood life*. Mengapa politik dalam arti ini begitu penting? karena sejak dahulu kala masyarakat mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat masyarakat sering menghadapi terbatasnya sumber daya alam, atau perlu dicari satu cara distribusi sumber daya agar semua warga merasa bahagia dan puas. Ini adalah politik. Bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia itu? Usaha itu dapat dicapai dengan beberapa cara, yang kadang-kadang bertentangan dengan yang lainnya. Akan tetapi semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memiliki suatu wilayah tertentu (Negara atau sistem politik) kekuasaan itu perlu dijabarkan dalam keputusan mengenai kebijakan yang akan menentukan pembagian atau alokasi dari sumber daya yang ada. Para sarjana politik cenderung menekankan salah satu saja dari konsep-konsep ini akan tetapi selalau sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya. Dengan demikian kita sampai kesimpulan bahwa politik dalam suatu Negara (*state*) berkaitan dengan masalah kekuasaan (*power*) pengambilan keputusan (*alocation or distribution*), kebijakan publik (*public police*), dan alokasi atau distribusi (*allocation or distribution*). Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik, maka perlu kiranya dibahas dulu istilah 'politik' itu. Pemikiran mengenai politik (*politices*) di dunia barat banyak

dipengaruhi oleh filsuf abad yunani kuno abad ke V sebelum masehi filsuf seperti plato dan aristoteles menganggap *politices* sebagai usaha untuk mencapai Negara politik (*polity*) yang terbaik. Di dalam politik semacam itu manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19.

Dewasa ini definisi mengenai politik yang sangat normatif, olehnya definisi lain yang lebih menekankan pada upaya (*means*) untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan kebijakan, alokasi nilai, dan sebagainya. Namun demikian, pengertian politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapainya, atau yang disebut Peter Merkl: “politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan (*politics, at its is a noble quest for a good order and justice*)”(Peter H. merkl, 1967:13) betapa samar-samar pun tetap hadir sebagai latar belakang serta tujuan kegiatan politik. Dalam pada itu tertentu perlu disadari bahwa persepsi mengenai baik dan adil dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi masing-masing dan zaman yang bersangkutan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebahagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan yang harmonis.

Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil apakah yang menjadi tujuan dari system politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternative serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum (*public polices*) yang menyangkut pengaturan dan alokasi (*allocation*) dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewe-

nang (*authority*). Kekuasaan ini diperlakukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*) tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan (*statement of intent*) belaka, akan tetapi, kegiatan-kegiatan ini dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik yang materil maupun yang mental) yang dikejar biasanya langka sifatnya. Dipihak lain, di Negara demokrasi, kegiatan ini juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif, dalam rangka ini politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik (*conflict resolution*) atau konsensus (*consensus*). Tetapi tidak dapat disangkal bahwa dalam pelaksanaannya, kegiatan politik, di samping segi-segi yang baik, juga mencakup segi-segi yang negatif. Hal ini disebabkan karena politik mencerminkan tabiat manusia, baik nalurinya yang baik maupun naluruinya yang buruk. Perasaan manusia yang beraneka ragam sifatnya, sangat mendalam dan sering saling bertentangan, mencakup rasa cinta, benci, setia, bangga, malu dan marah. David E. Apter:1997). Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari kita acapkali berhadapan dengan banyak kegiatan yang tak terpuji, atau seperti dirumuskan oleh Peter Merkl sebagai berikut: "politik, dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan dan kekayaan untuk kepentingan diri sendiri "*politics at its worst is a selfish grab for power, glory and riches.*" (Peter H. merkl, 1967:13) Singkatnya, politik adalah perbuatan kuasa, tahta, dan harta. Di bawah ini ada dua sarjana yang menguraikan definisi politik yang berkaitan dengan masalah konflik dan consensus.

Menurut Rod Hague Et al: politik adalah kegiatan yang menyangkut cara bagaimana kelompok-kelompok mencapai keputusan-keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui usaha untuk mendamaikan perbedaan-perbedaan diantara anggota-anggotanya. Menurut Andrew Heywood: politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, memper-

tahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama. Ilmu politik dapat digolongkan menjadi tiga. *Pertama*, pendefinisian secara institusional dalam cara ini tergolong sarjana politik yang melihat objek politik dalam institusi atau lembaga-lembaga ilmu politik atau lembaga-lembaga politik seperti negara, pemerintah dan lain-lain. *Kedua*, pendefinisian secara fungsional, yang lebih menitikberatkan pada fungsi dan aktivitas daripada struktur dan lembaga-lembaga politik yang diselidiki. *Ketiga*, pendefinisian yang didasarkan atas hakekat politik. Ketiga cara pendefinisian ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut:

a) *Pendefinisian secara institusional*

Pendefinisian secara institusional merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki ilmu politik (*political institutions*), seperti negara, pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan lain-lain. Umpamanya Wilbur White merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang mempelajari asal mula, bentuk-bentuk dan proses negara dan pemerintah. Gilchrist merumuskan ilmu politik sebagai ilmu mengenai negara dan pemerintah. Ilmu politik mempelajari pemerintah *as it is, as it has been* dan *as it ought to be* dan menyelidikannya tentang negara meliputi penyelidikannya tentang hakekat, asal mula dan atribut-atribut esensi dari negara. Ilmu politik juga menyelidiki cara bekerja pemerintah, fungsi-fungsi pemerintah dan menentukan asas-asas untuk membimbing pemerintah dalam pekerjaannya. Ada sarjana-sarjana dari golongan institusional yang khusus menitikberatkan pada negara sebagai lembaga politik dan merumuskan ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki negara. Barntz, misalnya merumuskan politik sebagai “...de wetenschap, die het leven van de staat bestudeert”. Sarjana ilmu politik bangsa Swiss, Johann Kaspar Bluntschli merumuskan ilmu politik (*die staatswissenschaft*) sebagai “... the science which is concerned with the state, which endeavours to understand and comprehend the state in its conditions (*grundlagen*), in its essential na-

ture (wesen), it is various forms of manifestation (erscheinungsformen), its development”.

Adolf Grabowsky mengatakan bahwa ilmu politik menyelidiki negara dalam keadaan dalam bergerak. “*Wer Politik sagt, pflegt zugleich an der Staat zudenken*”, dan kemudian “*Die Politik dagegen will alle seine Seiten einfangen, nicht nur die Rechtsseite und sie musz, da die Bedeutung dieser Seiten in seiner geschichtlichen Existenz forwährend, den Staat als einen dauerend sich bewegendenden Faktor begreifen*”. Penulis ilmu politik bangsa India H.N. Sinha merumuskan ilmu politik sebagai “.....that bransh of human learning which is concerned with the state. It seeks..... to study the state in its various aspects”. “..... Political science is correctly designated “the science of the state”: objectively gathering and classifying facts about the state is the main purpose of this branch of learning”, demikian pendapat kedua sarjana wanita Jacobsen dan Lipman. Jika demikian, sesungguhnya lebih tepat jika ilmu politik disebut ilmu negara (*the science of the state*) saja.

Golongan pendefinisian institusional mempelajari lembaga-lembaga politik, akan tetapi oleh karena itu negara merupakan *lembaga politik perexcellence*, maka negaralah yang menjadi pusat perhatian mereka. Pembahasan mereka dimulai dengan asal mula negara, hakekat negara, sejarah serta tujuan dan bentuk-bentuk negara dan akhirnya mereka sampai pada penyusunan deduksi-deduksi tentang pertumbuhan-pertumbuhan dan perkembangan negara. Yang menarik perhatian dari golongan institusional yang menitikberatkan pada negara sebagai objek ilmu politik inia dalah bahwa pada umumnya sarjana-sarjana yang menganutnya adalah sarjana-sarjana dari Eropa daratan.

Thomas Cook mengatakan bahwa konsep negara sebagai objek ilmu politik berasal dari Eropa, yang kemudian mempengaruhi juga pemikiran politik Amerika Serikat. Fokus ilmu politik, ilmu negara atas negara pernah dijelaskan antara lain oleh Ny. Budiardjo menulis bahwa ilmu negara di Eropa Barat sampai dewasa ini masih terikat pada ilmu induknya, yaitu ilmu hukum. Sebagai anak cabang ilmu hukum, ilmu negara menyelidiki ne-

gara sebagai subjek hukum dan meninjau negara semata-mata dari segi hukum. Sarjana-sarjana hukum publik Jerman dan Austria seperti Jellinek, Laband dan Kelsen amat mempengaruhi.

Pendefinisian ilmu politik sebagai ilmu yang menyelidiki negara tidak luput dari kecaman-kacaman. Menurut Thomas Cook, kecaman-kecaman itu didasarkan atas tiga hal. *Pertama*, negara terbatas dalam waktu; *kedua*, negara bersifat partikularistis dan *ketiga*, ilmu politik yang memusatkan penyelidikannya pada negara tidak dapat menghasilkan analisa-analisa yang sesuai dengan kenyataan. Mengenai keberatan pertama dikatakan bahwa jika kita pada waktu ini berbicara tentang negara, kita akan teringat kepada negara modern, negara territorial, sedangkan konsep negara territorial adalah konsep modern, untuk tepatnya konsep yang lahir dalam abad ke-17. Jika ilmu politik hanya menyelidiki negara, maka hal ini berarti bahwa penyelidikan-penyelidikan ilmu politik terbatas pada abad ke-17 sampai sekarang saja, pada hal zaman-zaman yang mendahului abad ke 17 adalah tidak kurang pentingnya.

Zaman Yunani purba misalnya adalah sangat penting ditinjau dari segi ilmu politik karena di Yunani purbakala dimulai pemikiran politik yang rasionil sekularistik. Aristoteles lazim dianggap sebagai “bapak ilmu politik.” Abad pertengahan juga menghasilkan tinjauan-tinjauan politik yang penting terutama mengenai pertikaian antara kekuasaan kerohanian dan kekuasaan keduniawian atau pertikaian antara gereja dan negara (masalah investitur). Negara tidak saja terbatas dalam waktu, tapi juga bersifat partikularistis. Negara belum merupakan suatu gejala sosial yang universal. Masih banyak bangsa-bangsa yang belum bernegara atau yang belum sampai pada taraf kenegaraan, seperti negara-negara jajahan, protektorat-protektorat, wilayah perwalian (trust-territories) dan lain-lain. Apabila penyelidikan ilmu politik dibatasi pada gejala negara, maka tentulah penyelidikan-penyelidikan itu tidak dapat menghasilkan analisa-analisa yang memuaskan yang sesuai dengan kenyataan sosio politik dari zaman ini. Karena itu pendefinisian ilmu politik pada negara *per se*,

tidak dapat dipertahankan seterusnya. Akan tetapi negara sebagai lembaga politik yang terbesar dan paling sempurna tetapi tetap mengambil tempat yang utama dalam penyelidikan-penyelidikan ilmu politik.

Ada satu keberatan lagi yang melekat pada pendefinisian secara institusionil itu, yakni bahwa pendefinisian secara institusionil selalu seiring dengan peninjauan-peninjauan yang yuridis semata-mata. Lembaga-lembaga politik diselidiki dalam bentuknya yang formil, yakni struktur lembaga-lembaga itu sebagaimana ditentukan dalam dokumen-dokumen hukum seperti konstitusi atau undang-undang dasar, atau dokumen-dokumen hukum serupa itu lainnya. Cara pendekatan seperti ini sekalipun penting dan melengkapi penyelidikan-penyelidikan lembaga-lembaga politik, sudah pasti tidak akan memuaskan, karena tidak menghasilkan peninjauan-peninjauan yang sesuai dengan Kenyataan lembaga-lembaga politik. Dalam kenyataan sosial, lembaga-lembaga politik ternyata sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosio-ekonomi yang tidak bersifat yuridis. Pada umumnya sarjana-sarjana ilmu politik sependapat bahwa pendefinisian ilmu politik sebagai "ilmu negara," tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan ilmu politik dewasa ini. Pendefinisian seperti itu lambat laun dilepaskan untuk memberikan tempat kepada pendefinisian secara fungsional dan pendefinisian berdasarkan hakekat politik.

b) *Pendefinisian secara fungsional*

Pendefinisian secara fungsional dapat dipandang sebagai reaksi terhadap pendefinisian institusionil yang terlalu menitik beratkan pada struktur formil lembaga-lembaga politik dengan peninjauannya yang terlalu dogmatis yuridis dan terlalu menitik beratkan pada dokumen-dokumen hukum daripada sosio-politis. Pendefinisian fungsional pada dasarnya merupakan pendefinisian institusionil pula, tetapi pendefinisian fungsional berusaha melepaskan diri daripada dokmatisme dan sifat yuridis sepihak dari pada pendefinisian institusionil itu. Fungsionalisme lebih mengu-

tamakan fungsi dan aktifitas daripada struktur formil dari lembaga-lembaga politik yang diselidiki. Fungsionalisme meninjau lembaga-lembaga politik tidak sebagai lembaga-lembaga yang terasing dan bebas dipengaruhi faktor-faktor penguasaan riil. Lembaga-lembaga politik ditinjau sebagai sesuatu yang dinamis yang tidak luput dari pengaruh faktor-faktor non yuridis. Menurut sarjana-sarjana dari golongan pendefinisian ini peranan faktor-faktor kekuasaan riil, seperti *pressure groups*, *lobbying*, pendapat umum dan lain-lain tidak kurang dari struktur dan dokumen-dokumen hukum dari lembaga-lembaga politik tersebut. Sejalan dengan tekanan pada fungsi dan aktivitas terjadilah pergeseran titik berat penyelidikan-penyelidikan ilmu politik dari statika ke dinamika politik. Pergeseran tekanan ini mengakibatkan bahwa sarjana-sarjana ilmu politik harus memperhatikan pula faktor-faktor politik lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan aktivitas dari lembaga-lembaga politik itu, seperti faktor demografis, psikologis, kulturil, dan ekonomis. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh faktor-faktor tersebut, ilmu politik harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu yang menyelidiki faktor itu. Sarjana yang termasuk dalam golongan pendefinisian ini menilai makna sesuatu lembaga politik tidak atas dasar ketentuan-ketentuan undang-undang dasar atau dokumen hukum lainnya, tetapi atas dasar apa yang secara riil telah dapat dicapai lembaga politik itu bagi kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu, pendefinisian secara fungsional sering juga disebut pendefinisian secara pragmatis atau teleologis. Oleh karena itu, salah satu hasil positif daripada pendefinisian fungsional ini adalah kerjasama antara ilmu-ilmu di lapangan ini. Umpamanya mengenai tujuan negara. Golongan fungsional tidak menaruh perhatian atas ketentuan-ketentuan konstitusional yang menetapkan hal-hal yang muluk-muluk sebagai tujuan negara, tetapi apa yang secara riil telah dapat dicapai dari tujuan itu. Golongan fungsional jadinya selalu bertanya "apa yang telah dicapai secara riil bagi kesejahteraan manusia?" Jawaban terhadap pertanyaan inilah yang menentukan makna dari lembaga itu.

Dengan kata lain perkataan pandangan fungsional atau pragmatis ini telah dapat memberikan jawaban yang positif atas pertanyaan apakah lembaga politik seperti negara pemerintah, dewan perwakilan rakyat, dan lain-lain diperuntukkan bagi manusia atau sebaliknya manusia diperuntukkan bagi lembaga-lembaga itu. Oleh karena lembaga-lembaga politik itu diperuntukkan bagi manusia, maka lembaga itu harus bermanfaat bagi manusia.

c) *Pendefinisian menurut hakekat politik*

Apakah hakekat politik? Para sarjana ilmu politik berpendapat mengenai jawaban terhadap pertanyaan tersebut atas, yakni hakekat politik adalah kekuasaan (*power*) dan dengan begitu proses politik adalah serentetan peristiwa yang hubungannya satu sama lain didasarkan atas kekuasaan. Politik adalah perjuangan untuk memperoleh kekuasaan atau teknik menjalankan kekuasaan. kekuasaan atau masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol kekuasaan atau pembentukan dan penggunaan kekuasaan "*politik ist nicht anderes als der Kampf um die macht.*" Demikian Karl Loewenstein. Suys menulis bahwa politik adalah "*strijd om macht*". *For the central problem of politics is that of the distribution and control of power. politics is the quest for power and political relationship are power relationships, actual or potential,*" demikian tulis Joseph Roucek. Adakalanya dipergunakan istilah-istilah lain untuk kekuasaan ini. Catliri umpamanya menggunakan kata-kata "*control*" dan merumuskan ilmu politik sebagai "*a study of the act of control, or as the act of human or social control.*" Lasswell lebih tegas merumuskan ilmu politik sebagai ilmu tentang kekuasaan. "*when we speak of the science of politics, we mean the science of power.*" Dalam bukunya yang lebih baru, Prof. Laswell menggunakan istilah "*pengaruh*" (*influence*) dan merumuskan ilmu politik sebagai "*....the study of influence and the influential...are those who get the most of what there is to get.*" Dan yang dapat diperoleh adalah "*kehormatan, penghasilan, keselamatan.*" (*deference income, and safety*) yang memperoleh hasil-hasil dari pada pengaruh itu

adalah golongan elit dan bukan rakyat biasa." Adakalanya istilah kekuasaan atau sinonim-sinonimnya sengaja diletakkan, namun perumusan yang digunakan tetap memperlihatkan adanya sifat kekuasaan. Demikian misalnya definisi V.O Key yang berbunyi "...politics deals with human relationship of dominance and submission, of the governors and the governer.

Pendefinisian ilmu politik berdasarkan hakekat politik sebagai kekuasaan disebut juga interpretasi dari politik berdasarkan kekuasaan (*power interpretation of politics*). Kekuasaan yang diselidiki itu diperlihatkan "sifatnya, asasnya, perkembangannya, rangka dan akibatnya." Juga disini terjadi pengutamaan yang meminta seluruh perhatian sarjana ilmu politik. Penyelidikan dimulai dengan kekuasaan dan diakhiri dengan kekuasaan. Pemusatan peninjauan pada gejala kekuasaan ini menimbulkan semacam 'ilmu kekuasaan' (*power science*) yang dinamakan "kratologi" oleh Loewenstein. Golongan pertama diwakili oleh Catlin dan Approach mereka disebut *Approach postulasional* (*postulational approach*) ilmu politik bagi mereka adalah ilmu yang menyelidiki manusia yang berusaha yang memperoleh kekuasaan sebagaimana ekonomi menyelidiki manusia dalam usahanya mendapatkan kemakmuran.

Golongan kedua adalah golongan yang menggunakan *approach psikologis* dan diwakili oleh *Lasswell* dan *Schuman*. Golongan ini menganalisis latar belakang psikologis dari keharusan dan kekuasaan, jadi motif-motif dan hasrat-hasrat manusia yang berusaha memperoleh dan menggunakan kekuasaan itu. Golongan ketiga diwakili oleh Charles Marriam dan lord Russel dan Approach mereka disebut *approach sosiologis*, golongan ini menganalisis kekuasaan sebagai gejala sosial, sebagai gejala yang ada dalam masyarakat. Kekuasaan itu dipergunakan sebagai alat untuk menjelaskan keadaan masyarakat dimana kekuasaan itu berlaku. Di samping itu, ada definisi lain yang lebih bersifat pragmatis. Perbedaan-perbedaan dalam definisi yang kita jumpai disebabkan karena setiap sarjana meneropong hanya satu aspek atau unsur dari suatu politik. Unsur ini diperlukannya sebagai

konsep pokok yang akan dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lain. Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa konsep-konsep pokok itu adalah negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy, beleid*), pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*)

Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep lahir dalam pikiran (*mind*) manusia dan karena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Mengerti itu hanya dapat dicapai melalui pikiran (*mind*) kita. Konsep adalah konstruksi mental, suatu ide yang abstrak, yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Jadi, konsep adalah abstraksi dari atau mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas, atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan generalisasi. Biasanya dirumuskan dalam satu atau dua kata.

Generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai suatu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Melalui konsep, generalisasi melihat hubungan-hubungan sebab akibat (*kausal*) anantara beberapa fenomena atau pada cara yang paling efektif untuk mencapai suatu tujuan. Jika kita menyebut sesuatu *typical*, kita membuat generalisasi. Generalisasi yang paling tinggi atau yang paling *sophisticated* derajat generalisasinya dinamakan teori. Dalam kehidupan keseharian, kita sering mengontraskan teori dengan praktik, atau teori dengan fakta. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan perkataan lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan itu, kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban (*obligation*) yang diakibatkan oleh tujuan politik.

Konsep-konsep yang dibahas dalam teori politik mencakup: masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, modernisasi dan sebagainya. Menurut Thomas P. Jenkin dalam *the study of political theory* dapat dibedakan dua macam teori politik, sekalipun perbedaan antara kedua kelompok teori tidak bersifat mutlak. Yaitu; a). Teori-teori yang mempunyai dasar moral atau bersifat akhlak dan yang menentukan norma-norma untuk perilaku politik (*norms for political behavior*). Dengan adanya unsur norma-norma dan nilai (*values*) ini maka teori-teori ini boleh dinamakan yang mengandung nilai (*valuational*) termasuk golongan ini adalah filsafat politik, teori politik, sistematis, ideologi dan sebagainya, b). Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma-norma atau nilai. Teori-teori ini dapat dinamakan non-valuation (*value-free* atau bebas nilai), biasanya bersifat deskriptif (menggambarkan) dan komparatif (membandingkan). Teori ini berusaha membahas fakta-fakta kehidupan politik sedemikian rupa sehingga dapat disistematiskan dan disimpulkan dalam generalisasi-generalisasi. (Thomas 1967:1-5).

Teori-teori politik yang mempunyai dasar moral fungsinya terutama untuk menentukan pedoman dan patokan moral yang sesuai dengan akhlak. Semua fenomena politik ditafsirkan dalam rangka tujuan dan pedoman moral ini, karena dianggap bahwa dalam kehidupan politik yang sehat diperlukan pedoman dan patokan. Teori-teori semacam ini mencoba mengatur hubungan dan interaksi antara anggota masyarakat sedemikian rupa sehingga di satu pihak member kepuasan perorangan, dan di pihak lain dapat membimbingnya menuju ke suatu struktur masyarakat politik politik yang stabil tetapi dinamis. Atas dasar itu teori politik menetapkan suatu kode etik atau tata cara yang harus dijadikan pegangan dalam kehidupan politik.

Beberapa literatur tentang ilmu politik, banyak didapat tentang pendefinisian Teori politik, tetapi alangkah baiknya bila kita memisahkan teori politik per katanya, yaitu teori dan politik. Ada satu literatur yaitu pada kamus politik hasil tulisan dari BN. Marbun SH di sana tertulis teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa, lalu ditemui pengertian politik pada literature dasar-dasar Ilmu Politik didapat bahwa pengertian politik adalah usaha untuk menggapai kehidupan yang baik (Prof. Miriam Budiardjo, 2008: 13). Maka dapat kita elaborasi bahwa pengertian teori politik, merujuk pada berbagai fenomena politik yang terjadi baik di kancah Nasional maupun Internasional, maka sebenarnya teori politik dapat diartikan bahwa usaha penyamaan untuk membaca berbagai fenomena-fenomena politik.

Sebagai penstudi Hubungan Internasional dalam hal usaha penyamaan “cara baca” mengenai berbagai peristiwa politik yang terjadi, usaha tersebut selalu memakai konsep-konsep yang idenya selalu bersifat abstrak, maka dari itu dapat dikatakan salah satu kegunaan .Teori politik adalah sebagai “batu pijakan” antara konsep-konsep politik yang abstrak dengan fenomena-fenomena politik yang semata-mata fakta.Berbicara mengenai hubungan antara konsep dan teori, sebagaimana telah diketahui bahwa konsep bersifat abstrak, dan teori merupakan hasil “buah karya” dari sana, karena itulah ada beberapa “jangkauan” yang dijangkau oleh teori politik yaitu Sifat Manusia (*Human Nature*); Sifat dari Alam Semesta (*The Nature of Universe*); Pandangan tentang Masyarakat (*Views of Society*); Sistem Ekonomi (*Economic Systems*);Bentuk-Bentuk Negara (*Forms of State*). Untuk lebih jelas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1). Sifat manusia (*human nature*), semua ilmu sosial mempelajari manusia sebagai anggota kelompok. Timbulnya kelompok-kelompok itu ialah karena dua sifat manusia yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerjasama. di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia, 2). Sifat Alam(*The Nature of Universe*), hukum tentang tata Alam bersifat absolut, Hal ini sangat erat kaitannya

dengan dianutnya kepercayaan seseorang, yang berbeda-beda satu sama lain. Hukum alam ini sebagaimana dikatakan tadi bersifat absolut. Namun sayangnya sebahagian besar manusia telah mengesampingkan hukum absolut, lantas memilih, menggunakan dan menaati hukum produk akal manusia yang bersifat relatif, *trial and error*, 3). Pandangan masyarakat (*Views of Society*), di sini kata “politik” dipakai dalam konotasinya yang biasa, yaitu yang berhubungan dengan negara. Kata “negara “ mengacu pada kategori khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Terdapat dua arti negara yang patut diperhatikan. *Pertama*, negara bangsa (*nation-state*), yang mengacu pada masyarakat nasional, yang dimaksud adalah komunitas yang muncul pada akhir abad pertengahan, yang dewasa ini kuat terorganisir sekaligus paling utuh berintegrasi. *Kedua*, negara pemerintah (*government-state*), yang mengacu pada penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional tersebut, 4). Sistem ekonomi (*Economic Systems*), kita harus memulainya dari pemahaman yang sangat mendasar. Bahwa untuk mempertahankan dan melanjutkan hidupnya, manusia harus dapat mencukupi kebutuhan utamanya yaitu: makanan, pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu manusia harus memproduksi semua kebutuhan-kebutuhannya. Dalam proses produksi inilah, manusia menggunakan dan mengembangkan alat-alat produksi (alat alat kerja dan obyek kerja) di samping tenaga kerjanya sendiri. Dari mulai tangan, kapak, palu, lembing, palu, cangkul hingga komputer serta mesin-mesin modern seperti sekarang ini. Alat-alat produksi (ada teknologi didalamnya) dan tenaga kerja manusia (ada pengalaman, ilmu pengetahuan didalamnya) tidak pernah bersifat surut melainkan terus maju disebut sebagai tenaga produktif masyarakat yaitu kekuatan yang mendorong perkembangan masyarakat, 5). Bentuk-bentuk Negara (*Forms of State*), jauh sebelum adanya pemikiran tentang negara dan hukum, negara telah ada, kita ingat misalnya adanya negara- negara yaitu Babylonia, Mesir dan Assyria. Negara- negara ini adanya sekitar abad ke XVIII sebelum Masehi, dengan sistem pemerintahannya yang sangat absolut.

Tetapi di samping itu pada zaman banggunya peradaban manusia ada juga raja-raja yang memerintah dengan baik hati yaitu dengan memberikan Undang-Undang yang menjamin hak-hak daripada para warga negaranya. Raja yang berbuat demikian kiranya adalah raja dari Babylonia yang bernama Chammurabi yang memerintah sekitar tahun 1800 SM yang terkenal mempersatukan negaranya yang semula terpecah belah. Karena sudah sejak dahulu terdapat ilmu dan peraturan yang mengatur yang mana telah diatur oleh Raja maka banyak bentuk negara yang timbul karena kosekuensi dari yang dibentuk dari negara yang sudah ada saat itu. Dengan demikian pendapat para ahli sangatlah banyak versi yang seharusnya sama tetapi dengan dilihat dari berbagai sudut pandang dan dalam penyesuaian keadaan serta jamannya maka pendapat itu berdiri sendiri hingga semakin banyak bentuk dari suatu negara itu sendiri.

B. Ruang Lingkup Ilmu Politik

Menurut badan internasional, UNESCO terdapat batasan-batasan yang dapat membedakan ilmu politik dengan ilmu lainnya. Batasannya adalah sebagai berikut:

1. Bidang Teori Politik: a). Teori Politik. Generalisasi abstrak mengenai beberapa fenomena. Penyusunan teori selalu memakai konsep yang lahir dari pemikiran manusia yang bersifat abstrak. Teori politik adalah bahasan mengenai tujuan dari kegiatan politik, cara-cara untuk mencapai tujuan itu, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan situasi politik tertentu, dan kewajiban-kewajiban dalam tujuan politik. Menurut Thomas P. Jenkin, dalam *The Study of Political Theory*, terdapat dua macam teori politik yaitu; 1). Teori-teori yang mempunyai dasar moral dan menentukan norma politik. Yang termasuk golongan ini antara lain, filsafat politik, teori politik sistematis, ideologi politik, 2). Teori-teori yang menggambarkan dan membahas fenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak mempersoalkan norma atau nilai politik, 3). Sejarah perkembangan ide-ide politik

2. Bidang lembaga politik: a). Undang-undang dasar atau constitution. Menurut E. C. S. Wade dalam buku *Constitutional Law* undang-undang dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Undang-undang dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi sedangkan konstitusi menulis peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar dapat dianggap sebagai kumpulan azas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dalam suatu negara dibagi, cara-cara bagaimana pusat kekuasaan bekerjasama antara satu dengan yang lain dan merekam hubungan-hubungan dalam suatu negarayakni pemerintahan negara, pemerintahan daerah, administrasi negara, perbandingan lembaga politik.
3. Bidang kepartaian, golongan, dan pendapat umum: a). Partai Politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat secara spontan dan berkembang menjadi suatu penghubung antara pemerintah dan rakyat. Partai politik dianggap sebagai manifestasi dari sistem politik yang sudah modern. Secara umum partai politik adalah suatu kesatuan anggota yang memiliki orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama yang dikumpulkan secara terorganisir dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan melaksanakan kebijaksanaan politik. Partai politik memiliki beberapa fungsi di dalam negara demokratis antara lain: 1). Partai sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini tugas partai politik adalah menyalurkan berbagai pendapat dan aspirasi masyarakat sehingga dapat menekan kesimpangsiuran pendapat di kalangan masyarakat, 2). Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik berarti sebagai proses dimana seseorang dapat memahami fenomena politik yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu sosialisasi politik dapat diartikan sebagai proses yang berkaitan dengan proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi yang lain oleh masyarakat,

3). Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Dalam kehidupan berpartai, sudah sewajibnya untuk mencari dan mengajak sebanyak-banyaknya orang yang berkompeten untuk turut serta dalam proses politik, 4). Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik. Konflik yang dapat terjadi misalnya persaingan dalam merebutkan kursi dalam sistem pemerintahan, masalah demokrasi, dan perbedaan pendapat dalam sistem kemasyarakatan.

Perkembangan pada dewasa ini, ilmu politik lebih memiliki banyak kesamaan dengan ilmu-ilmu lain. Maka untuk memperluas bahasan dari ilmu tersebut terdapat beberapa pembagian ruang lingkup lagi yang berkaitan dengan hal tersebut seperti yang tecantum sebagai berikut: a). Bidang kebijaksanaan pemerintahan: Pengambilan keputusan pemerintah, sistem pendelegasian wewenang, dan hubungan pusat dengan daerah, b). Bidang ekonomi politik; politik perdagangan dunia, globalisasi ekonomi, kutub-kutub ekonomi yang berpengaruh, c). Bidang sosiologi politik; pengkajian *pressure group*, pengkajian *interest group*, dan telaah budaya politik, d). Bidang psikologi politik; teori penguasaan massa, teori-teori demokrasi, normalisasi kehidupan masyarakat e). Bidang filsafat politik: estetika politik, etika politik, dan logika politik, f). Bidang pelayanan politik; administrasi pemerintahan daerah dan pusat, teori-teori organisasi, dan manajemen pemerintah, g). Bidang aturan politik; perubahan dan pembentukan konstitusi, legitimasi kekuasaan, dan peraturan-peraturan daerah dan pusat

C. Cakupan Teori Politik

1. Filsafat Politik

Jika kita melihat eksistensi antara filsafat dan politik terjadi perbedaan yang cukup mencolok. Dalam dunia filsafat akal budi, teori yang mendasari alam pikiran, dan penafsiran-penafsiran menduduki posisi penting. Sedangkan politik berkaitan dengan kehidupan nyata yaitu masalah kenegaraan, kebijakan pemerintahan, cara bertindak pemerintahan mengha-

dapi dan menangani masalah dalam dan luar negeri. Namun, kendati arah dan tujuannya berbeda, ternyata filsafat dan politik saling melengkapi. Dengan ide-ide briliannya, filsafat membantu dunia politik tentang bagaimana suatu negara dikelola dan dijalankan sebaik mungkin. Selain itu, sikap “kritis” yang merupakan salah satu senjata filsafat dibutuhkan dalam mengawasi segala kebijakan pemerintahan. Jadi, ketika membuat kebijakan, hendaknya kebijakan tersebut tidak diterima begitu saja, akan tetapi dikoreksi dengan sikap kritis yang objektif terlebih dahulu. Di sisi lain, filsafat juga butuh dunia politik. Ide-ide, dan segala pemikiran filsafat direalisasikan dalam dunia politik atau kehidupan nyata yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, tanpa dunia politik, ide-ide filsafat tentang dunia politik akan dengan sendirinya hilang dan basi karena tidak pernah digunakan.

Pada akhir abad-20 dan awal abad-21 ini, dunia kita seolah-olah berada dalam zaman babel dulu. Zaman babel sering digambarkan sebagai zaman kekacauan. Manusia tidak lagi saling mengenal, saling bekerjasama, tapi lebih mementingkan identitasnya masing-masing. Akibatnya yang terjadi adalah perang, dan segala macam bahaya yang mengancam kehidupan manusia. Akhir abad-20 dan awal abad-21, juga mengalami hal yang sama. Perang dingin antar blok barat yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan blok timur oleh Uni Soviet (sebelum bubar 1990-an) telah melahirkan perlombaan persenjataan nuklir antara kedua blok. Kekerasan dalam bidang politik juga merajalela, contohnya pemerintahan ORBA yang mengekang kebebasan warga negara demi melagengkan kekuasaannya. Perang saudara di Yugoslavia yang menyebabkan negara tersebut hancur terkeping-keping, masalah darfur di Sudan yang sampai sekarang belum diketemukan pemecahan masalahnya, invasi Amerika dan sekutunya di Afghanistan dan Irak yang menyebabkan kedua negara Islam tersebut berada dalam kekacauan, dan kekerasan politik rezim militer Myanmar terhadap aktivis hak asasi manusia, dan terakhir adalah instabilitas politik yang terjadi di Timor Leste. Dan se-

muanya itu hanya mengakibatkan penderitaan terhadap rakyat yang tidak berdosa dan tidak tahu berpolitik. Lalu saya bertanya-tanya dalam hati, kenapa hal ini semua terjadi?

Ketika merefleksikan pertanyaan tersebut, saya teringat akan pemikiran-pemikiran politik Bertrand Russel, seorang filsuf empirisme, Inggris. Menurut Bertrand Russel, kekacauan terjadi karena cita-cita politik yang salah dari para penguasa dan hanya diselamatkan dengan cita-cita yang berbeda dari sumber-sumbernya yang selalu membawa kesengsaraan, dan pembinasaan. Karena itu, cita-cita politik harus didasarkan pada kehidupan individu, dimana sasaran politik harus membuat kehidupan individu menjadi lebih baik. Dan ada 2 (dua) dorongan yang sangat menentukan pola perilaku individu dalam pergaulan masyarakat negara antara lain: Possesip yaitu upaya untuk memiliki dan mempertahankan, dan Kreatif (konstruktif) yaitu upaya untuk menciptakan dan menemukan hal-hal baru. Di sini yang utama adalah konstruktif karena terjadi kehidupan yang lebih baik. Dan karena itu dalam kehidupan politik, lembaga politik yang baik akan memperlemah dorongan-dorongan terhadap kekuatan dan dominasi dengan 2 (dua) cara yaitu melalui pendidikan masyarakat, dan mengekang keinginan-keinginan possesip. Untuk contoh para filsuf yang ada saya mengambil Ibnu Sina, Filsafat Jiwa Ibnu Sina memberikan perhatiannya yang khusus terhadap pembahasan kejiwaan, sebagaimana yang dapat kita lihat dari buku-buku yang khusus untuk soal-soal kejiwaan ataupun buku-buku yang berisi campuran berbagai persoalan filsafat.

Memang tidak sukar untuk mencari unsur-unsur pikiran yang membentuk teorinya tentang kejiwaan, seperti pikiran-piiran Aristoteles, Galius atau Plotinus, terutama pikiran-pikiran Aristoteles yang banyak dijadikan sumber pikiran-pikirannya. Namun hal ini tidak berarti bahwa Ibnu Sina tidak mempunyai kepribadian sendiri atau pikiran-pikiran yang sebelumnya, baik dalam segi pembahasan fisika maupun segi pembahasan metafisika. Dalam segi fisika, ia banyak memakai metode eksperimen dan banyak terpengaruh oleh pembahasan lapangan kedokteran.

Dalam segi metafisika terdapat kedalaman dan pembaharuan yang menyebabkan dia mendekati pendapat-pendapat filosof modern.

Pengaruh Ibnu Sina dalam soal kejiwaan tidak dapat diremehkan, baik pada dunia pikir Arab sejak abad ke sepuluh Masehi sampai akhir abad ke 19 M, terutama pada Gundisallinus, Albert the Great, Thomas Aquinas, Roger Bacon dan Dun Scot. Pemikiran terpenting yang dihasilkan Ibnu Sina ialah falsafatnya tentang jiwa. Sebagaimana Al-Farabi, ia juga menganut faham pancaran. Dari Tuhan memancar akal pertama, dan dari akal pertama memancar akal kedua dan langit pertama, demikian seterusnya sehingga tercapai akal ke sepuluh dan bumi. Dari akal ke sepuluh memancar segala apa yang terdapat di bumi yang berada dibawah bulan. Akal pertama adalah malaekat tertinggi dan akal kesepuluh adalah Jibril. Pemikiran ini berbeda dengan pemikiran kaum sufi dan kaum mu'tazilah. Bagi kaum sufi kemurnian tauhid mengandung arti bahwa hanya Tuhan yang mempunyai wujud. Kalau ada yang lain yang mempunyai wujud hakiki di samping Tuhan, itu mengandung arti bahwa ada banyak wujud, dan dengan demikian merusak tauhid. Oleh karena itu mereka berpendapat: Tiada yang berwujud selain dari Allah swt. Semua yang lainnya pada hakikatnya tidak ada. Wujud yang lain itu adalah wujud bayangan. Kalau dibandingkan dengan pohon dan bayangannya, yang sebenarnya mempunyai wujud adalah pohonnya, sedang bayangannya hanyalah gambar yang seakan-akan tidak ada. Pendapat inilah kemudian yang membawa kepada paham *wahdat al-wujud* (kesatuan wujud), dalam arti wujud bayangan bergantung pada wujud yang punya bayangan. Karena itu ia pada hakekatnya tidak ada; bayangan tidak ada. Wujud bayangan bersatu dengan wujud yang punya bayangan.

Menurut al-Farabi, Allah Swt menciptakan alam ini melalui emanasi, dalam arti bahwa wujud Tuhan melimpahkan wujud alam semesta. Emanasi ini terjadi melalui *tafakkur* (berfikir) Tuhan tentang dzat-Nya yang merupakan prinsip dari peraturan dan kebaikan dalam alam. Dengan kata lain, berpikirnya Allah

swt tentang dzat-Nya adalah sebab dari adanya alam ini. Dalam arti bahwa ialah yang memberi wujud kekal dari segala yang ada. Berfikirnya Allah tentang dzatnya sebagaimana kata Sayyed Zayid, adalah ilmu Tuhan tentang diri-Nya, dan ilmu itu adalah daya (*al-Qudrah*) yang menciptakan segalanya, agar sesuatu tercipta, cukup Tuhan mengetahui-Nya. Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat: sifat wajib wujudnya sebagai pancaran dari Allah, dan sifat mungkin wujudnya jika ditinjau dari hakekat dirinya atau *necessary by virtual of the necessary being and possible in essence*. Dengan demikian ia mempunyai tiga obyek pemikiran: Tuhan, dirinya sebagai wajib wujudnya dan dirinya sebagai mungkin wujudnya.

2. Teori-Teori Politik

a) Teori politik sistematis (*systematic political theory*)

Teori-teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma dan kegiatan politik. Misalnya, dalam abad ke-19 teori-teori politik banyak membahas mengenai hak-hak individu yang diperjuangkan terhadap kekuasaan Negara dan mengenai adanya system hukum dan system politik yang sesuai dengan pandangan itu. Bahasan-bahasan ini didasarkan atas pandangan yang sudah lazim pada masa itu mengenai adanya hukum alam (*natural law*), tetapi tidak lagi mempersoalkan hukum alam itu sendiri. (Miriam Budiardjo, 2008:45)

b) Teori politik normatif

Teori politik normatif, penemuan dan aplikasinya, hubungan antara politik dan moral. Kalau kita pandang di dalam terminologi secara sempit sebagai suatu cabang ilmu etika atau moral menjadi dasar dalam mempengaruhi perkembangan kehidupan politik. Teori politik normatif adalah cara untuk membahas lembaga sosial, khususnya berhubungan dengan kekuasaan publik, dan tentang hubungan antar individu di dalam lembaga. Posisi Utama dalam Teori Politik Normatif sejak kebangkitannya

pada 1970-an. Teori Normatif sudah berkembang ke segala arah. Beberapa penggunaannya telah mengungkapkan ulang dasar-dasar dari teori yang sudah lama, (diantaranya adalah feminis) telah mencari ide baru. Tiga pendekatan teori politik normatif telah mendominasi perdebatan pada tahun 1970-an dan setelahnya, diantaranya *Utilitarianisme*, *deontological liberalism* dan *communitarianism*.

- a) *Utilitarianisme*. Utilitarianisme adalah filosofi dan moral yang sering dikaitkan dengan pembaharu sosial yang radikal pada abad ke-19 yaitu, Jeremy Bentham. Seperti yang lain, Bentham curiga dengan aksi politik yang dibangun di atas klaim yang abstrak dan spekulatif tentang hak alami dan kewajiban kita, justru dia mengungkapkan hal yang dia pikir menjadi fakta mendasar tentang manusia yang diungkapkan dengan observasi empirik. Menurut Bentham, manusia dimotivasi oleh suatu keinginan untuk meraih kebahagiaan dan untuk menghindari penderitaan karena itu keputusan moral politik yang paling benar adalah mencari kebahagiaan terbesar bagi masyarakat umum. Kebahagiaan ini dapat diukur berdasarkan kegunaannya, dimaksudkan untuk menghasilkan kemanfaatan, kegunaan, kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan, dan objek dari pembuat kebijakan harus dimaksimalkan kegunaan sosialnya. Bentham tidak mencari aksi yang secara tepat dapat memaksimalkan kebahagiaan, hal itu diserahkan kepada anggota masyarakat. Setiap individu harus mendefinisikan kebbaikannya sendiri dan kepada pembuatan keputusan sosial keinginan dari tiap individu harus dimaksudkan sejajar pada semua hitungan kegunaan. Banyak kritik pada filosofi ini, bahwa kebahagiaan dan penderitaan bisa diukur dan keinginan yang tidak bisa diukur dari bermacam individu dapat di bandingkan, dianggapnya tidak masuk akal. Banyak kritikus khawatir terhadap implikasinya untuk individu dan minoritas dari suatu doktrin.

Kegunaan sosial sebagai sebuah kumpulan dan menolak pembatasan pada aksi sosial yang mungkin disediakan oleh teori tentang hak. Kecemasan mereka semakin ditambah oleh kepercayaan Utilitarianism pada pilihan-pilihan individu. Ketika beberapa pilihan mungkin sangat anti sosial (Rasis contohnya). Keputusan untuk mencari kebahagiaan dari banyak orang dimasyarakat atau orientasi kesejahteraan teknokrasi disetujui oleh sebagian besar masyarakat. Model yang dapat membuat persetujuan yang kejam secara bebas dan bisa dima'afkan. Salah satu kritik tajam diungkapkan John Stuart Mill menjauhkan utilitarianism yang secara kejam mendasarkan pada jumlah dengan mengakomodasi penilaian secara kualitas. Sebagai contoh pengalaman intelektual atau estetis tertentu mungkin lebih penting daripada keinginan orang yang sebenarnya sepadan tingkat kegunaannya. Mill juga mendebat utilitarianisme yang menjaga keinginan tertentu yang mendasar dan vital dari semua individu sebagai masalah hak. Hak sendiri berkontribusi pada semua kegunaan umum dengan membuat aman hal yang paling mendasar dari keberadaan kita. Mill menegaskan bahwa pada suatu waktu hak bisa berkonflik dengan hak lain. Ketika terjadi, hanya hitungan kegunaan relatif yang bisa menentukan mana hak yang berlaku. Argument mill ini mengantarkan pada "*act-utilitarianism*", (dimana semua tindakan harus dinilai berbeda dari memaksimalkan kebahagiaan) menjadi *rule-utilitarianism* (yang akan menjadi semua system peraturan yang mendesak, karena manfaat yang didapat adalah untuk seluruh masyarakat.)

- b) *Deontological Liberalism*. Sangat bertentangan dengan utilitarian bahkan pada etika teologi manapun. Etika teologi adalah moral yang menilai berharganya manusia berdasarkan apakah dia memenuhi suatu tujuan atau menyadari suatu akhir. Pemikir penting pada 70-an, John Rawls, Robert Nozick, Ronald Dworkin dan Alan Gewirth yakin bahwa etika

teologi yang telah berubah menjadi politik kehidupan tidak cukup bahkan membahayakan kebebasan manusia.

Argumen mereka menganggap membahayakan kebebasan manusia karena dua hal yaitu; *pertama*, mereka berpendapat, utilitarianism tidak memperhitungkan keanekaragaman akhir individu baik karena ini mensepesifikkan satu macam tujuan yang mungkin (memaksimalkan kebahagiaan atau keuntungan) lebih tinggi daripada yang lain atau karena menilai kebaikan manusia atau kesejahteraan berdasarkan kumpulan nilai yang menguntungkan dari suatu masyarakat sebagai suatu keseluruhan atau dari jumlah yang terbesar, gagal untuk mempertimbangkan bahwa tiap individu itu berbeda. *Kedua*, etika teologi mengutamakan akhir daripada alat yang mungkin digunakan untuk mencapainya. Secara khusus ini menolak untuk memperbolehkan bahwa pencarian tujuan kumpulan sosial harus dipaksa oleh hak yang tidak dapat diganggu gugat yang memiliki oleh tiap individu. *Deontological* atau *kantian liberal*, *utilitarianism* telah menegakkan banyak pemikiran liberal tetapi dari banyak kritik telah diungkapkan bahwa liberalism butuh dasar filosofis yang lebih meyakinkan. Mereka mengkontraskan *deontology* (etika hak/kewajiban) dengan *teleology* (etika akhir). Referensi utama deontology adalah Imanuel Kant. Menurut Kant, individu adalah suatu akhir (tujuan) bukan alat sehingga mereka tidak bisa diganggu gugat. Kantian percaya bahwa setiap individu seharusnya lebih bebas menentukan dan mengejar tujuan mereka daripada tujuan orang lain yang menentukan mereka. Tetapi dalam mencapai tujuan harus ada batasan dalam tingkah laku mereka. Manusia adalah makhluk yang bebas dan otonomi tapi mereka tidak lebih melukai kebebasan dan otonomi orang lain. Mereka percaya bahwa aksi kolektif sosial pun harus menghormati hak individu. *Liberalism* berbeda dengan anarkis dengan menerima bahwa ada lembaga yang diperlukan untuk menjaga hak dan mem-

buatnya efektif. Munculah pertanyaan sejauh mana pemerintah bisa bergerak.

- c) *Communitarianism*. *Communitarianism* dimulai dari dari sebuah kritik pada konsep liberal dari diri individu (*liberal self*). Menurut Michael Sandel, *liberal self* itu tidak dibebani atau bisa diadopsi di tempat yang menguntungkan diluar masyarakat dimana dia menjadi bagiannya, dan untuk didefinisikan dengan tujuan dan komitmennya tanpa referensi dari tradisi turunan atau tujuan yang dibagi. Ini diberkati oleh hak dan kewajiban tertentu dalam istilah abstrak murni dan universal yang menyebarkan klaim dan kewajiban yang muncul dari diri kita sendiri dan ikatan sosial. *Communitarianism* percaya kalau *liberal self dominant* ketika ikatan komunal telah terkikis dan individu menjauhkan diri dan hanyut meskipun sebenarnya kehidupan komunal atau tradisi adalah referensi yang diperlukan oleh individu. *Communitarianism* curiga dengan cara deontologist, percaya bahwa hak (prinsip universal keadilan) harus dibatasi pada pencarian kebaikan kolektif. *Communitarian* curiga pada hak yang berdasarkan liberalism, serta *communitarian* tidak bergabung dalam alternatif politik umum, Secara normatif mereka merasa individualisme yang tidak diinginkan semacam ini, adalah sebuah gejala bahwa ada yang salah. Mereka memilih untuk mengatakan tentang suatu “ diri yang berdasar situasi” (*situated self*) bahwa seseorang yang tergabung dalam suatu masyarakat dan didefinisikan oleh keterikatannya dan pemahaman diri yang digunakan bersama yang menjadi kerangka kehidupan masyarakat. Masyarakat baik desa, pinggiran, pergerakan/etika grup, yang mengatur hak dan kewajiban khusus. Kita lah yang membuat moral khusus kita.

Pada saat yang sama kita perlu terlibat dalam tujuan dari masyarakat kita. *Communitarian* sendiri mudah diserang karena tidak cukup menawarkan penjagaan pada kebebasan individu atau penjagaan dari tirani tradisional atau mayoritas. *Communitarianism* menawarkan argument kuat yang

membuat kita menyadari bagaimana tradisi turunan kita membentuk moral kita. Walaupun kita tidak setuju dengan tradisi itu tetap menemukan diri kita terlibat di dalamnya. Contohnya: kebiasaan, konstitusi. Ini mengingatkan bahwa kita lahir dengan kewajiban moral sebagai anggota masyarakat.

D. Metode Ilmu Politik

Kata metodologi secara etimologi dapat diuraikan yaitu, metode berarti cara, sedangkan logi berasal dari kata logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang cara untuk mengerjakan sesuatu agar diperoleh pengertian ilmiah terhadap suatu pengetahuan yang benar. Secara istilah pengertian metode adalah cara-cara dan alat perlengkapan yang membantu usaha ilmu untuk menemukan kebenaran yang objektif. Semakin tepat metode yang dipergunakan, maka ilmu tersebut akan semakin mendekati kenyataan. Khusus bagi ilmu sosial, metode dipandang memiliki peranan yang sangat penting untuk mengkaji objek-objek yang berkaitan dengan ilmu sosial.

Metode-metode yang dibahas dalam bagian ini dapat dipisahkan dalam metode-metode yang didasarkan atas induksi, yaitu kesimpulan-kesimpulan umum yang diperoleh berdasarkan proses pemikiran setelah mempelajari peristiwa-peristiwa yang khusus atau peristiwa yang konkrit, dan deduksi, yaitu proses penyelidikan yang didasarkan atas azas-azas yang umum yang dipergunakan untuk menerangkan untuk menerangkan peristiwa-peristiwa khusus atau penjelasan-penjelasan teoritis yang umum atas fakta-fakta yang konkrit. (F. Isjwara. *Pengantar*, 1966: 65). Metode dalam ilmu sosial dapat disetarakan dengan alat-alat dalam penelitian eksakta. Namun sebuah perbedaan muncul bahwa ilmu eksakta berobjekkan benda mati yang merupakan faktor konstan. Dan ilmu sosial berobjekkan makhluk yang merupakan bagian dari lingkungan sekelilingnya, sehingga semua kejadian yang terjadi dalam lingkup ilmu sosial menjadi

faktor-faktor yang variabel. Dikarenakan ilmu politik merupakan cabang dari ilmu sosial yang memiliki faktor variabel, maka dalam pengkajiannya harus digunakan banyak metode agar ilmu politik semakin dapat menambah sifat keilmiahannya. Metode-metode yang dibahas berdasarkan atas Induksi, yaitu kesimpulan umum yang diperoleh dari pemikiran peristiwa konkrit. Dan deduksi, yaitu proses penyelidikan yang didasarkan atas azas umum yang dipergunakan untuk menerangkan peristiwa khusus. Berikut metode yang dipergunakan oleh para ahli ilmu politik dalam pengkajian penelitiannya:

- 1) Metode Filosofis. Metode ini dipergunakan untuk mempelajari masalah-masalah politik yang langsung berhubungan dengan kehidupan politik manusia yang dikaji sedalam-dalamnya. Masalah-masalah fundamental dalam ilmu politik diselidiki secara terperinci sampai pada inti hakekatnya. Melalui metode ini ilmuwan politik menyelidiki objek ilmu politik dan digabungkan dengan suatu ide abstrak. Dan dari ide-ide abstrak itulah dibuat deduksi- deduksi tentang gejala yang diselidiki. Metode filosofis bersifat deduktif, spekulatif dan terkadang metafisis.
- 2) Metode Yuridis. Lembaga-lembaga atau gejala- gejala politik yang diselidiki dengan penggunaan metode yuridis ditinjau dengan dengan menitik beratkan aspek-aspek yuridisnya. Penggunaan metode menggunakan keserasian dalam negara sehingga melahirkan lewajiban antara pemerintah dan rakyatnya dan kemudian merupakan aturan yang harus diikuti sehingga pada saatnya akan semakin meningkat keberadaan keserasian tersebut dalam kehidupan bernegara. Ilmuwan politik yang pertama kali menggunakan metode ini adalah ilmuwan berkebangsaan Jerman, Von Gerber. Dalam perkembangannya metode ini digunakan oleh beberapa ilmuwan politik seperti, Georg Jellinek, Paul Laband, Hans Kelsen dan lain lain. Pada umumnya penggunaan metode ini bersamaan dengan penggunaan metode historis-komparatif.

- 3) Metode Historis. Metode ini didasarkan atas analisa kenyataan perjalanan waktu dari kenyataan-kenyataan sejarah yang ditinjau dari asal mula, pertumbuhan, perkembangan, sebab akibat, dan bagaimana perwujudan sebab akibat tersebut dalam sejarah. Metode historis dalam penggunaannya selalu bergandengan dengan deskriptif analisa dan metode perbandingan. Cara kerja dari metode ini adalah dengan cara menyelidiki bagian doktrin evolusi dari kehidupan sosial-politik manusia. Akan tetapi bila berkaca pada kenyataan yang sekarang terjadi, metode historis sudah cukup ditinggalkan di bandingkan dengan maraknya penggunaan metode ini dahulu, karena terjadi perbedaan yang signifikan antara fenomena politik pada masa lalu dan fenomena yang terjadi pada dewasa ini baik dari segi jenis maupun sifatnya.
- 4) Metode Ekonomi Metode ini dipergunakan para sarjana ilmu politik untuk mengetahui aspek-aspek ekonomis dari suatu materi. Dengan kata lain, semua gejala sosial politik dianggap sebagai penjelmaan dari hubungan produksi yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 5) Metode Sosiologi. Dalam metode ini lembaga politik dilihat sebagai gejala sosial berupa organisme sosial. Organisme sosial itu meliputi para individu sebagai subjek penting dalam lembaga politik. Fungsi utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan gambaran-gambaran yang nyata mengenai keadaan lembaga-lembaga politik.
- 6) Metode Psikologis. Penyelidikan dengan menggunakan metode ini menggunakan dalil-dalil serta hukum-hukum psikologis untuk berbagai masalah politik. Hubungan politik digambarkan berdasarkan fungsi, motif, peranan kepribadian, sifat psikis dari pihak dalam ruang lingkup tersebut. metode ini banyak digunakan dalam penyelidikan kasus-kasus politik yang berhubungan dengan kepribadian. Misalnya mengenai kepemimpinan.

- 7) Metode Induksi. Metode induksi adalah suatu metode dengan cara kerja mengumpulkan beberapa fakta dan data tertentu kemudian menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan
- 8) Metode Deduksi. Metode deduksi yaitu metode yang menganalisis fakta dan data dengan cara memaksimalkan potensi akal agar tercipta kerasionalan dalam proses penguraiannya.
- 9) Metode Dialektis. Metode dialektis menggunakan proses tanya jawab untuk mencari pengertian. Teknik komunikasi demikian, dapat diperoleh hubungan antar semua pihak dengan tujuan agar tidak terjadi ketimpangan dan mengharapkan keterbukaan dan saling mengenal.
- 10) Metode Perbandingan. Metode ini menggunakan proses pengukuran sesuatu berdasarkan perbedaan dan persamaan satu dengan yang lain yang sejenis. Misalnya, dengan membuat pengukuran kepada suatu kelompok tertentu untuk melihat keberagaman sudut pandang.
- 11) Metode Fungsional. Metode fungsional yaitu suatu metode yang dalam cara kerjanya membahas objek dan gejala politik, contoh fungsi dan pengaruh baik positif maupun negatif dalam penyelenggaraan politik pemerintahan.
- 12) Metode Sistematis. Metode sistematis yaitu metode yang berangkat dari pengumpulan materi yang teratur, seimbang, berkesinambungan, saling terkait satu sama lain, dan memiliki arah tujuan yang sama.
- 13) Metode Sinkretis. Metode ini menggabungkan beberapa faktor seperti: data, aliran, keilmuan, budaya, dan sistem yang diproses sedemikian rupa untuk mendapatkan pemikiran yang objektif.

Juga dalam hal ini tidak dapat dikatakan tentang teknik-teknik yang khusus berlaku bagi ilmu politik. Semua teknik yang akan dibahas nanti, juga merupakan teknik-teknik ilmu sosial lainnya. Malahan teknik-teknik itu lebih banyak dipergunakan dalam bidang penyelidikan yang sosiologis. Walaupun demikian, teknik-teknik ini juga dibahas karena diharapkan agar kelak ilmu

politik lebih banyak dan lebih intensif mempergunakan metode-metode itu dalam penyelidikan masalah politik. Tergolong sebagai teknik-teknik ilmu politik antara lain ialah "*questionnaire, sampling, interview, opinionnaire, participant-observer, schedule, direct observation, case study dan action research*" (J.S.Roucek dan Roland L. Warren, 1959:184).

Questionnaire dipergunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang sesuatu masalah tertentu. Sejumlah pertanyaan tertentu disusun sebelumnya, dikirimkan kepada orang-orang tertentu untuk dijawab sendiri oleh orang itu atau memilih jawaban yang sudah dilampirkan (apabila ada jawaban dilampirkan). Kesulitan dari teknik *questionnaire* ialah bahwa penjelasan-penjelasan selanjutnya tidak dapat segera diberikan kepada orang-orang yang dimaksud. Teknik *questionnaire* ini lazim dipergunakan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai sikap politik (*political attitude*) dari golongan-golongan tertentu.

Apabila dipergunakan keterangan-keterangan dari sejumlah besar orang, maka diperlukan *sampling*, yaitu diadakan pilihan diantara orang-orang itu yang dapat dianggap mewakili pendapat-pendapat mereka sebagai keseluruhan. *Interview* adalah teknik yang dipergunakan, dalam mana dua atau lebih orang berhadapan-hadapan sebagai penanya dan penjawab. Teknik *interview* dipergunakan apabila jumlah orang yang hendak diinterview tidak besar. Kebaikannya teknik *interview* ialah karena penanya dapat menjelaskan sampai ke detail-detailnya pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan itu. Teknik *opinionnaire* adalah satu teknik terbaru dalam bidang ilmu sosial pada umumnya, dan ilmu politik pada khususnya. Teknik *opinionnaire* ini juga disebut "*letter of inquire*" dan sepanjang pengetahuan kami hanya pernah sekali dipergunakan, ialah oleh APSA dalam laporannya mengenai keadaan ilmu politik di Amerika Serikat dalam tahun 1950. Teknik *opinionnaire* merupakan teknik dalam mana sejumlah masalah-masalah tertentu dikemukakan secara tertulis kepada orang-orang dengan harapan agar mereka memberikan pendapat (*opi-*

nion) mereka atas penyelesaian masalah-masalah itu. Dalam teknik *participant-observer*, penyelidik langsung ikut serta (*participate*) sebagai peserta (*participant*) dalam objek yang diselidiki itu. Teknik *schedule* adalah kelanjutan dari teknik *interview*. Dalam teknik *schedule* ini, penanya mengemukakan pertanyaan-pertanyaan yang terlebih dulu disusun. Jawaban-jawaban yang diberikan kemudian dicatat oleh penanya. Peristiwa-peristiwa yang dialami itu dapat dicatat secara sistematis atau tidak, atau hanya diingat.

Teknik *case study* adalah teknik yang mengkhususkan satu masalah tertentu. Masalah ini diselidiki secara intensif dari semua seginya. Dalam teknik *action research* penyelidik berusaha secara aktif mempengaruhi objek yang diselidiki dan kemudian mengamati akibat daripada pengaruh itu atas objek yang diselidiki. Teknik *action research* berbeda dari teknik *participant-observer* justru dalam sifat keaktifan itu. Dalam teknik *participant-observer*, penyelidik tidak berusaha mempengaruhi objek yang diselidiki, sedangkan dalam teknik *action research* penyelidik secara aktif berusaha mempengaruhi objek yang diselidiki.

Demikian pembahasan singkat dari sejumlah metode dan teknik ilmu politik. Sekali lagi diperingatkan bahwa metode dan teknik itu tidak terlepas satu dan lainnya, dan kadang-kadang dipergunakan beberapa metode dan teknik tertentu secara bergabung. Penggandengan beberapa metode dan teknik itu bergantung pada sifat objek yang diselidiki.

E. Realitas Politik

Fakta politik meliputi teks-teks politik, kejadian-kejadian politik, pernyataan tokoh-tokoh politik, dan berita-berita politik. Teks-teks politik adalah dokumen-dokumen politik semisal hasil-hasil perjanjian, surat-surat yang dikeluarkan oleh negara atau badan-badan negara, serta memo tokoh-tokoh politik yaitu para pejabat negara, tokoh-tokoh partai, perwakilan suatu negara, dan pihak-pihak yang berwenang lainnya. Dokumen tersebut mencakup dokumen resmi/umum, yaitu untuk konsumsi khalayak,

maupun dokumen yang bersifat rahasia. Kejadian-kejadian politik meliputi semua kejadian yang berpengaruh terhadap nasib rakyat. Tidak semua kejadian merupakan kejadian politik. Tidak semua tragedi menjadi kejadian politik. Adanya bencana alam gempa bumi, gunung meletus, dan kejadian alam lainnya bukanlah kejadian politik. Akan tetapi, sikap dan tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang dapat menjadi kejadian politik. Sebaliknya, kejadian yang tidak alami harus dilihat dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat kejadian tersebut terjadi. Kejadian ledakan di Exxon Mobil di Arun Aceh, misalnya, bisa menjadi kejadian politik ketika dikaitkan dengan situasi dan kondisinya, yaitu ketika pengelolaan sumberdaya alam yang terkait dengan kontrak eksploitasinya ditinjau ulang. Sebaliknya, ledakan mercon di suatu pabrik mercon besar kemungkinan bukan merupakan kejadian politik. Kejadian ledakan di Bali jelas merupakan kejadian politik, apalagi ledakan itu terjadi pada saat kampanye antiterorisme tengah gencar-gencarnya. Termasuk kejadian politik adalah pertemuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik. Dalam hal ini, harus diperhatikan setiap hal yang terkait dengan pertemuan itu mulai dari waktu, tempat, inisiator, pihak yang ikut serta, dan para pelakunya. Semuanya harus diperhatikan sebagai satu kesatuan peristiwa politik.

Sementara itu, berkaitan dengan pernyataan para tokoh, tidak semua yang diucapkan oleh mereka dapat dianggap sebagai fakta politik. Harus dilihat konteks atau situasi dan kondisi serta dalam kapasitas apa pernyataan tersebut diucapkan. Tidak semua pernyataan tokoh dapat dianggap sebagai fakta politik yang signifikan. Pada intinya pernyataan yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh yang berwenang dalam suatu masalah dapat dianggap sebagai fakta politik atas masalah tersebut. Dalam kasus ledakan di Bali, misalnya, pernyataan para pejabat keamanan, menteri-menteri terkait, dan para petugas yang mengurus kasus tersebut merupakan fakta politik. Berikutnya, harus dibedakan pula antara pernyataan politik dengan komentar politik. Pernyataan yang berisi fakta kejadian, hasil investigasi, *press release*, sikap resmi,

serta jawaban atas pertanyaan atau tanggapan merupakan fakta politik. Sebaliknya, analisis dan komentar, apalagi yang dikeluarkan di luar konteks atau di luar kapasitasnya, tidak dapat dianggap sebagai fakta politik. Dengan demikian, pernyataan tim investigasi bom Bali merupakan fakta politik; begitu pula pernyataan yang dikeluarkan oleh Menlu Australia atau Menhan Australia, pejabat Singapura, dan para pejabat US semuanya merupakan fakta politik untuk kasus tersebut.

Semua fakta-fakta politik tersebut bisa didapatkan secara langsung. Akan tetapi, pada umumnya, fakta-fakta politik kita dapatkan dari media massa; baik berupa surat kabar majalah, televisi, radio maupun sumber berita lainnya. Inilah yang dinamakan sebagai berita-berita politik. Berita-berita politik bahkan menjadi sumber pokok dari fakta politik. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi seorang politikus untuk selalu mengikuti berita. Bukan berarti semua berita harus diambil. Berita-berita politik tersebut harus dipertimbangkan dari segi penting-tidaknya, otensitasnya, direkayasa-tidaknya, cara-cara penyebarannya, ringkas-panjangnya, dan sebagainya. Berkaitan dengan berita politik ini, penting bagi kita untuk membedakan fakta politik dengan komentar atau analisis. Bagian penting dari berita semacam ini adalah berkaitan dengan tempat, waktu, pelaku, bagaimana terjadi, tentang peristiwanya, dan pernyataan yang dikeluarkan (yang biasanya diungkapkan dengan ungkapan langsung). Inilah fakta politik. Sebaliknya, analisis dan komentar yang menjadi bagian dari berita bisa saja diambil dan bisa saja tidak sesuai dengan penting-tidaknya serta sesuai-tidaknya dengan fakta yang terjadi.

Ilmu politik salah satu bentuk atau bagian kajiannya ialah kegiatan politik. Kegiatan politik ialah suatu bentuk aktifitas yang dilakukan oleh para pelaku politik itu sendiri, yang mana mereka melakukan kegiatan-kegiatan mereka demi mencapai tujuan bersama. Selain itu di dalam kegiatan politik dikenal pula strategi politik, pertempuran politik. Seperti di dalam semua pertempuran-pertempuran yang kompleks setiap orang berlaku sesuai

rencana yang dipahami lebih dahulu kurang lebih rencana yang sudah terola. Dimana setiap orang membuat antisipasi bukan saja dalam serangan-serangannya akan tetapi juga tentang jawaban-jawaban lawannya dan alat-alat untuk menyelesaikannya. Rencana perjuangan ini merupakan strategi; unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalamnya-tindakan melawan musuh dan jawaban terhadap reaksinya merupakan taktik. Analisa strategi politik tetap agak terkeping-keping, kecualidi dalam hubungan internasional dan konflik-konflik serikat buruh. Di banyak tempat, studi-studi terutama membahas perjuangan-perjuangan yang menyertai keputusan-keputusan yang khusus. Di dalam tahun-tahun terakhir, beberapa sarjana mencoba mengenakan metode-metode matematis dalam analisisnya, dengan mempergunakan teori-teori tentang *game of strategy* dan teknik-teknik calculus operasional. Riset jenis ini menarik dan bernilai dalam wilayah-wilayah terbatas. Di sini kita akan mempertimbangkan titik-titik yang lain tentang strategi yang membahas seluruh perjuangan politik secara keseluruhan. Dalam bidang global ini, hanya beberapa garis besar umum bisa diberikan.

Para sarjana ilmu politik juga memasukkan beberapa poin yang menjadi bagian dari sasaran ilmu politik selain dari yang sudah dipaparkan di atas maka terdapat beberapa hal yang juga menjadi dari sasaran dilakukannya politik. antara lainyaitu pendidikan, kekayaan, kesehatan, keterampilan, kasih sayang, kejujuran/keadilan, dan keseganan. Dalam dunia keilmuan telah diterima bahwa sesuatu ilmu selalu membahas suatu sasaran tertentu. Begitupun dengan ilmu politik harus mempunyai sasaran pula, dan kurang lebih terdapat enam macam sasaran ilmu politik, diantaranya adalah Negara.

F. Idiologi Politik

Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Destutt de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan “sains tentang ide”. Ideologi dapat dianggap sebagai visi yang komprehensif, sebagai cara memandang

segala sesuatu (bandingkan *Weltanschauung*), secara umum (lihat Ideologi dalam kehidupan sehari-hari) dan beberapa arah filosofis (lihat Ideologi politis), atau sekelompok ide yang diajukan oleh kelas yang dominan pada seluruh anggota masyarakat. Tujuan utama dibalik ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Secara implisit setiap pemikiran politik mengikuti sebuah ideologi walaupun tidak diletakkan sebagai sistem berpikir yang eksplisit (definisi ideologi Marxisme). Selain definisi di atas, berikut ada beberapa definisi lain tentang ideologi: Wikipedia Indonesia: Ideologi adalah kumpulan ide atau gagasan atau *aqidah 'aqliyyah* (akidah yang sampai melalui proses berpikir) yang melahirkan aturan-aturan dalam kehidupan. Destertt de Tracy: Ideologi adalah studi terhadap ide-ide/pemikiran tertentu. Descartes: Ideologi adalah inti dari semua pemikiran manusia. Machiavelli: Ideologi adalah sistem perlindungan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Thomas H: Ideologi adalah suatu cara untuk melindungi kekuasaan pemerintah agar dapat bertahan dan mengatur rakyatnya. Francis Bacon: Ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Karl Marx: Ideologi merupakan alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Napoleon: Ideologi keseluruhan pemikiran politik dari rival-rivalnya. Muhammad Muhammad Ismail: Ideologi (*Mabda'*) adalah *Al-Fikru al-asasi al-ladzi hubna Qablahu Fikrun Akhar*, pemikiran mendasar yang sama sekali tidak dibangun (disandarkan) di atas pemikiran pemikiran yang lain. Pemikiran mendasar ini merupakan akumulasi jawaban atas pertanyaan dari mana, untuk apa dan mau kemana alam, manusia dan kehidupan ini yang dihubungkan dengan asal muasal penciptaannya dan kehidupan setelahnya?. Dr. Hafidh Shaleh: Ideologi adalah sebuah pemikiran yang mempunyai ide berupa konsepsi rasional (*aqidah aqliyyah*), yang meliputi akidah dan solusi atas seluruh problem kehidupan manusia. Pemikiran tersebut harus

mempunyai metode, yang meliputi metode untuk mengaktualisasikan ide dan solusi tersebut, metode mempertahankannya, serta metode menyebarkannya ke seluruh dunia.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Ideologi (*mabda'*) adalah pemikiran yang mencakup konsepsi mendasar tentang kehidupan dan memiliki metode untuk merasionalisasikan pemikiran tersebut berupa fakta, metode menjaga pemikiran tersebut agar tidak menjadi absurd dari pemikiran-pemikiran yang lain dan metode untuk menyebarkannya. Apabila kita telusuri seluruh dunia ini, maka yang kita dapati hanya ada tiga ideologi. Yaitu Kapitalisme, Sosialisme termasuk Komunisme, dan Islam. Untuk saat ini dua *mabda* pertama, masing-masing diemban oleh satu atau beberapa negara. Sedangkan *mabda* yang ketiga yaitu Islam, saat ini tidak diemban oleh satu negarapun, melainkan diemban oleh individu-individu dalam masyarakat. Sekalipun demikian, *mabda* ini tetap ada di seluruh penjuru dunia. Sumber konsepsi ideologi Kapitalisme dan Sosialisme berasal dari buatan akal manusia, sedangkan Islam berasal dari wahyu Allah SWT (hukum syara').

Ilmu sosial, ideologi politik adalah sebuah himpunan ide dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seharusnya masyarakat bekereja, dan menawarkan ringkasan order masyarakat tertentu. Ideologi politik biasanya mengenai dirinya dengan bagaimana mengatur kekuasaan dan bagaimana seharusnya dilaksanakan. Ada beberapa ungkapan teori terhadap kemajuan suatu negara yaitu:

a. Teori Komunis

Karl Marx, Friedrich Engels dan pengikut mereka, sering dikenal dengan marxisme, dianggap sebagai ideologi politik paling berpengaruh dan dijelaskan lengkap pada abad 20. Contoh ideologi lainnya termasuk: anarkisme, kapitalisme, komunisme, komunitarianisme, konservatisme, neoliberalisme, demokrasi kristen, fasisme, monarkisme, nasionalisme, nazisme, liberalisme, libertarianisme, sosialisme, dan demokrat sosial. Kepopuleran

ideologi berkat pengaruh dari “*moral entrepreneurs*”, yang kadang kala bertindak dengan tujuan mereka sendiri. Ideologi politik adalah badan dari ideal, prinsip, doktrin, mitologi atau simbol dari gerakan sosial, institusi, kelas, atau grup besar yang memiliki tujuan politik dan budaya yang sama. Merupakan dasar dari pemikiran politik yang menggambarkan suatu partai politik dan kebijakannya. Ada juga yang memakai agama sebagai ideologi politik. Hal ini disebabkan agama tersebut mempunyai pandangan yang menyeluruh tentang kehidupan. Islam, contohnya adalah agama yang holistik.

b. Teori Empiris

Fakta empiris menunjukkan golongan agama bukanlah manusia yang suci yang tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dari pengalaman itu, Thomas Hobbes menarik dua kesimpulan peristiwa tersebut. *Pertama*, menata masyarakat berdasarkan prinsip normatif seperti agama dan moralitas tidak mungkin. Menurut Thomas Hobbes prinsip-prinsip itu hanyalah kedok-kedok emosi dan nafsu-nafsu hewani yang paling rendah. *Kedua*, masyarakat bisa mewujudkan perdamaian hanya apabila mampu mengenyahkan nafsu-nafsu yang rendah. Damai bisa diciptakan bila manusia terbebas dari hawa nafsunya. Dari konsepsi ini pula muncul karya-karya Thomas Hobbes yang cemerlang mewakili zamannya. Thomas Hobbes, karyanya yang terkenal *Leviathan*, diterbitkan tahun 1661. Sebagaimana halnya dengan ilmuwan lainnya, Hobbes hidup dalam era pergolakan. Ia sangat terkesan oleh tuntutan akan kekuasaan politik yang kuat untuk mengeluarkan tatanan yang ada dari pergolakan yang mengancam masyarakat sipil. Situasi yang demikian mengstimulus inspirasi Thomas Hobbes untuk merumuskan teori-teori politik yang relevan dengan kondisi zamannya. Pikiran-pikiran yang ditelorkan merupakan produk dan mewakili karakter pada zamannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa situasi kacau pada sisi lain titik balik munculnya berbagai karya yang monumental.

BAB. II

ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUAN

A. Politik dan Ilmu Pengetahuan

Adakalanya dipersoalkan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan (*science*) atau tidak dan disangsikan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan. Soal ini menimbulkan pertanyaan: apakah yang dinamakan ilmu pengetahuan (*science*) itu? Karakteristik ilmu pengetahuan (*science*) ialah tantangan untuk menguji hipotesis melalui eksperimen yang dapat dilakukan dalam keadaan terkontrol (*controlled circumstances*) misalnya laboratorium. Berdasarkan eksperimen-eksperimen itu ilmu-ilmu eksakta dapat menemukan hukum-hukum yang dapat diuji kebenarannya. Jika definisi ini dipakai sebagai patokan, maka ilmu politik serta ilmu-ilmu sosial lainnya belum memenuhi syarat, karena sampai sekarang belum ditemukan hukum-hukum ilmiah seperti itu. Mengapa demikian? Oleh karena yang diteliti adalah manusia dan manusia itu adalah makhluk yang kreatif, yang selalu menemukan akal baru yang belum pernah diramalkan dan malahan tidak dapat diramalkan. Lagi pula manusia itu sangat kompleks dan perilakunya tidak selalu didasarkan atas pertimbangan rasional dan logis, sehingga mempersukar usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi untuk masa depan. Dengan kata lain perilaku manusia tidak dapat diamati dalam keadaan terkontrol.

Namun sebelum kita jauh membahas masalah apakah politik merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan, maka perlu kiranya untuk meninjau apa saja syarat-syarat agar sesuatu dapat disebut ilmu pengetahuan. Serangkaian pengetahuan akan layak untuk disebut ilmu pengetahuan, jika ia

memenuhi atau dapat memberi jawaban atas tiga unsur pokok atau kajian pokok alam sebuah ilmu, yaitu: *ontologi*, *epistimologi*, dan *aksiologi*. Ontologi secara umum membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu, serta menjawab pertanyaan tentang 'ada' dan 'realitas' tentang sesuatu yaitu obyek ilmu tersebut, baik materi yang menjadi pokok persoalan, maupun obyek formal yang menjadi pusat perhatiannya. Dengan kata lain meninjau persoalan secara ontologis adalah mengadakan penyelidikan terhadap sifat dan realitas dengan refleksi rasional serta analisis dan sintesis logika. Karenanya, ilmu harus sistematis, dan memiliki obyek tertentu, baik obyek formal maupun obyek materi, terminologi, metodologi, filsafat dan teori yang khas serta bersifat umum.

Epistimologi, berasal dari bahasa yunani, yaitu "episteme" yang berarti pengetahuan. Persoalan pokok yang dipertanyakan adalah tentang bagaimana sesuatu kebenaran itu datang dan bagaimana kita mengetahuinya, bagaimana pula kita membedakan antara yang benar dan salah. Dengan melakukan penkajian terhadap epistimologi ilmu politik misalnya, akan membawa kita semakin memahamai apakah ilmu politik itu sebuah disiplin ilmu tersendiri atau hanya sekedar cabang dari salah satu ilmu cabang saja

Aksiologi adalah penerapan ilmu. Penerapan ilmu pengetahuan itu dapat diketahui pertama-tama klasifikasinya, kemudian dengan melihat tujuan ilmu itu sendiri, dan yang terakhir perkembangan ilmu tersebut. Pada penerapannya, ilmu dapat dibedakan atas ilmu murni dan ilmu terapan, ataukah berada di antara kedua jenis ilmu tersebut. Sedangkan dalam kaitannya dengan fungsi dimilikinya, ilmu dapat dibedakan atas ilmu teoritis rasional dan ilmu empiris praktis atau yang berada di antara kedua jenis ilmu tersebut. Ilmu politik selain termasuk ilmu teoritis empiris juga termasuk ilmu praktis atau ilmu terapan, karena akan langsung dapat diterapkan disebut dengan politik praktis. Ilmu murni yang bersifat teoritis dikaji oleh para sarjana demi kepentingan ilmu itu sendiri, sedangkan ilmu

terapan yang bersifat empiris dikaji oleh para pemakai yang pada gilirannya nanti mereka sudah siap pakai di pekerjaan dalam bidangnya,

Jadi, dengan pengkajian aksiologi ilmu politik, perkembangan ilmu politik, baik sebagai ilmu murni (*pure science*) maupun sebagai ilmu terapan (*applied science*), akan lebih tampak jelas terdeteksi. Perkembangan ilmu politik sebagaimana layaknya sebuah ilmu yang semakin lama semakin berkembang tentu saja melewati berbagai tahap perkembangan, yaitu; a). Tahap klasifikasi, yaitu tahap di mana ilmu pengetahuan berada dalam kondisi pemilihan, dalam arti sedang menentukan dan memilah-milah keberadaannya, termasuk dalam kategori serta kelas yang mana sesuatu ilmu tersebut. Jadi, peliputan berorientasi pada kepastian, apakah suatu pengetahuan itu masih merupakan anak cabang suatu ilmu atau sudah merupakan disiplin ilmu pengetahuan yang sudah berdiri sendiri, b). Tahap komparasi, yaitu tahap di mana ilmu pengetahuan tersebut berada dalam tahap membanding-bandingkan suatu ilmu dengan ilmu yang lain. Tahap ini merupakan lanjutan dari tahap klasifikasi, jadi peliputan sudah barang tentu berorientasi pada pengkajian posisi suatu ilmu, dengan ilmu apa saling bertumpang-tindih (*convergency*) dan dengan ilmu apa pula saling berhubungan, telah ini bermanfaat untuk mendeteksi posisi keberadaan ilmu itu sendiri. c). Tahap kuantifikasi, yaitu tahap di mana ilmu pengetahuan tersebut berada dalam tahap memperhitungkan kematangannya, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Hanya saja ilmu-ilmu sosial pada umumnya relatif terbelakang dan sulit diukur, dibandingkan dengan ilmu-ilmu eksata.

Oleh karena itu, pada awalnya para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan para sarjana ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Mereka berpendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok pemikiran tertentu "(the sum of coordinated knowledge relative to a determined subject)". UNESCO,

Contemporary Political Science: *A Survey of methods, research and teaching* (Paris: UNESCO, 1950:4).

Apabila perumusan ini dipakai sebagai patokan, maka memang ilmu politik boleh dinamakan suatu ilmu pengetahuan. Akan tetapi pada tahun 1950-an ternyata banyak sarjana ilmu politik sendiri tidak puas dengan perumusan yang luas ini, karena tidak mendorong para ahli untuk mengembangkan metode ilmiah. Munculnya pendekatan perilaku (*behavioral approach*) dalam dekade 1950-an, merupakan gerakan pembaruan yang ingin meningkatkan mutu ilmu politik dan mencari suatu *new science of politics*.

Gerakan baru ini, yang dapat disebut sebagai revolusi dalam ilmu politik, merumuskan pokok pemikiran sebagai berikut: sekalipun perilaku manusia adalah kompleks, tetapi ada pola-pola berulang (*recurrent patterns*) yang dapat diidentifikasi. Pola-pola dan keteraturan perilaku ini dapat dibuktikan kebenarannya melalui pengamatan yang diteliti dan sistematis. Dengan menggunakan statistik dan matematika dapat dirumuskan hukum-hukum yang bersifat probabilitas. Akan tetapi akhir dekade 1960-an timbul reaksi terhadap pendekatan perilaku. Kali ini kritik datang dari ahli-ahli yang orientasi politiknya kekiri-kirian, seperti Herbert Marcuse dan Jean Paul Sartre. Di antara sarjana behavioralis pun ada yang mendukung alur pemikiran ini. Kritik yang dikemukakan ialah bahwa pendekatan perilaku (*behavioral approach*) terlalu kuantitatif dan abstrak, sehingga tidak mencerminkan realitas sosial. Berbeda dengan para behavioralis yang berpendapat bahwa nilai tidak boleh masuk dalam analisis keadaan sosial, kelompok *post-behavioralis* berpendapat bahwa nilai-nilai boleh masuk dalam analisis keadaan sosial. Kelompok pasca perilaku (*post-behavioralist*) berpendapat bahwa nilai-nilai harus turut mewarnai penelitian. Nilai-nilai harus diteliti dan para ilmuwan melibatkan diri secara aktif untuk mengatasi masalah-masalah sosial.

Perkembangan selanjutnya muncul pendapat bahwa pendekatan behavioralis, dalam usaha meneliti perilaku manusia, terlalu meremehkan negara beserta lembaga-lembaganya padahal pentingnya lembaga-lembaga itu tidak dapat dinafikan. Aliran baru ini dipelopori antara lain oleh Theda Skocpol yang menjadi tersohor karena tulisannya yang berjudul "*bringing the state back in: strategies of analysis in current research*." Selain itu pengaruh ilmu ekonomi juga berkembang melalui teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Jadi jelaslah bahwa dewasa ini ada keterkaitan yang erat kaitannya antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya, seperti antropologi, sosiologi, dan ekonomi. Pendekatan perilaku sendiri muncul dan berkembang dalam masa sesudah perang Dunia II. Gerakan ini terpengaruh oleh karya-karya sarjana sosiologi Max Weber dan Talcott Parsons, di samping penemuan-penemuan baru di bidang psikologi. Para sarjana ilmu politik yang terkenal karena pendekatan perilaku politik ini adalah Gabriel A. Almond (*structural-functional analysis*), David Easton (*general systems analysis*), Karl W. Deutsch (*communications theory*), David Truman, Robert Dahl, dan sebagainya. Salah satu pemikiran pokok dari para pelopor pendekatan perilaku adalah bahwa perilaku politik harus lebih menjadi fokus pengamatan daripada lembaga-lembaga politik, atau kekuasaan, atau keyakinan politik. Dalam suatu sistem politik, sistem menerima *inputs* bersifat dukungan dan tuntutan dari masyarakat. *Inputs* ini dalam sistem politik dikonvensi menjadi *outputs* dalam bentuk kebijakan dan peraturan. Hal ini terjadi dalam *black box*. *Outputs* ini pada gilirannya dikembalikan ke lingkungan dan menjadi *inputs* baru. Dengan cara ini tercapai keseimbangan (*equilibrium*) dan stabilitas. Akan tetapi yang lebih menonjol lagi ialah menampilkan suatu orientasi baru yang mencakup beberapa konsep pokok. Konsep-konsep pokok para behavioralis dapat disimpulkan sebagai berikut: a). Perilaku politik memperlihatkan keteraturan (*regularities*) yang dapat dirumuskan dalam generalisasi-generalisasi, b). Generalisasi-generalisasi ini pada dasarnya harus dapat dibuktikan kebenarannya (*verification*) dengan menunjuk pada perilaku

yang relevan, c). Untuk mengumpulkan dan menafsirkan data diperlukan teknik-teknik penelitian yang cermat, d). Untuk mencapai kecermatan dalam penelitian diperlukan pengukuran dan kuantifikasi melalui ilmu statistik dan matematika, e). Dalam membuat analisa politik nilai-nilai pribadi si peneliti sedapat mungkin tidak main peranan (*value free*), f). Penelitian politik mempunyai sifat terbuka terhadap konsep-konsep, teori-teori, dan ilmu sosial lainnya. Dalam proses intraksi dengan ilmu-ilmu lainnya misalnya dimaksudkan istilah baru seperti sistem politik, fungsi, peranan, struktur, budaya politik, dan sosialisasi politik di samping istilah lama seperti negara, kekuasaan, jabatan, institusi, pendapat umum, dan pendidikan kewarganegaraan (*citizenship training*).

Berkat timbulnya pendekatan perilaku, telah berkembang beberapa analisis yang mengajukan rumusan-rumusan baru tentang kedudukan nilai-nilai (*value*) dalam penelitian politik serta satuan-satuan sosial yang hendak diamati. Di antaranya yang terkenal adalah analisa struktural-fungsional (*structural-functional analysis*) dan pendekatan analisa sistem (*systems analysis approach*). Kedua analisa yang terakhir tadi erat berhubungan dan pada intinya berpangkal tolak pada meneropong masyarakat dari segi keseluruhan (*macro analysis*) berdasarkan adanya hubungan erat antara hubungan masyarakat yang satu dengan unsur masyarakat lainnya yang akhirnya cenderung untuk mencapai adanya keseimbangan dalam masyarakat. Setiap peranan yang terpendam (*latent*) maupun yang nyata (*manifest*) dari tiap-tiap unsur masyarakat senantiasa berpengaruh secara langsung terhadap unsur-unsur masyarakat lainnya.

Pendekatan perilaku mempunyai beberapa keuntungan, antara lain memberi kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik di beberapa negara yang berbeda sejarah perkembangan, latar belakang kebudayaan, serta ideologinya, dengan mempelajari bermacam-macam mekanisme yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang memang merupakan tujuan dari setiap kegiatan politik dimanapun terjadi. Dengan demikian

ilmu politik perbandingan maju dengan pesat. Sementara itu para pelopor pendekatan tradisional tidak tinggal diam, dan terjadilah polemik yang sengit antara pendekatan perilaku dan pendekatan tradisional. Ilmuan seperti Erick Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowell menyerang pendekatan perilaku dengan argumentasi bahwa pendekatan perilaku terlalu lepas dari nilai dan tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang berdasarkan pandangan hidup tertentu seperti misalnya: sistem politik apakah yang paling baik, atau masyarakat bagaimana sebaiknya dibangun. Juga dilontarkan kritik bahwa tidak ada relevansi dengan politik praktis dan menutup mata terhadap masalah-masalah sosial yang ada. Sering terjadi dalam konflik intelektual, kedua belah pihak meningkatkan dan mempertajam alat analisa (*tools of analysis*) masing-masing untuk meneliti kembali rangka, metode, dan tujuan dari ilmu politik. Sekalipun tidak ada pihak yang menang, akan tetapi hasil dari dialog ini sangat mendorong perkembangan ilmu politik itu sendiri, baik di bidang pembinaan teori (*theory building*) maupun di bidang penelitian komparatif dari negara yang maju dan negara-negara yang sedang berkembang, sehingga dewasa ini perkembangan ilmu politik memberikan harapan untuk masa depan. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan perilaku mempunyai pengaruh yang besar atas ilmu politik dan menduduki tempat terhormat didalamnya. Pendekatan tradisional tetap memerankan peranan pokok, akan tetapi tidak lagi merupakan pendekatan tunggal yang dominan.

Hubungan ini perlu disebut timbulnya revolusi pasca behavioralisme. Gerakan ini timbul di Amerika pada pertengahan dekade 1960-an dan mencapai puncaknya pada akhir dekade enam puluhan karena pengaruh berlangsungnya perang Vietnam (1964-1969), kemajuan-kemajuan teknologi antara lain di bidang persenjataan dan masalah diskriminasi yang melahirkan gejolak sosial secara luas. Gerakan protes ini terpengaruh oleh tulisan-tulisan cendekiawan seperti Herbert Marcuse, C. Wright Mills, Jean Paul Satre, dan banyak mendapat dukungan di kampus berbagai universitas. Reaksi dari kelompok ini berbeda dengan

sikap kaum tradisional. Yang pertama lebih memandang ke masa depan, sedangkan kelompok kedua lebih memandang ke masa lampau.

Penelitian dan pendidikan ilmu politik menjadi suatu ilmu pengetahuan yang murni, sesuai dengan pola ilmu eksakta. Pokok-pokok reaksi ini dapat diuraikan yaitu; 1). Dalam usaha mengadakan penelitian yang empiris dan kuantitatif, ilmu politik menjadi terlalu abstrak dan tidak relevan terhadap masalah sosial yang dihadapi, padahal relevansi dianggap lebih penting dari pada penelitian yang cermat, 2). Karena penelitian terlalu bersifat abstrak, ilmu politik kehilangan kontak dengan realitas-relitas sosial, padahal ilmu politik harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis-krisis yang dihadapi manusia, 3). Penelitian mengenai nilai-nilai harus merupakan tugas ilmu politik, 4). Para cendekiawan mempunyai tugas historis dan unik untuk melibatkan diri dalam usaha mengatasi masalah-masalah sosial. Pengetahuan membawa tanggung jawab untuk bertindak, harus *engage* atau *committed* untuk mencari jalan keluar dari krisis yang dihadapi.

Kejadian-kejadian ini membuka mata para sarjana ilmu sosial amerika untuk mempergiat usahanya pada pemecahan masalah-masalah yang dihadapi masyarakatnya. Sekalipun gejala yang serupa tidak terjadi di indonesia, perkembangan yang terjadi di Amerika itu memberi pelajaran yang penting bagi para sarjana kita tentang kedudukan dan peranan ilmu, peranan sosial di negara kita.

B. Objek Ilmu Politik

Ilmu politik sudah diakui sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, memiliki disiplin ilmu tersendiri serta memiliki objek sebagai prasyaratnya. Objek adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, apa yang diamati, diteliti, dipelajari serta sesuatu yang dibahas dalam disiplin ilmu tertentu. Objek terdiri dari dua macam yaitu objek formal dan objek materil. Objek materil suatu ilmu bisa saja sama dengan objek materil ilmu yang

lainnya. Hal tersebut dikarenakan objek materil lebih bersifat umum dan merupakan topik yang bisa saja dibahas secara global. Akan tetapi yang membedakan terletak pada objek formilnya, objek formil suatu ilmu dengan ilmu lain pastilah berbeda dikarenakan sudut pandang yang dikenakan berasal dari ilmu masing-masing. Kemudian, objek formil selalu ditinjau secara khusus dan spesifik. Objek materil dapat dikatakan sebagai persoalan pokok, sedangkan objek formal disebut pusat perhatian. Objek materil yang dibahas dalam ilmu politik identik dengan objek materil yang dimiliki oleh ilmu kenegaraan lainnya, yaitu negara. Ilmu kenegaraan itu adalah ilmu politik, ilmu pemerintahan, ilmu hukum tata negara, ilmu administrasi negara, dan ilmu negara. Ilmu politik memiliki negara sebagai objek materinya, sedangkan secara khusus ilmu politik mengkaji mengenai yaitu pembuatan keputusan, kekuasaan, kekuatan kelompok, keresahan masyarakat, *interest group*, sistem pemerintahan termasuk pemerintah dan organisasi internasional, perilaku politik, kebijakan publik, keberhasilan pemerintahan, kepentingan partai politik, konflik, perilaku kepemimpinan, budaya politik, sosialisasi politik dalam berbagai definisi yang ditulis oleh para pemikir politik terdapat perbedaan masing-masing, itu disebabkan karena setiap sarjana meneropong obyek hanya satu aspek atau unsur dari politik saja unsur itu diperlakukannya sebagai konsep pokok, yang dipakainya untuk meneropong unsur-unsur lainnya.

Uraian tersebut teranglah bahwa konsep-konsep pokok itu berkaitan dengan: negara; negara dan pemerintah; kekuasaan; pengambilan keputusan; kebijaksanaan umum; pembagian; kelembagaan masyarakat; dan kegiatan serta tingkah laku politik, yakni sebagai berikut;

a) *Ilmu politik adalah mempelajari hal ihwal negara*

Menurut Johann Kaspar Blutschilli: "*Political science, the science which is concerned with the state, which endeavours to understand and comprehend the state in its conditions, in its essential nature, in various forms or manifestations its development.*" (ilmu politik adalah ilmu yang peduli dengan negara yang berusaha untuk mengerti

dan memahami kondisinya, yang sungguh alami, dalam bentuk yang bermacam-macam atau pengumuman pembangunan). Menurut Roger H.Soltau :*“political science, then is going to be the study of the state, its aims and purpose, the institutions by which those are going to be realized, its relation whith its individual members and with other states, and also what men have thought, said and written about all theses questions).*” (ilmu politik, yang kemudian menjadi ilmu tentang negara, yang mempunyai tujuan dan maksud, suatu institusi dengan segalanya itu menjadi terealisasi, berhubungan dengan individu anggotanya (masyarakatnya) dan negara lainnya, dan juga apa yang manusia pikirkan, dan tuliskan tentang tentang segala pertanyaan-pertanyaan).(Refika Aditama, 2003:11). Menurut J.Barents. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara, yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya.(Miriam Budiarjo, 1998:9).

b) *Ilmu politik adalah mempelajari (negara dan) pemerintahan.*

Menurut wilbur WhiteIlmu politik adalah *“the study of the information, forms, and proceses of the states and government.”* (ilmu politik tentang bentuk, susunan dan proses dari suatu negara dan pemerintahan).Ungkapan kata “politik” sukar dirumuskan dalam beberapa kata saja, karena penggunaannya mempunyai arti panjang lebar di samping bermacam kemungkinan pemaknaannya. *“Firstly, it covers everything relating to the government of societies, i.e. to officials relations between individual and the group. In another sense, it means: the pyramid of authority, which evolves withim all numerous and complex communities. In a third sense, political science, is away of studying society as whole from the specialpoint of view of the organization and functioning of the institution of government.”* (yang pertama, melindungi segala sesuatu yang berhubungan dalam suatu negara, untuk menghubungkan secara resmi antara individu dan kelompok. Pada pemikiran lain, berarti: suatu piramida kekuasaan, yang terus berkembang dengan segala banyaknya dan kompleksnya suatu masyarakat. Dan pada pemikiran yang ketiga,

ilmu politik itu jauh dari mempelajari masyarakat secara keseluruhan dari mulai poin khusus suatu pandangan dari suatu organisasi dan fungsinya pada suatu institusi di dalam pemerintahan). Menurut Raymond G. Gettel *Political science is the science of the state. It deals with* (ilmu politik adalah ilmu negara yang berhubungan: a). *The relations of to one another insofar as the state regulates them by law* (hubungan individu dengan yang lain sesuai negara mengatur mereka dengan hukum), b). *The relation individuals of groups of individuals to the state.* (hubungan individu atau kelompok individu dengan negara), c). *The relation of the state to state.* (hubungan negara dengan negara). (Arifin Rahman, 2002:4). Lebih lanjut ia mengatakan: *"The science of the state. It deals with the associations of human beings that forms political units, with the organization of their government in making and administering law and carrying on interstate relations...The topic in which it is mainly interested are state, government, and law."* (ilmu tentang negara. Berhubungan dengan asosiasi dari manusia yang mengatur unit-unit politik, dengan organisasi dari pemerintahannya dan dengan segala aktivitas pemerintahan dalam membuat dan mengatur hukum dan membawa pada hubungan antar negara bagian.. Topik ini sangat tertarik mengenai negara, pemerintah, dan hukum). (Teuku May Rudy, 1993:27)

c) *Ilmu politik adalah mempelajari gejala kekuasaan.*

Menurut Miriam Budiardjo: kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Lebih lanjut ia menjelaskan, sarjana-sarjana yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik, beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah merebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. (Miriam Budiardjo, 1998:9). Menurut Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan *"as one of the policy science that which studies influence and*

power as instruments of such integration,” dan bahwa “ political science is concerned with power in general, with all the form in which it accurs.” (sebagai salah satu dari ilmu kebijakan yang mempelajari perkembangan dan kekuasaan sebagai instrumen dari integrasi, dan bahwa ilmu politik lebih peduli dengan kekuasaan secara umum, dengan segala bentuk yang kotor).

d) *Ilmu politik adalah mempelajari pengambilan keputusan.*

Menurut Miriam Budiardjo adalah keputusan (*decission*) adalah membuat pilihan diantara beberapa altrnatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (*decission making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat, dapat pula menyangkut kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijaksanaan umum atau kebijaksanaan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih antara beberapa alternatif, yang akhirnya menetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Menurut Karl W. DeutschPolitik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (*politics is the making of decishion means*). Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa putusan-putusan semacam ini berbeda dengan pengambilan-pengambilan pribadi oleh orang seorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan-keputusan semacam itu dinamakan “sektor umum” atau sektor publik (*public sector* dari suatu negara). Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau menilai-nilai (*public gods*, yaitu mengenai apa yang dilakukan dan siapa dan mendapat apa). Dalam arti politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah.

e) *Ilmu politik adalah mempelajari kebijaksanaan umum.*

Menurut Meriam Budiardjo:kebijaksanaan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan

cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Lebih jauh ia menjelaskan, sarjana-sarjana yang menekankan aspek kebijaksanaan umum (*public, policy, beleid*) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai tujuan bersama. Cita-cita bersama ini ingin dicapai melalui usaha bersama dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemerintah. Menurut Hoogerwerf objek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud kebijakan di sini adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Menurut David Easton Ilmu politik adalah study mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*) (Teuku May Rudy, 1993:13). Dikatakannya lebih jauh, bahwa kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang mempengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik, jika aktifitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat.

f) *Ilmu politik adalah mempelajari pembagian,*

Menurut Meliam Budiardjo: yang dimaksud dengan pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjabaran nilai-nilai dan masyarakat. Lebih jauh ia menjelaskan, sarjana-sarjana yang menekankan pembagian alokasi beranggapan bahwa politik adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka bahwa pembagian ini sering tidak meratanya dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Dalam ilmu sosial suatu nilai (*value*) adalah susunan yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan

karena itu dianggap baik dan benar sesuatu yang dimiliki manusia. Nilai itu dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau suatu asas, seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dan sebagainya. Dia juga bersifat konkrit (material) seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. Menurut Harold Laswell: politik adalah masalah siapa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Menurut David Easton bahwa sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara otoritatif (berdasarkan untuk dan atas nama masyarakat)

g) *Ilmu politik adalah mempelajari kelembagaan masyarakat*

Menurut Kogekar dikutip dari *the liang giepolitical science*:
"A study of the organization of society in its widest sense, including all organizations, the family, the trade union, and state, with special reference to one aspect of human behavior; the exercise of control and the rendering of obedience." (ilmu politik: suatu pelajaran tentang organisasi masyarakat dalam pengertian yang luas, termasuk seluruh organisasi-organisasi, keluarga, serikat pengusaha, dan negara, dengan referensi khusus pada satu aspek dari tingkah laku masyarakat; pengendalian kontrol dan kumpulan kepatuhan). Lebih lanjut, dijelaskan, *"politics therefore is different from economics in being concerned with the organization of society for the purpose of a life which is fine in quality."* (politik karena itu berbeda dari perekonomian masyarakat untuk tujuan jika mendapatkan kehidupan yang lebih baik dalam kualitasnya).

h) *Ilmu politik adalah mempelajari kegiatan politik*

Menurut Roddey *"is indeed a complex process involving citizen attitudes and interests, group organization, electioneering, and lobbying, as well as the formulation, implementation, and interpretation of law."* (sebenarnya suatu proses sulit yang melibatkan tingkah masyarakat dan kepentingan, grup organisasi, pemeliharaan dan kegiatan melobi, sebaik seperti formulanya, implementasinya, dan interpretasi suatu hukum). T. May Rudy, 1993:14). Jika dianggap bahwa ilmu politik mempelajari politik, maka perlu kiranya

memahami istilah politik itu sendiri. Dalam kepustakaan ilmu politik itu ada beragam definisi mengenai politik.

Asal mula kata politik itu sendiri berasal dari kata “polis” yang berarti “negara kota”. Yang dimaksudkan adalah segala aktivitas yang dijalankan oleh polis untuk kelestarian dan perkembangan makna polis tersebut disebut “*politike techne*” (politik). Jadi berdasarkan pengertian polis di atas maka politik pada hakikatnya “*the art and science of government*” atau seni dan ilmu memerintah. Dalam pemahaman leksikal (pengataan), kata politik, dalam bahasa arabnya disebut ‘*siyasah*’ berasal dari kata ‘*sasa yasuusu-siyasah*’ – secara bahasa, artinya memerintah dan melarang atau ‘*politics*’ dalam bahasa Inggris mempunyai makna cerdas dan bijaksana – berasal dari kata Yunani *Politikos* (menyangkut warga negara), *polites* (seorang warga negara), *polis* (kota negara), *politeia* (kewargaan). Ada beberapa pengertian tentang politik: (1) Apa yang berhubungan dengan pemerintahan; (2) Perkara mengelola, mengarahkan, dan menyelenggarakan kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara; (3) Bidang studi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut; dan (4) Aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi antar-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara. (Dorus Lilijawa, 2007: 28-29).

Lebih lanjut marilah kita melihat definisi politik dari berbagai pemikir. Politik, meliputi pemerintahan-pemerintahan dalam negeri, kota praja dan internasional, patriasi “kegerejaan”, struktur perdagangan serta serikat pekerja (Aristoteles). Dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan (Robert A.Dahl). pada umumnya politik, mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara), yang menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan-tujuan sistem itu

sendiri maupun mengenai pelaksanaannya – dan dalam arti yang lebih luas politik diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu, misal politik pendidikan (B.N. Marbun). Tetapi politik bisa juga dikatakan sebagai kebijakan, kekuatan, kekuasaan, pemerintahan, konflik dan pembagian atau kata-kata serumpun (Hoogerwerf). Pada dasarnya walaupun definisi dari politik sangat beragam, namun berbagai definisi tersebut memiliki beberapa konsep-konsep pokok, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, *pertama*, negara (*state*); *kedua*, pemerintahan; *ketiga*, kekuasaan (*power*); *keempat*, pengambilan keputusan (*decisionmaking*). *Kelima*, kebijakan (*policy, bleid*); *keenam*, pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*); *ketujuh*, kelembagaan masyarakat (*organization of society*); dan *kedelapan*, kegiatan dan tingkah laku politik (*political activity and behavior*)

BAB. III

NEGARA DAN PEMERINTAH

A. Kronologis Sebuah Negara

Berbicara tentang asal mula Negara berarti kita berbicara mengenai dua pokok pertanyaan. *Pertama*, bagaimana terbentuknya suatu Negara baru? *Kedua*, bagaimana asal mula kejadian Negara yang pertama di muka bumi ini? Pada perkembangan selanjutnya, dua pokok pertanyaan itu telah melahirkan dua *mainstream* pendekatan penjelasan. *Pertama*, pendekatan faktual. Pendekatan ini didasarkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi, yang dapat ditelusuri dari pengalaman dan sejarah. Dalam pengertian lain, pendekatan ini berupaya menekankan terbentuknya suatu Negarabaru berdasarkan kenyataan-kenyataan. Jadi, sebelumnya diasumsikan sudah ada Negara. *Kedua*, pendekatan teoritis. Pendekatan ini didasarkan pada penggunaan metode falsafah, yaitu membuat dugaan-dugaan berdasarkan kerangka pemikiran yang logis. Dengan pendekatan ini, dan menjelaskan atau mengetahui asal mula dan kejadian suatu Negara pertama, para ahli tidak mencari bukti-bukti sejarah, dengan asumsi bahwa bukti-bukti sejarah itu sulit ditemukan. Kalaupun ada, sangat diragukan keotentikannya.

Menurut Roger H. Soltau: “negara adalah agen (*agency*) atau kewenangan (*authority*) yang mengantar atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat (*the state is an agency or authority managing or controlling these (common) affairs on behalf of and in the name of the community*). Harold J. Laski: negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih berkuasa daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah suatu

kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk memenuhi terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara hidup yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat (*the state a society which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society. A society is a group of human beings living together and working together for the satisfaction of their mutual wants. Such a society is a state when the way of live to which both individuals and associations must conform is defined by a coercive authority binding upon them all*). Max Weber: “negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam sesuatu wilayah (*the state is a human society that (succesfully) claims the monopoli of the legitimate use of physical force within a given territory*). Robert M. MacClever: “negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penerbitan di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa (*the state is an association which, acting through law as promulgated by a government endowed to this end with coercive power, maintains within a community territorially demarcated the universal external conditions of social order*). Jadi, sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasa yang sah.

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Para sarjana yang menekankan negara sebagai inti dari politik (*politics*), memusatkan perhatiannya pada lembaga-lembaga kenegaraan serta bentuk formalnya. Definisi-definisi ini bersifat tradisional dan agak sempit ruang lingkungannya. Pendekatan ini dinamakan pendekatan institusional (*institutional approach*) berikut ini adalah beberapa definisi: Roger F. Soltau misalnya, dalam bukunya

introduction to politics mengatakan: “ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara... dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dengan warganya serta hubungan antar negara (*political science is the study of the state, it's aim and purposes... the institutions by which these are going to be realized, it's relation with individual members, and other state*). (Roger F. Soltau, 1961:4). J. Barents, dalam ilmu politika: “ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan bermasyarakat. Dengan negara sebagai bagiannya (*en maatschappelijk leven... waarvan de staat een onderdeel vormt*); ilmu politik mempelajari negara dan bagaimana negara tersebut melakukan tugas serta fungsinya (*de wetenschap der politiek is de wetenschap die het leven van de staat een onderdeel vormt. Aan het onderzoek van die staten, zoals ze werken, is de wetenschap der politiek gewijd*).” (J. Barents, 1965:23)

Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan yang hanya terdapat pada asosiasi atau organisasi lainnya. Umumnya dianggap bahwa setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli, dan sikap mencakup semua.

- a) Sifat memaksa. Agar peraturan perundang-perundangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta timbulnya anarki dicegah, maka memiliki sifat memaksa, dalam arti mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana untuk itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi dan asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan, akan tetapi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat. Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaan ini tidak begitu menonjol; akan tetapi di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat sering kali sifat paksaan ini akan lebih tampak. Dalam hal demikian di negara demokratis tetap didasari bahwa paksaan hendaknya dipakai

seminimal mungkin dan sedapat-dapatnya dipakai persuasi (meyakinkan) lagi pula pemaksaan paksaan secara ketat, selain memerlukan organisasi yang ketat, juga memerlukan biaya yang tinggi. Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warga negara harus membayar pajak dan orang yang menghindari kewajiban ini dapat dikenakan hukuman kurungan.

- b) Sifat monopoli. Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dalam rangka ini negara dapat menyatakan bahwa suatu aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu dilarang hidup dan disebarluaskan, oleh karena dianggap bertentangan dengan tujuan masyarakat. Sifat mencakup semua (*all-encompassing, all-embracing*). Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali. Keadaan demikian memang perlu, sebab kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal pula, menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain di mana keanggotaan bersifat sukarela. Negara terdiri atas beberapa unsur yang dapat diperincikan sebagai berikut: a). *Wilayah*. Setiap negara menduduki tempat tertentu di muka bumi dan mempunyai pembatasan tertentu. Kekuasaan negara mencakup seluruh wilayah, tidak hanya tanah, tetapi juga laut disekelilingnya dan angkasa di atasnya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini masalah wilayah lebih rumit daripada di masa lampau. Sebagai contoh, jika pada masa lampau laut sejauh 3 mil dari pantai (sesuai dengan jarak tembak meriam) dianggap sebagai perairan teritorial yang dikuasai sepenuhnya oleh negara itu, maka peluru-peluru *missile* sekarang membuat 3 mil tidak ada artinya. Oleh karena itu, beberapa negara (termasuk Indonesia) mengusulkan agar perairan teritorial diperlebar menjadi 12 mil. Di samping itu kemajuan

teknologi yang memungkinkan penambangan minyak serta mineral lain dilepas pantai, atau yang dinamakan landas benua (*continental shelf*) telah mendorong sejumlah besar negara untuk menuntut penguasaan atas wilayah yang lebih luas. Wilayah ini diusulkan selebar 200 mil sebagai *economic zone* agar juga mencakup hak menangkap ikan dan kegiatan ekonomi lainnya. Dalam mempelajari wilayah suatu negara perlu diperhatikan beberapa variabel, antara lain besar kecilnya suatu negara. Menurut hukum internasional, berdasarkan prinsip *the sovereign equality of nations*, semua negara sama martabatnya. Sebagai contoh adalah beberapa negara Amerika Latin yang berdekatan dengan Amerika Serikat, dan beberapa negara Eropa Timur yang berdekatan dengan Uni Soviet. Negara-negara kecil selalu berkepentingan untuk memelihara hubungan baik dengan tetangganya, agar kemerdekaan tetap merdeka selama dua perang dunia. Negara kecil lainnya misalnya Monako dan Singapura. Dilain pihak, negara yang luas wilayahnya menghadapi bermacam-macam masalah, apalagi kalau mencakup berbagai suku bangsa, ras, dan agama. Juga faktor geografis, seperti iklim dan sumber alam merupakan variabel yang perlu diperhitungkan. Juga perbatasan merupakan permasalahan; misalnya apakah perbatasan merupakan perbatasan alamiah (laut, sungai, gunung), apakah negara itu tidak mempunyai hubungan dengan laut sama sekali (*land-locked*), atau apakah itu merupakan benua atau nusantara. Indonesia dewasa ini memelopori gagasan 'wawasan Nusantara', bahwa semua perairan pedalaman (*internal waters*), di mana kedaulatan Indonesia berlaku sepenuhnya. Gagasan sedang diperjuangkan dalam forum Internasional.

- c) Penduduk. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Dalam mempelajari soal penduduk ini, perlu diperhatikan faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, tingkat pembangunan, tingkat kecerdasan, homogenitas, dan masalah

nasionalisme. Dalam hubungan antara dua negara yang kira-kira sama tingkat industrinya, negara yang sedikit penduduknya sering lebih lemah kedudukannya daripada negara yang lebih banyak penduduknya. (Prancis terhadap Jerman dalam perang dunia II). Sebaiknya, Negara-negara yang padat penduduknya (India, China) menghadapi persoalan bagaimana menyediakan fasilitas yang cukup sehingga rakyatnya hidup secara layak. Dimasa lampau ada negara yang mempunyai kecendrungan untuk memperluas Negara-nya melalui ekspansi. Dewasa ini cara yang dianggap lebih layak adalah meningkatkan produksi atau menyelenggarakan program keluarga berencana untuk membatasi pertumbuhan penduduk. Dalam memecahkan persoalan semacam ini faktor-faktor seperti tinggi-rendahnya tingkat pendidikan, kebudayaan dan teknologi dengan sendrinya memainkan peranan yang penting. Penduduk dalam suatu negara biasanya menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakan dari negara lainnya. Perbedaan ini nampak misalnya dalam kebudayaannya, nilai-nilai politiknya, atau identitas nasionalnya. Kesamaan dalam sejarah perkembangannya (misalnya selama lebih dari tiga ratus tahun menjadi tanah jajahan), kesamaan bahasa, kesamaan kebudayaan, kesamaan suku bangsa, dan kesamaan agama merupakan faktor-faktor yang mendorong ke arah terbentuknya persatuan nasional dan identitas nasional yang kuat. Akan tetapi perlu dicatat bahwa setiap faktor tersebut di atas juga tidak menutup kemungkinan untuk berkembangnya persatuan yang kokoh. Misalnya saja Swiss mempunyai empat bahasa, India malah mempunyai enam belas bahasa resmi, meski demikian kedua negara tersebut sekarang masih tetap menjaga persatuan penduduknya. Belgia mempunyai dua bahasa dan agama, akan tetapi sampai sekarang berhasil mempertahankan persatuannya. Sebaiknya Inggris dan Amerika Serikat mempunyai bahasa yang sama, akan tetapi merupakan dua bangsa dan negara yang terpisah. Begitu pula Pakistan,

yang didirikan dengan alasan untuk mempersatukan semua daerah India yang mempunyai mayoritas penduduk beragama islam. Akhirnya tahun 1971 terpecah menjadi dua. Hal ini menunjukkan bahwa kesamaan pada dirinya tidak menjamin terpeliharanya persatuan bangsa. Indonesia merupakan contoh dimana bermacam-macam suku bangsa dengan adat istiadat dan agama yang berbeda-beda dapat tetap bersatu.

Kenyataannya dasar dari suatu negara terutama bersifat psikologis, yang dinamakan nasionalisme, nasionalisme merupakan suatu perasaan subyektif pada suatu kelompok manusia bahwa mereka merupakan satu bangsa dan bahwa cita-cita serta aspirasi mereka bersama hanya dapat tercapai jika mereka tergabung dalam satu negara atau nation. Dalam hubungan ini patut disebut ucapan seorang filsuf prancis Ernest Renan: "pemersatu bangsa bukanlah kesamaan bahasa atau suku bangsa, akan tetapi tercapainya hasil gemilang di masa lampau dan keinginan untuk mencapainya lagi di masa depan.". Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam sebuah negara yaitu:

- 1) Pemerintah. Setiap negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang menyangkut bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijakan dalam mengarahkan ke arah tercapainya tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Negara mencakup semua penduduk, sedangkan pemerintah hanya mencakup sebagian kecil daripadanya. Pemerintah sering berubah, sedangkan negara terus bertahan (kecuali kalau dicaplok oleh negara lain). Kekuasaan pemerintah biasanya dibagi atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

- 2) Kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi ini untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturannya (kedaulatan ke dalam-*internal sovereignty*). Di samping itu negara mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan ke luar (*external sovereignty*). Untuk itu negara menuntut loyalitas yang mutlak dari warga negaranya. Kedaulatan merupakan suatu konsep yuridis, dan konsep kedaulatan ini tidak selalu sama dengan komposisi dan letak dari kekuasaan politik. Kedaulatan yang bersifat mutlak sebenarnya tidak ada, sebab pemimpin kenegaraan (raja atau diktator) selalu berpengaruh oleh tekanan-tekanan dan faktor yang membatasi penyelenggaraan kekuasaan secara mutlak. Apalagi kalau menghadapi masalah dalam hubungan internasional, perjanjian-perjanjian internasional pada dasarnya membatasi kedaulatan suatu negara, kedaulatan umumnya tidak dapat dibagi-bagi, tetapi di dalam negara federal sebenarnya kekuasaan dibagi antara negara dan negara-negara bagian.

Pendekatan faktual sering disebut para ahli sebagai penjelasan sekunder (*scondaire staats wording*), yakni pembahasan tentang terjadinya Negara yang dihubungkan dengan Negara-negara yang telah ada sebelumnya. Jadi, yang penting dari pembahasan terjadinya Negara sekunder ini adalah masalah pengakuan atau *erkening*. Adapun pendekatan teoritis diistilahkan oleh banyak ahli Negara dengan penjelasan secara primer (*primaire stats wording*), yakni pembahasan tentang terjadinya Negara yang tidak dihubungkan dengan Negara yang telah ada sebelumnya. Berikut ini akan dijelaskan lebih rinci kedua pendekatan tersebut.

a) Pendekatan Faktual

Sebagaimana disebut di awal, pendekatan faktual sangat menekankan pada kenyataan sejarah. Menunjukkan bahwa suatu Negara dapat dibentuk, antara lain disebabkan oleh:

- 1) Suatu wilayah atau daerah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu bangsa maka daerah itu berubah menjadi suatu Negara. Misalnya, wilayah Liberia yang diduduki oleh budak-budak Negro yang dimerdekakan tahun 1847.
- 2) Suatu wilayah atau daerah yang semula termasuk wilayah Negara tertentu, kemudian melepaskan diri dari Negara itu dan menyatakan kemerdekaannya. Misalnya, Timor-timur pada tahun 1999 melepaskan diri dari Indonesia melalui Referendum dan kini menjadi Negara berdaulat; Singapura pada tahun 1963 melakukan pemisahan dari Federasi Malaya; Belgia pada tahun 1839 melepaskan diri dari Belanda dan menjadi Negara. Pendekatan ini tampaknya lebih menyerupai teori pengalihan hak atau teori *prescriptive theory* atau *prescriptive possession theory*, yakni hak yang diperoleh setelah pihak lain melepas hak atau berlakunya hak itu. Teori ini dipopulerkan oleh Sir Robert Filmer dan Loyseau.
- 3) Beberapa Negara mengadakan peleburan (*fusi*) dan menjadi suatu Negara baru. Misalnya, pembentukan Kerajaan Jerman tahun 1871.
- 4) Suatu Negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah Negara itu timbul Negara-negara baru. Misalnya, tahun 1832 negara Colombia pecah menjadi Negara-negara baru, yaitu Venezuela dan Colombia Baru; 15 negara pecah uni Soviet 1992; Yugoslavia pecah menjadi Negara-negara baru, yaitu Bosnia, Serbia dan Kroasia.

Dengan demikian lenyap atau runtuhnya suatu negara dapat disebabkan oleh *faktor alam dan faktor sosial*. Hilangnya negara karena faktor alam ialah suatu negara yang sebelumnya sudah tercipta atau sudah ada, tetapi dikerenakan faktor alam,

lenyaplah atau hilanglah negara tersebut. Hilangnya negara ini disebabkan karena bencana alam, gunung meletus dan suatu pulau ditelan laut. Adapun faktor sosial, misalnya bisa terjadi karena adanya penaklukan, revolusi (kudeta yang berhasil), perjanjian, penggabungan dan sebagainya).

b) Pendekatan Teoritis

Pendekatan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan kerangka dugaan-dugaan yang logis dalam melihat dan menerangkan asal mula terjadinya suatu Negara. Diantara teori-teori tersebut adalah teori ketuhanan, teori hukum alam, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, teori organisasi, dan teori garis kekeluargaan.

- 1) Teori Ketuhanan. Teori ketuhanan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala kejadian di jagat raya ini terjadi karena kehendak Tuhan. Demikian juga, Negara terbentuk karena kehendak-Nya. Jadi, kekuatan supernatural atau gaib yang menghendaki terbentuknya negara itu. Menurut teori ini, suatu negara tidak atau belum akan terjadi, jika Tuhan belum menghendakinya. Dewasa ini, indikasi masih dianutnya paham dari mteori ini, sekurang-kurangnya dapat dilihat dalam Undang-undang Dasar atau Konstitusi berbagai negara yang mencamtumkan kalimat: "*Dengan Berkat Rahmat Tuhan*" atau *By The Greace Of God*".Di sini, asal usul raja-raja atau kepala negara yang memerintah dan mengelola negara adalah penjelmaan atau bayangan Tuhan di bumi. Misalnya, Mikado di Jepang adalah kaisar yang dianggap sebagaim keturunan Dewa Matahari, Raja Iskandar Dzulkarnaen dinyatakan sebagai putra Zeus Ammon. Bertolak dari anggapan itu, diyakini dan diterimalah bahwa kekuasaan itu sesungguhnya dipindahkan dari Tuhan atau Dewa-dewa kepada manusia sehingga masalahnya tidak dapat dipecahkan secara ilmu pengetahuan oleh manusia biasa. (M. Solly Lubis, 2002:21). Masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh ilmu pengetahuan tentang teori Ketuhanan ini khususnya dalam

hal, bahwa kekuasaan itu hanya dipindahkan oleh Tuhan kepada seorang atau sekelompok kecil orang. *Pertama*, bagaimana jika dalam praktik kenegaraan terjadi perang antara dua kekuasaan dan kalau sepihak kalah, kekuasaan manakah lagi yang diyakini sebagai kekuasaan atau kehendak Tuhan? *Kedua*, bagaimana pula kalau dalam satu negara berdiri lebih dari satu pemegang kekuasaan? Sampai di sini, teori ketuhanan tampak ‘gagap’ dalam menerangkan permasalahan. Permasalahan yang lebih bersifat praktik itu. Karena itu, wajar jika sampai saat ini, teori ini terus mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan akademisi. Di antara penganut teori Ketuhanan yang modern adalah Friedrich Julius Stahl (1802-1861) dan Abu Al A’la Al -Maududi (1903-1979) Stahl menyatakan bahwa “Negara bukan tumbuh disebabkan berkumpulnya kekuatan dari luar, melainkan disebabkan perkembangan dari dalam. Ia tidak tumbuh disebabkan kehendak manusia, melainkan disebabkan kehendak Tuhan.” Sementara Maududi menyatakan bahwa “kekuasaan tertinggi, yang dalam istilah politik disebut *kedaulatan*, terdapat pada Allah, sedangkan umat manusia hanyalah pelaksana kedaulatan Allah sebagai khalifah di muka bumi ini.” (Munawir Sjadzali, 1993:166)

- 2) Teori Hukum Alam. Hukum alam ini tidak bertitik tolak dari negara, tetapi dari manusia, yakni manusia bebas dalam status naturalis. Ini artinya, hukum alam bukan merupakan hukum buatan negara, melainkan hukum yang berlaku menurut keadaan alam. Para penganut teori hukum alam ini menganggap bahwa didalam alam ini ada hukum yang berlaku abadi atau “universal”, yaitu tidak berubah, berlaku dalam setiap waktu dan tempat. Hukum alam menurut Prof. Mr. R. Kranenburg, seperti dikutip Solly Lubis adalah “Manusia secara abstrak, manusia diluar negara, dibuat pangkal permulaan pikiran, mudah untuk dimengerti. Bukankah yang dicari pertumbuhan negara, sehingga mudah dipahami? Manusia diluar ikatan negara, manusia tak terikat, manusia

luar, itulah yang dijadikan pangkal permulaan. Untuk mempelajari dengan baik hukum-hukum yang menguasai pembentukan negara dan hukum. (*il faut considerer un bome avant l'etablissement des societies*-kita harus memandang manusia sebelum terdapatnya masyarakat)." (Solly Lubis, 2001;26). Mengenai teori-teori hukum alam (kodrat) ini, secara lebih luas Prof Mr. Mahadi menguraikan sebagai berikut: Hukum alam disebut juga dengan istilah *ius naturale*. Dalam hal ini, para sarjana terbagi atas dua golongan, yaitu: a). Sarjana yang berpendapat bahwa hukum alam berakar pada agama, b). Sarjana yang berpendapat bahwa hukum alam sebagai hasil pikiran sehat (*ratio*). Sedangkan para penganut hukum alam ini antara lain: *masa kuno* adalah Plato (429 -347 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M), *masa pertengahan* adalah Agustinus (354-430 M), Al-Ghasali (1058-1111 M), Thomas Aquinas (1226-1274 M), dan Ibnu khaldun (1332-1406 M)., dan *masa rasionlisme*, yakni para penganut hukum alam yang berakar pada perjanjian masyarakat, seperti Al-Mawardi (975-1059 M), Hugo de Groot (Grotius, 1583-1645 M), Thomas Hobbes (1588-1679 M), Jhon locke (1632-1704 M), dan J.J. Roesseau (1712-1778 M).

Pandangan hukum alam para tokoh seperti Ibnu Khaldun dan *hugo de Groot*. Berikut ini akan diuraikan dari pandangan keduanya sebagai berikut::

a) *Ibnu Khaldun*

Menurut Ibnu Khooldun, seorang sarjana Muslim, hidup bermasyarakat merupakan keharusan bagi jenis manusia (*al ijtima'u dharuryyun li annnawi al insani*). (Ibnu khaldun, 1999:41), menurut Ibnu khaldun, organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Hal ini telah dinyatakan oleh para filosof sebelumnya bahwa menurut tabiatnya manusia adalah makhluk politik atau makhluk sosial *zoonpoliticon*. Organisasi kemasyarakatan demikian, menurut istilah kaum filosof disebut kota al-madinah (Arab), polis (Latin).

Menurut Ibnu Khaldun, manusia diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk atau keadaan yang hanya memungkinkan hidup dan bertahan dengan bantuan makanan. Adapun kemampuan manusia orang perorang tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya akan makanan. Bukti bahwa manusia secara perseorangan tidak mampu hidup sendiri adalah dalam hal mengerjakan atau menggarap sawah dan ladang. dengan realitas bukti tersebut, Ibnu Khaldun berpandangan bahwa kemampuan manusia seorang diri terbatas, ia harus bekerja sama dengan orang lain. Untuk pengadaan bahan makanan saja diperlukan banyak alat yang terbuat dari besi dan kayu, yang pengadaannya memerlukan keahlian orang lain. Demikian juga, untuk melindungi dari gangguan binatang buas dan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia, diperlukan kerja sama yang baik dan harmonis antar sesama manusia. Di samping merupakan keharusan bagi pemenuhan kebutuhan yang nyata, berorganisasi kemasyarakatan bagi manusia, juga merupakan aturan dan takdir dari Tuhan. artinya, Tuhan memberi tiap-tiap makhluk satu anggota tertentu bagi pertahanan diri mereka dan memperoleh makanan. Kepada manusia, Dia berikan kemampuan berpikir dan dua buah tangan. Dengan kemampuan berpikir, tangan manusia dapat menciptakan berbagai alat untuk keperluan menggarap sawah, ladang, dan menciptakan keahlian-keahlian lain. Kemampuan berpikir dan keterampilan tangan manusia akan menimbulkan perbedaan pandangan, pengetahuan, keahlian, dan bakat di antara mereka, karena itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus tolong menolong satu sama lain. Untuk mewujudkannya diperlukan "organisasi kemasyarakatan" (negara) bagi mereka, yang oleh Ibnu Khaldun disebut bagian utama dari umran (peradaban). (Suyuthi, 2000:43). Dengan demikian teori hukum alam Ibnu Khaldun ini beraliran hukum alam yang berakar pada agama, seperti dua kategori hukum alam yang disampaikan oleh Prof. Mr. Mahadi. artinya Tuhan tetap menjadi sandaran bagi hukum alam.

b) *Hugo de Groot (grotius)*

Hugo de groot adalah sarjana bangsa Belanda. Rangka teorinya tentang hukum alam yaitu: 1). Pada dasarnya manusia mempunyai sifat mau berbuat baik kepada sesama manusia, 2). Manusia mempunyai *appetites societatis* (hasrat kemasyarakatan). Atas dasar *appetites societatis* ini, manusia bersedia mengembangkan jiwa-jiwanya untuk kepentingan orang lain, golongan, dan masyarakat. 3). Mengenai hidup dalam masyarakat, ada empat macam ajaran hukum kodrat yaitu *abstinentia alieni* (hindarkan diri dari milik orang lain), *Obligatio implemdorun promissorum* (pemulihan janji), *Damni culpa dati reparatio* (bayarlah kerugian yang disebabkan kesalahan sendiri), *Poenae inter humines meratum* (berilah hukum yang setimpal). Kemudian hukum alam (*ius naturale*) yang dihasilkan oleh akal manusia, menurut Gotius, adalah : "*Ius naturale is the dictate of right reason, indication that any act, from its agrement with the rational nature has in it morral tupide or moral necessity*-maksudnya hukum kodrat dicatat akail manusia yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan adalah buruk aytau baik berhubungan dengan sesuai tidaknya perbuatan itu dengan *rasional nature* akal manusia, dengan kata lain , suatu perbuatan sendirinya buruk atau baik tanpa larangan ataupun suruhan. "Juga pendapat Grotius, hukuk kodrat adalah absolut. "*Ius naturaleis absolutely immutabl, so that it can not be chaged by God bim self*" (hukum kodrat itu demikian mutlak sehingga dia tidak bisa diubah oleh Tuhan, Grotius mengganti dengan *rational nature* yang menentukan buruk dan baik.

Jika memakai kategori prof. Mr. Mahdi, teoi hukum alam Grotius ini ccenderung pada aliran hukum alam sebagai hasil pikiran sehat (rasional). Teori ini mengingkari hukum kodrat berasal dari Tuhan. Teori ini lebih dalam menguraikan hukum alam berdasarkan pikiran logis atau secara falsafah sebagai berikut:

1) Teori Kekuasaan

Penggalan kalimat "*Raja yang pertama adaalah prajurit yagn berhasil*" dibuat oleh Voltaire (1694-1778) untuk menggambarkan bahwa negara itu terbentuk tidak lain karena kekuatan atau kekuasaan. Pendapat yang sama sebenarnya sudah ada sejak zaman kuno. Kallikles, misalnya, kurang lebih berpendapat seperti itu, yakni bila orang-orang yang lebih baik telah memperoleh kekuasaan yang lebih besar daripada orang-orang yang kurang baik, disitulah keadilan, begitu juga orang yang lebih lemah. Sering terbukti bahwa hal tersebut terdapat manusia maupun makhluk lain, bahkan pada negara-negara bahwa yang kuat senantiasa memerintah (menguasai) yang lemah. Bertalian dengan itu, Karl Marx juga mengajarkan bahwa negara adalah hasil pertarungan antara kekuatan-kekuatan ekonomis dan negara merupakan alat pemeras bagi mereka yang lebih kuat terhadap yang lemah, dan negara itu akan lenyap kalau perbedaan kelas itu tak ada lagi. Intinya, Marx berpendapat bahwa negara itu timbul karena kekuasaan, Marx berpendirian bahwa sebelum ada negara di dunia ini telah ada masyarakat komunis purba. Buktinya, pada masa itu menurut Marx, belum dikenal hak milik pribadi sehingga semua alat produksi menjadi milik masyarakat. Menurut Marx bahwa lahirnya negara untuk yang pertama kali adalah bersamaan dengan munculnya hak milik pribadi. Adanya hak milik pribadi menyebabkan masyarakat terpecah menjadi dua kelas yang saling bertentangan, yakni kelas pemilik alat-alat produksi dan kelas bukan pemilik alat-alat produksi. Kelas pemilik alat-alat produksi, atau populer disebut kelas borjuis, merasa tidak nyaman dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya dalam bidang ekonomi. Mereka memerlukan suatu organisasi pemaksa yang disebut negara, yaitu untuk mempertahankan pola produksi yang memberikan kedudukan istimewa kepadanya untuk melanggengkan atas alat-alat produksi tersebut.

Pendirian Marx kemudian diikuti oleh Harold J. Laski. Ia berpandangan bahwa setiap pergaulan hidup memerlukan organisasi pemaksa (*coercive instrument*) untuk menjamin kelanjutan

produksi yang tetap. Kalau tidak, pergaulan hidup tidak akan menjamin nafkahnya. Dalam pada itu, George Jellinek menyatakan negara adalah kesatuan yang dilengkapi dengan "*berrschen-macht*", yakni kuasa memerintah bagi orang-orang yang diam di dalamnya, dan bahwa memerintah (*berrsehen*), menurut Jellinek, ialah mampu melaksanakan kemauan sendiri terhadap orang lain. Bertitik tolak dari ajaran dan pandangan di atas, teori kekuasaan adalah teori yang menyatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan atas kekuasaan. Dari sini, kita bisa tahu bahwa orang kuatlah yang pertama-tama mendirikan negara, karena dengan kekuatannya itu, ia mampu melaksanakan kehendaknya terhadap orang lain.

2) Teori perjanjian masyarakat

Teori perjanjian masyarakat bertitik tolak pada anggapan bahwa sebelum ada negara, manusia hidup sendiri-sendiri, dan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Saat itu, belum ada masyarakat dan belum ada peraturan apapun juga, sehingga kehidupan masyarakat sangat kacau. Dalam keadaan demikian, manusia dengan anugerah akal yang dimilikinya melakukan perkumpulan untuk membentuk sebuah pemufakatan bersama dalam rangka memelihara keselamatan hidup dan pemilikan harta. Pemufakatan itu sering disebut dengan "perjanjian masyarakat" (*Contact Social*) salah satu pemufakatan bersama itu adalah pendirian "Organisasi Kekuasaan Bersama", yakni sebuah negara. Perjanjian antar kelompok masyarakat atau manusia yang melahirkan negara disebut *pactum unionis*. Sementara perjanjian antara kelompok masyarakat dengan penguasa yang diangkat dalam perjanjian pertama, *pactum unionis* disebut *pactum subjectionis*. Isi *pactum subjectionis* adalah pernyataan manusia untuk menyerahkan hak-haknya (hak-hak yang diberikan alam) kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya.

Dengan demikian, pemufakatan atau perjanjian tersebut melahirkan sejumlah hak dan kewajiban antara individu dan kelompok individu (masyarakat) dengan negara disatu sisi, dan

antara individu atau kelompok individu disisi lain. Berkaitan dengan sejumlah hak yang dilahirkan dari pemufakatan, terdapat sejumlah pandangan yang bervariasi. Variasi pandangan terutama terletak pada persoalan bagaimana hak yang diperoleh individu-individu atau masyarakat yang melakukan perjanjian? Dan juga bagaimana hak-hak yang dimiliki negara sebagai organisasi kekuasaan yang dimiliki negara sebagai organisasi kekuasaan yang dilahirkan dari sebuah perjanjian?. Thomas Hobbes adalah tokoh utama yang menekankan hal "*pactum subjektionis*", bahwa dengan kesepakatan membentuk negara, rakyat menyerahkan semua hak mereka secara alamian (sebelum adanya negara), untuk diatur sepenuhnya oleh kekuasaan negara. Hak yang sudah diserahkan itu, menurut Hobbes, tidak bisa ditarik kembali. Dengan demikian, menurut Hobbes, negara itu seharusnya berbentuk kerajaan mutlak atau monarki *absolut*. (Teuku May Rudy, 1993:27). Adanya konteks peristiwa politik yang melatari Thomas Hobbes dalam menyusun teorinya, yakni ketika di Inggris sedang terjadi pertentangan yang sengit antara Raja Charles I dengan parlemen. Dalam pertentangan itu, Hobbes cenderung berpihak kepada raja. Lalu, teorinya itu digunakan untuk memperkuat kedudukan raja. Oleh karena itu, ia hanya mengakui suatu *pactum* saja, yaitu *pactum subjektionis*. Berbeda dengan Hobbes, John Locke justru mengakui kedua *pactum*, "*pactum unionis*" dan "*pactum subjectionis*". Bahwa sebagian besar (mayoritas) anggota suatu masyarakat membentuk persatuan (*union*) dahulu, kemudian anggota masyarakat menjadi kawula (subjek) negara. Di sini negara tidak berkuasa secara *absolut* (mutlak), seperti pendapat Hobbes. Tetap ada bagian yang berada pada masing-masing orang, yaitu hak asasi. Sama halnya dengan Hobbes, pernyataan Locke juga dilatari konteks peristiwa politik yang terjadi, yakni bertepatan dengan muncul dan berkembangnya kaum borjuis atau kelas menengah di Eropa. Mereka menghendaki perlindungan dari penguasa negara atas diri dan kepentingannya dari rongrongan kaum buruh atau proletarin. Dengan konteks itulah, Locke mendalihkan dalam *pactum*

subjectionis, tidak semua hak manusia diserahkan kepada raja, tetapi ada beberapa hak tertentu yang diberikan oleh alam yang tetap melekat padanya. Hak yang tidak diserahkan itu adalah hak asasi manusia, yang terdiri dari hak hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Hak Asasi Manusia inilah yang harus dilindungi oleh negara yang dijamani dalam Undang-Undang Dasar. Dengan demikian menurut Locke negara itu seharusnya berbentuk kerajaan yang berundang-undang dasar atau *monarchi konstitusional*. Karena terotinya itu, Jhon Lockey dianggap sebagai bapak hak asasi manusia (HAM). J. Rosseau menulis bahwa hanya ada "*pastum unionis*". Yaitu suatu perjanjian atau kesepakatan untuk membentuk negara, tetapi bukan sekaligus berarti menyerahkan hak, masing-masing orang untuk diatur oleh negara justru rakyat yang memilih wakil-wakilnya serta menyusun aparatur pemerintah. Selanjutnya, Rosseau menyatakan bahwa negara yang dibentuk oleh perjanjian oleh masyarakat itu harus menjamin kebebasan dan persamaan. Penguasa hanya sebagai wakil rakyat yang dibentuk berdasarkan kehendak rakyat ("*polonte general*") jika tidak mampu menjamin kebebasan dan persamaan penguasa itu dapat diganti. Itulah sebabnya, Rosseau dianggap sebagai peletak dasar arti kedaulatan rakyat.

3) Teori Organisme

Teori organisme menyatakan bahwa negara adalah suatu organisme. Teori ini sama dengan konsep biologis yang melukiskan negara dengan istilah-istilah ilmu alam. Misalnya, terbentuk dan lahirnya sama seperti (dianalogikan) kelahiran makhluk hidup lainnya. Jika ada embrionya, perlahan-lahan embrio tersebut berkembang menjadi negara. Negara tumbuh sebagai hasil dari suatu evolusi seperti tumbuhnya makhluk lain seperti manusia, hewan, dan tumbuhan misalnya negara bermula dari pola kerjasama antar organisasi sederhana, kemudian meningkat secara bertahap kedalam bentuk yang lengkap dan jelas dalam tahap terakhir inilah lahirlah suatu negara. Teori ini selain sebagai teori mengenai asal mula atau dasar terbentuknya negara, juga

sebagai teori hakikat negara. (F. Iswara, 1982:156). Diantara tokoh yang menganut dan mengembangkan teori ini adalah George Wilhelm Hegel, J.K. Bruntscli; Jhon Salis Buri; Marsiklio Padua; Pfufendor; Hendrich Ahrens; J.W. Scelling; dan F.J. Schittenner.

4) Teori garis kekeluargaan (*patriarkhal, matriarkhal*)

Teori ini menerangkan bahwa negara dapat terbentuk dari perkembangan suatu keluarga yang menjadi besar kemudian bersatu membentuk negara. Adakalanya garis kekeluargaan berdasarkan garis ayah (*patriarkhala*), dan adakalanya garis ibu (*matriarkhal*), teori ini juga disebut sebagai *teori perkembangan suku*. Orang yang mempunyai hubungan darah (kekeluargaan) berkembang menjadi suatu suku (*tribe*), lalu berkembang lagi membentuk suatu negara.

B. Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Sarjana yang melihat kekuasaan inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebut dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Pendekatan ini, yang banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkupnya dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis dari pada pendekatan institusional karena memperhatikan proses. Berikut ini adalah beberapa definisi:

Harold D, Laswell dan A. Kaplan dalam *power and society*: “ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan”. W. A. Robson, dalam *the university teaching of social sciences*, mengatakan: “ilmu politik mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, yaitu sifat hakiki, dasar, proses-proses, ruang ling-

kup, dan hasil-hasil. Fokus perhatian seorang sarjana ilmu politik. Tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu (*political science is concerned with the study of power in a society.... Its nature, basis, processes, scope and result. The focus of interest of the political scientist.... Centres on the struggle to gain or retain power, to exercise power or influence over others, or to resist that exercise*). W. A. Robson, 1954:24)

Deliar Noer dalam *pengantar pemikiran ke pemikiran politik* menyebutkan: “ilmu politik memusatkan perhatian pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Kehidupan seperti ini tidak terbatas pada bidang hukum semata-mata, dan tidak pula pada negara yang tumbuhnya dalam sejarah hidup manusia relatif baru. Di luar bidang hukum serta sebelum negara ada, masalah kekuasaan itu pun telah ada pula ada. Hanya dalam zaman modern inilah memang kekuasaan itu berhubung erat dengan negara.”(Deliar Noer,1965:56)

Kekuasaan adalah kemampuan untuk bertindak atau memerintah sehingga dapat menyebabkan orang lain bertindak, pengertian di sini harus meliputi kemampuan untuk membuat keputusan mempengaruhi orang lain dan mengatasi pelaksanaan keputusan itu. Biasanya dibedakan antara kekuasaan yang berarti dalam kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sehingga dapat menyebabkan orang lain tersebut bertindak dan wewenang yang berarti hak untuk memerintah orang lain. Kekuasaan dapat didefinisikan sebagai suatu potensi pengaruh dari seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi serta ketrampilan dalam menentukan macam kekuasaan yang tepat untuk merespon tuntutan situasi. Menurut Gary A Yukl (1989) adalah potensi agen untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang lain (*target person*), sementara David dan Newstroom (1989) membedakan kekuasaan dan kewenangan, kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sedangkan wewenang merupakan

pendelegasian dari manajemen yang lebih tinggi. Jadi dapat disimpulkan, kekuasaan atau power berarti suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang atau merubah orang atau situasi. Melaksanakan kekuasaan (*power*) menuju jalan sukses sangat bergantung kepada yang disebut dengan kekuasaan yang sah, mekanisme sistem informasi, dan partisipasi aktif dari bawahan.

Oleh karena itu, wewenang memberi kekuatan dan bila salah mengaktualisasikan dapat merusak karena sifat mementingkan diri sendiri diperluas dengan wewenang. Jadi penggunaan wewenang adalah soal kepercayaan. Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juta manusia. Oleh karena itu, kekuasaan (*power*) sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Adanya kekuasaan merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Mengenai pengaruh tersebut, lazimnya diadakan perbedaan, yaitu pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif dan pengaruh tergantung atau tidak bebas menjadi aktif. Pihak yang berpengaruh membantu pihak yang dipengaruhi untuk mencapai tujuannya. Pihak yang berpengaruh mempunyai pengaruh di dalam kemampuan.

Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antara kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu rasa takut, rasa cinta, kepercayaan, dan pemujaan. Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaannya melalui saluran-saluran yaitu; saluran militer, saluran ekonomi, saluran politik, saluran tradisional, dan saluran ideologi.

French dan Raven (Gary A Yukl, 1994) mengidentifikasi ada lima bentuk kekuasaan yang dirasakan mungkin dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu: a). Kekuasaan ganjaran (*Reward Power*) yang merupakan suatu kekuasaan yang didasarkan atas pem-

berian harapan, pujian, penghargaan atau pendapatan bagi terpenuhinya permintaan seseorang pemimpin terhadap bawahannya, b). Kekuasaan paksaan (*Coercive Power*): yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas rasa takut, seorang pengikut merasa bahwa kegagalan memenuhi permintaan seorang pemimpin dapat menyebabkan dijatuhkannya sesuatu bentuk hukuman, c). Kekuasaan legal (*Legitimate Power*): yaitu suatu kekuasaan yang diperoleh secara sah karena posisi seseorang dalam kelompok atau hirarki keorganisasian, d). Kekuasaan keahlian (*Expert Power*); yaitu kekuasaan yang didasarkan atas ketrampilan khusus, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin dimana para pengikutnya menganggap bahwa orang itu mempunyai keahlian yang relevan dan yakin keahliannya itu melebihi keahlian mereka sendiri. e). Kekuasaan acuan (*Referent Power*); yaitu suatu kekuasaan yang didasarkan atas daya tarik seseorang, seorang pemimpin dikagumi oleh para pengikutnya karena memiliki suatu ciri khas, bentuk kekuasaan ini secara populer dinamakan kharisma. Pemimpin yang memiliki daya kharisma yang tinggi dapat meningkatkan semangat dan menarik pengikutnya untuk melakukan sesuatu, pemimpin yang demikian tidak hanya diterima secara mutlak namun diikuti sepenuhnya.

Boulding mengatakan ada 3 jenis kekuasaan dalam mempertahankan organisasi, yaitu: 1). Kekuasaan destruktif adalah kekuasaan yang berpotensi untuk menghancurkan dan mengancam, 2). Kekuasaan produktif atau menghasilkan bersifat ekonomik dan meliputi kekuasaan untuk menghasilkan dan menjual, dan 3). Kekuasaan integrative berarti mendorong kesetiaan, menyatukan orang bersamadan mampu menggerakkan orang ke arah tujuan bersama. Menurut Boulding kekuasaan integratif adalah bentuk kekuasaan yang paling dominan.

1. Cara mempertahankan kekuasaan

Ada beberapa cara mempertahankan kekuasaan yaitu dengan jalan menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama terutama dalam bidang politik, mengadakan sistem-sistem

kepercayaan (*belief-systems*) yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya, pelaksanaan administrasi dan birokrasi yang baik., dan mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal. Ada beberapa sumber kekuasaan yaitu; a). Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan. Kekuasaan yang bersumber pada kedudukan terbagi ke dalam beberapa jenis; 1). Kekuasaan formal atau legal, termasuk dalam jenis ini adalah komandan tentara, kepala dinas, presiden atau perdana menteri, dan sebagainya yang mendapat kekuasaannya karena ditunjuk dan/atau diperkuat dengan peraturan atau perundangan yang resmi, 2). Kendali atas sumber dan ganjaran, majikan yang menggaji karyawannya, pemilik sawah yang mengupah buruhnya, kepala suku atau kepala kantor yang dapat memberi ganjaran kepada anggota atau bawahannya, dan sebagainya, memimpin berdasarkan sumber kekuasaan jenis ini, 3). Kendali atas hukuman, ganjaran biasanya terkait dengan hukuman sehingga kendali atas ganjaran biasanya juga terkait dengan kendali atas hukuman. Walaupun demikian, ada kepemimpinan yang sumbernya hanya kendali atas hukuman saja. Kepemimpinan jenis ini adalah kepemimpinan yang berdasarkan atas rasa takut. Contohnya, preman-preman yang memunguti pajak dari pemilik-pemilik toko. Para pemilik toko mau saja menuruti kehendak para preman itu karena takut mendapat perlakuan kasar. Demikian pula anak kelas 1 SMP takut kepada seniornya murid kelas 3 yang galak dan suka memukul sehingga kehendak senior itu selalu dituruti, 4). Kendali atas informasi, informasi adalah ganjaran positif juga bagi yang memerlukannya. Oleh karena itu, siapa yang menguasai informasi dapat menjadi pemimpin. Orang yang paling tahu jalan di antara serombongan pendaki gunung yang tersesat akan menjadi pemimpin rombongan itu. Ulama akan menjadi pemimpin dalam agama. Ilmuwan menjadi pemimpin dalam ilmu pengetahuan. Murid yang selalu punya bocoran soal ulangan juga dianggap sebagai pemimpin oleh kawan-kawannya setiap menjelang ulangan umum, 5). Kendali ekologis, sumber kekuasaan ini juga dinamakan perekrayasaan situasi (*situational engineering*).

Cotohnya, kendali atau penempatan jabatan. Seorang atasan, manajer atau kepala bagian personalia, misalnya mempunyai kekuasaan atas bawahannya kerana ia boleh menentukan posisi anggota-anggotanya. Demikian pula komandan atau kepala suku yang berhak menentukan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bawahan dan anggotanya. Orang-orang ini akan dianggap sebagai pemimpin. Contoh lain adalah kendali atas tata lingkungan. Kepala dinas tata kota berhak memberi izin bangunan. Kepala asrama menentukan seorang siswa harus tidur di kamar mana dan dengan siapa. b). Kekuasaan yang bersumber pada kepribadian. Berbeda dari kepemimpinan yang bersumber pada kekuasaan karena kedudukan, kepemimpinan yang bersumber pada kekuasaan karena kepribadian berawal dari sifat-sifat pribadi, yaitu sebagai berikut; 1). Keahlian atau keterampilan, dalam salat berjamaah dalam agama islam, yang dijadikan pemimpin salat (imam) adalah yang paling fasih membaca ayat Alquran. Di sebuah kapal atau pesawat udara, mualim atau penerbang yang paling terampilah yang dijadikan nahkoda atau kapten. Pasien-pasien di rumah sakit menganggap dokter sebagai pemimpin atau panutan karena dokterlah yang dianggap paling ahli untuk menyembuhkan penyakitnya, 2). Persahabatan atau kesetiaan, sifat dapat bergaul, setia kawan atau setia kepada kelompok dapat merupakan sumber kekuasaan sehingga seseorang dianggap sebagai pemimpin. Ibu-ibu ketua kelompok arisan, misalnya, dipilih karena sifat-sifat pribadi jenis ini, 3). Kharisma, ciri kepribadian yang menyebabkan timbulnya kewibawaan pribadi dari pemimpin juga merupakan salah satu sumber kekuasaan dalam proses kepemimpinan. c). Kekuasaan yang bersumber pada politik. Selanjutnya, kekuasaan yang bersumber pada politik terdiri dari beberapa jenis yaitu: 1). Kendali atas proses pembuatan keputusan, dalam organisasi, ketua menentukan apakah suatu keputusan akan dibuat dan dilaksanakan atau tidak. Hakim memimpin sidang pengadilan karena ia mempunyai kendali atas jalannya sidang dan putusan atau vonis yang akan dijatuhkan. Kepemimpinan seorang presiden juga

bersumber pada kekuasaan politik karena sebuah undang-undang yang sudah disetujui parlemen baru berlaku jika sudah mendapat tanda tangannya, 2). Koalisi, kepemimpinan atas dasar sumber kekuasaan politik ditentukan juga atas hak atau kewenangan untuk membuat kerja sama dengan kelompok lain. Pemilik perusahaan berhak melakukan merger dengan perusahaan lain. Kepala suku Indian mengisap pipa perdamaian dengan kepala suku lainnya. Presiden menyatakan perang atau damai dengan negara lain, 3). Partisipasi, pemimpin mengatur partisipasi anggotanya, siapa yang boleh berpartisipasi, dalam bentuk apa tiap anggota itu berpartisipasi, dan sebagainya, 4). Institusionalisasi, pemimpin agama menikahkan pasangan suami-istri, menentukan terbentuknya keluarga baru. Notaris atau hakim menetapkan berdirinya suatu yayasan atau perusahaan baru. Lurah mengesahkan berdirinya LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa).

Ossip K. Fletchteim dalam *fundamental of political science* menegaskan: “ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-gejala kekuasaan lain yang tidak resmi yang dapat mempengaruhi negara (*political science is that specialized social science that studies the nature and purpose of the state so far as it a power organization and the nature and purpose of other unofficial power phenomena that are apt to influence the state*). (Ossip K. fletchteim, 1952:17). Fletcteim juga menekankan bahwa kekuasaan politik dan tujuan politik saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain.

2. Pengambilan Keputusan

Keputusan (*decision*) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan

masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu. Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternatif yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Misalnya jika Indonesia memutuskan untuk memberi prioritas kepada pengembangan pertanian (seperti dalam pelita I), maka hal ini merupakan suatu keputusan yang diambil sesudah mempelajari beberapa alternatif lain misalnya memprioritaskan pendidikan atau memprioritaskan industri. Aspek di atas juga banyak menyangkut soal pembagian (*distribution*) yang oleh Harold D. Laswell dirumuskan sebagai *who gets what, when and how*. Joyce Mitchell, dalam bukunya *political analysis and public policy* mengatakan: "politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya (*politics is collective decision making or the making of public policies for an entire society*)." (Joyce M. Mitchell, 1969:4-5).

Karl W. Deutsch berpendapat: politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum (*politics is the making of decisions by public means*). (Karl W. Deutsch, 1972:3). Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan semacam ini berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau sektor publik (*public sector*) dari suatu negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai (*public goods*), yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa. Dalam arti ini politik terutama menyangkut kegiatan pemerintah. Oleh Deutsch dan kawan-kawan negara dianggap sebagai kapal, sedangkan pemerintah bertindak sebagai nahkodanya. Pendekatan ini berdasarkan cybernetika (*cybernetics*), yaitu ilmu komunikasi dan pengendalian (*control*)

3. Kebijakan Umum (*public policy, beleid*)

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha

memilih dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Para sarjana menekankan aspek kebijakan umum (*public policy, beleid*) menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan (*policies*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah. Berikut ini adalah beberapa definisi: Hoogerwerf: obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Yang dimaksud dengan kebijakan umum (*public policy*) di sini menurut Hoogewerf ialah, membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan (*doelbewuste vormgeving aan de samenleving door middel van matchtsuitoefening*) (A. Hoogerwerf, 1972:38-39).

David Easton : ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study of the making of public policy*). David Easton dalam buku *the political system* menyatakan, kehidupan politik mencakup bermacam-macam kegiatan yang memengaruhi kebijakan dari pihak yang berwenang, yang diterima untuk suatu masyarakat, dan yang memengaruhi cara untuk melaksanakan kebijakan itu. Kita berpartisipasi dalam kehidupan politik jika aktivitas kita ada hubungannya dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan untuk suatu masyarakat (*political life concerns all those varieties of activity that influence significantly the kind of authoritative policy adopted for a society and the way it is put into practice. We are said to be participating in political life when our activity relates in some way to the making and execution of policy for a society*)

4. Pembagian (*distribution*) atau Alokasi

Pembagian (*distribution*) dan alokasi (*allocation*) ialah pembagian dan penjabatan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Sarjana menekankan pembagian dan alokasi beranggapan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh

mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan kekuasaan dan kebijakan pemerintah. Dalam ilmu sosial, suatu nilai (*value*) adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian (*judgement*) atau sesuatu asas seperti misalnya kejujuran, kebebasan berpendapat dan kebebasan mimbar. Nilai juga bisa bersifat konkret (*material*) seperti rumah, kekayaan, dan sebagainya. (Harold D. Laswell, 1959).

Harold D. Laswell dalam buku *who gets what, when, how* mengatakan: “politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana.” David Easton, dalam *A. system analysis of political life*, mengatakan: “sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif (berdasarkan wewenang) untuk dan atas nama masyarakat (*a political system can be designated as those interaction through which values are authoritatively allocated for a society*)” (David Easton, 1965:21).

C. Tujuan dan Tugas Negara

1. Tujuan Negara

Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap Negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Apa yang menjadi tujuan bagi suatu Negara, ke arah mana suatu organisasi Negara ditujukan merupakan masalah penting sebab tujuan inilah yang akan menjadi pedoman betapa Negara disusun dan dikendalikan dan bagaimana kehidupan rakyat diatur sesuai dengan tujuan itu. Tujuan Negara di sini dapat diartikan juga sebagai visi Negara. Secara umum, tujuan terakhir setiap Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*) tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya dapat disederhanakan dalam dua hal pokok, yaitu keamanan dan

keselamatan (*security and safety*), dan kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*). Namun, praktik pengejawantahannya di lapangan sangat beragam. jika dijabarkan lebih lanjut dapat lebih dari dua tujuan seperti yang akan diuraikan pada bagian ini. Berkaitan dengan beragamnya praktik pengejawantahan dan meluasnya tujuan Negara terdapat sejumlah teori yang berpariasi dalam menjelaskannya. Hal tersebut tak lepas dari adanya perbedaan konteks sudut pandang, dan titik tolak para ahli dalam melihat tujuan Negara. Di antara teori tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Teori kekuasaan Negara (*Lord Shang*). Salah satu tokoh yang meletakkan dasar pemikiran bagi teori kekuasaan Negara adalah Shang Yang. Ia hidup pada abad ke-5 atau abad ke-4 SM (523-428 S.M.).ia merupakan tuan tanah di daerah Shang. Itulah sebabnya, ia kini dikenal, khususnya di barat, dengan sebutan Lord Shang. Semasa Lord Sang masih hidup, pemerintahan Cina (Tiongkok) saat ini sedang dilanda kekacauan besar, penuh kerusuhan, kekuasaan pemerintah makin melemah, dan daerah-daerah diperintah oleh gubernur-gubernur yang tidak mau tunduk pemerintah pusat. Kaum bangsawan menjadi merdeka dan bertindak selaku raja kecil yang berdaulat. Bertitik tolak dari kenyataan yang memprihatinkan itu, Shang Yang mendambakan terbentuknya suatu pemerintahan pusat yang kuat kehendak itulah yang telah melahirkan teori tentang tujuan Negara. Lord Shang mengemukakan bahwa di dalam setiap Negara terdapat subjek yang selalu berhadapan dan bertentangan, yaitu pemerintah dan rakyat. Apabila yang satunya kuat, yang lainnya tentu lemah. Lord Shang lebih memilih pihak pemerintah kalah yang harus lebih kuat daripada pihak rakyat, supaya tidak terjadi kekacauan dan anarkis. Karena itu, menurut Lord Shang, pemerintah harus selalu berusaha untuk lebih kuat daripada rakyat, dalam hal ini Shang berkata: "*A weak people means a strong state and a strong state means a weak people. Therefore a country, which has the right way, has the right way, is concerned with weaking peo-*

ple (rakyat lemah berarti Negara kuat berarti rakyat lemah. Dengan demikian, Negara yang mempunyai tujuan yang betul, hendaklah bertindak melemahkan rakyat)". Dalam hal ini, Lord Shang menganjurkan supaya dikumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya bagi pihak Negara. Tujuan ini baru bisa dicapai, dengan menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin tidak mewah, dan bersedia menghadapi segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun dari luar Negara. Thesis Shang Yang tentang teori kekuasaan Negara tersebut didasarkan pada asumsinya bahwa kebudayaan merugikan Negara. Karena itu, "Jika dalam Negara terdapat sepuluh macam kemerosotan (*ten evils*), atau jika dalam suatu Negara terdapat sepuluh hal berikut : *rites* (adat); *music* (musik); nyanyian (*odes*); riwayat (*history*); kebaikan (*virtue*); kesusilaan (*moral culture*); hormat pada orang tua (*filial ficty*); kewajiban persaudaraan (*brotherly duty*); integritas (*integrity*); dan kejujuran (*sophistry*), raja tidak akan dapat mengerahkan tenaga rakyat dan tamatlah riwayat raja dan Negara itu." Ini artinya, apabila dalam suatu Negara tidak terdapat sepuluh macam kemerosotan (*ten evils*), raja akan dapat mengendalikan rakyatnya, sehingga Negara akan menjadi kuat. Intinya menurut Shang Yang, korbankanlah kebudayaan rakyat untuk kepentingan kekuasaan Negara. Dalam sejarah, ajaran Shang Yang ini sekurang-kurangnya telah dianut dan dilaksanakan dengan gemilang, antara lain oleh Atila; Jengis Khan, dan Timur Lhenk.

- b) Teori Pemeliharaan Agama dan Kesejahteraan Rakyat (*Juris Sunni*). Teori pemeliharaan agama dan kesejahteraan rakyat ini dianut dan dijalankan oleh para juris sunni dalam doktrin islam. Instrument utama dalam melihat dan menerangkan tujuan Negara adalah pemerintahan yang mengelola Negara. Dalam kerangka ini, diketahui bahwa pembentukan khalifah atau pemerintahan dalam suatu Negara bertujuan sebagai pengganti tugas kenabian yang mengatur kehidupan dan urusan umat untuk rakyat, baik keduniaan maupun keaga-

maan. Bertolak dari kerangka demikian, para juris Sunni lebih melihat bahwa tujuan negara adalah memelihara agama dan umat atau rakyat. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori ini adalah Al-Mawardi (975-1059). Ia menyatakan bahwa Negara melalui lembaga imamah mempunyai tujuan umum yaitu; a). Mempertahankan dan memelihara agama menurut prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma oleh kaum salaf (generasi pertama ummat manusia), b). Memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, c). Melaksanakan kepastian hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiaya dan yang dianiaya, d). Melindungi wilayah islam dan memelihara kehormatan rakyat agar mereka aman dan bebas baik jiwa maupun harta, e). Jihad terhadap orang-orang yang mentang islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi islam, f). Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh, g). Memungut pajak dan sedekah menurut ketentuan syara' nash dan ijtihaad, h). Mengatur penggunaan harta baitul mall secara efektif, i). Meminta nasihat dan pandangan dari orang-orang yang terpercaya, j). Dalam memelihara agama dan rakyat pemerintah dan kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya. Pandangan yang hampir sama mengenai teori tujuan Negara ini juga disampaikan oleh Al-Ghazali (1058-1111) ia berpendapat bahwa tujuan suatu Negara yang didalamnya terdapat lembaga pemerintahan adalah melaksanakan syariat agama, mewujudkan kemaslahatan rakyat, dan menjadi ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Masih dalam hubungannya dengan teori tujuan Negara, Ibnu Taimiyah (1262-1328) menyatakan bahwa tujuan Negara adalah; melaksanakan syariat islam, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, penegakkan keadilan dan amanah dalam pergaulan masyarakat dimensi itulah yang ditekankan oleh Ibnu Taimiyah tentang tujuan Negara. Ia mengatakan bahwa tanpa kekuasaan Negara yang bersifat

memaksa, agama berada dalam bahaya, dan tanpa adanya disiplin agama, Negara pasti menjadi negara tiranik.

- c) Teori Kebesaran dan Kehormatan Negara (*Niccolo Machiavelli*). Dalam batas-batas tertentu, teori kebebasan dan kehormatan negara sangat mirip dengan teori kekuasaan negara Lord Shang. Niccolo Machiavelli adalah salah satu tokoh sandaran dalam teori ini. Kemiripan ini difasilitasi, salah satunya, karena adanya kesamaan konteks keadaan negara. Italia pada zaman Machiavelli dengan keadaan Negara Cina pada semasa hidup Sang Yang. Sebagaimana digambarkan sekilas pada bagian pendahuluan buku ini, Italia pada saat Machiavelli hidup tengah dilanda perpecahan atau disintegrasi politik dan kekacauan sosial. Pertentangan politik yang berkepanjangan dan praktik korupsi yang merajalela telah melemahkan Negara. Situasi itupun, langsung atau tidak langsung, telah mengundang campur Negara-negara asing untuk memperebutkan Italia dan menjadikan Negara itu sebagai kancah perang mereka. Pertentangan-pertentangan dalam dan gangguan-gangguan dari luar itu mengakibatkan tak adanya stabilitas politik dan keajegan sosial di Italia, sedangkan raja-raja maupun Paus tak berkemampuan menyatukan Italia ke arah suatu perwujudan Negara. Kala itu terjadi pergantian atau peralihan kekuasaan dari Lorenzo De Medici. Pergantian itu didorong oleh meniggalnya Lorenzo pada tahun 1492. Dua tahun kemudian, Pierre dibuang ke luar negeri oleh tentara Prancis yang berhasil merebut Florence maka muncullah Dominican Savonarela yang terkenal sangat cerdas dan pintar. Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, ia dihukum bakar sampai mati pada tahun 1498. Beberapa bulan setelah peristiwa itu, Machiavelli diangkat menjadi sekretaris pada Dewan Mahkamah Tinggi, Kedua di Republik Florence. Pada jabatan ini, Machiavelli menjalankan karirnya selama 13 tahun sebagai ahli sejarah, penasihat militer, dan diplomat. Dia sering mewakili Florence ke luar negeri sebagai ketua misi, sampai dia dibuang ke luar

Florence oleh penguasa baru sebagai tahanan pada tahun 1512. Berangkat dari kenyataan itulah, pada tahun 1513, Machiavelli menyusun sebuah buku yang berjudul *Il Principe* atau *Sang Pangeran* buku ini diperuntukan oleh Machiavelli sebagai tuntunan atau “buku saku” bagi para pangeran atau raja dalam mengelola Negara. Buku ini menyarankan seorang raja dalam menjalankan pemerintahannya untuk mengabaikan kesusilaan dan agama. Bila perlu, raja harus licik dan tidak perlu menepati janji. Dan sebaiknya raja harus ditakuti oleh rakyatnya. Di samping kemiripan, kedua teori tujuan Negara tersebut juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan jika teori Shang Yang hanya sampai pada tujuan memperbesar dan menggunakan kekuasaan Machiavelli lebih dari itu, yakni kekuasaan Negara baginya sekedar perantara saja, sementara tujuan akhir dan tertinggi dari Negara adalah terciptanya kebesaran dan kehormatan. Jadi, tampaknya kekuasaan Negara bagi Machiavelli merupakan tujuan Negara yang tidak sebenarnya, sementara tujuan yang sebenarnya adalah kebesaran dan kehormatan Negara. Dari sini kita bisa lebih tahu bahwa tujuan Negara itu, sifatnya ada yang primer atau tujuan Negara yang sebenarnya dan ada juga yang sekunder atau tujuan negara yang bukan sebenarnya. Mayoritas pendapat ahli sejarah mengatakan bahwa buku *Il Principe* telah menjadi sumber ilham bagi para diktator, seperti Frederik Yang Agung dan Adolf Hitler di Jerman; Louis XIV dan Napoleon Bonaparte di Prancis; Oliver Cromwell di Inggris; dan Benito Mussolini di Italia.

- d) Teori Perdamaian Dunia (*Teori Dante Alighiere*). Teori perdamaian dunia ini menyatakan bahwa tujuan Negara ini adalah mewujudkan perdamaian dunia. Teori ini dianut oleh *Dante Alighiere* (1265-1321). Dante merupakan seorang filosof dan penyair. Selain itu, Dante juga seorang yang memiliki pengaruh politik dalam negaranya, Florence. Pada tahun 1313, Dante menyusun sebuah buku yang berjudul *die monarchia* sama seperti buku lainnya, buku ini disusun dalam suasana

sangat kacau di pemerintahan Italia. Disatu titik pada saat itu terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan antara raja dengan partai politik golongan dan kota-kota kecil dan disisi lain, pertentangan tajam antara raja dengan kepausan. Pada konteks ini Dante cenderung lebih memihak kepada raja sehingga teori bersifat anti Paus, dan berpendirian bahwa paus hanya berdaulat dalam kerohanian saja sekalipun diakui bahwa Negara juga bertugas menganjurkan keagamaan. Dante juga menyarankan agar Paus dan Raja, dengan kompetensinya masing-masing, sebaiknya bekerja sama dengan menciptakan perdamaian dunia. Namun demikian, porsi baru dalam proses penciptaan perdamaian dunia tersebut, dinyatakan oleh dalam buku *die monarchia* harus lebih besar ketimbang Paus. Dalam bukunya itu, Dante juga menyarankan bagaimana seharusnya pemerintahan diorganisasikan, dan siapa yang sepantasnya memerintah. Dante menegaskan bahwa: "Tujuan Negara sesungguhnya adalah menciptakan perdamaian dunia, dengan jalan menciptakan undang-undang yang seragam bagi seluruh umat manusia. Kekuasaan sebaiknya terpusat ditangan seorang Monarch, agar perdamaian dan keamanan dapat terjamin. Perebutan pengaruh dan kekuasaan harus disapu bersih. Negara harus bersifat progresif mengejar kemajuan bagi rakyat, bukan untuk kepentingan perseorangan." "Sistem kenegaraan yang harus dijalankan oleh seorang *monarch* untuk menciptakan dan memelihara perdamaian dunia, menurut Dante, adalah *imperium* atau kerajaan dunia. Karena menurutnya, pada penguasa imperiumlah akan diperoleh keadilan. Berdasarkan anggapan tersebut, dia menyampaikan bahwa yang selayaknya menjadi raja adalah kaisar Jerman yang telah menggantikan *Imperium Romanum*.

- e) Teori Penjaminan Hak Dan Kebebasan (Immanuel Kant). Teori ini dikembangkan oleh Immanuel Kant (1724-1804). Ia adalah seorang berkebangsaan Jerman dan penganut teori perjanjian masyarakat dan kedaulatan rakyat. Kant menjadi mahaguru di Jerman, menulis buku tentang Tata Negara

“metaphysische anfangsgrunde der rechts lehre” (metafisika dalam hukum,1797). Teori Kant tentang tujuan negara didasarkan pada asumsinya bahwa semua orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Dengan dasar anggapan itu, Kant mengajarkan bahwa tujuan Negara adalah menegakan hak-hak dan kebebasan-kebebasan warganya. Rakyat tidak usah tunduk pada Undang-undang yang tidak terlebih dahulu mendapat persetujuan rakyat sendiri dan bahwa rakyat dan pemerintah bersama-sama merupakan subjek hukum dan bahwa hidup rakyat sebagai manusia dalam Negara, bukanlah karena kemurahan hati pemerintah melainkan berdasarkan hak-hak kekuatan sendiri. Inilah menurut Kant, sebagai bagian dari ajaran suatu teori “Negara Hukum.”Teori Negara hukum disampaikan Kant disebut sebagai sarjana, seperti Utrecht dan Kranenburg, sebagai teori hukum murni dalam arti sempit. Mengapa disebut demikian? karena Negara diposisikan pasif dan peranan Negara cenderung hanya sebagai penjaga ketertiban hukum dan pelindung hak serta kebebasan warga Negara atau penjaga malam. Jadi, Negara tidak turut campur dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada praktiknya, pandangan ini menjadi dasar kenegaraan ekonomi liberalisme dan semboyangnya “persaingan bebas” atau *“laissez faire, laissez aller”*, yang dijalankan dunia barat dengan semua konsekuensinya sampai pecahnya perang dunia pertama (1914-1918). Sebelum mengakhiri pembahasan teori tujuan Negara dan memasuki uraian ideologi-ideologi Negara, hal yang dianggap penting pada bagian ini adalah menyajikan teori tentang fungsi Negara. Prof. Meriam Budiarjo mengemukakan 4 fungsi Negara yakni: a). Melaksanakan penertiban; untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, Negara harus melaksanakan penertiban. Dapat dikatakan bahwa Negara adalah berfungsi sebagai stabilitator, b). Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Dewasa ini fungsi ini di anggap sangat penting terutama bagi negara-

negara baru, c). Pertahanan, hal ini dibutuhkan untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar. Untuk ini, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan. d). Menegakkan keadilan; hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan. Sementara itu sarjana lain, seperti Charles E. Merriam mengungkapkan 5 fungsi Negara yaitu: keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum; dan kebebasan. Dengan demikian tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicu, common good, common weal*). **Roger H. Soltau** mengatakan tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin. Sedangkan menurut **Harold J. Laski**, menciptakan keadaan dimana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Tujuan negara Republik Indonesia sebagai tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah: Untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita dan wacana pendirian bangsa yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa ini mempunyai makna sejarah yang sangat penting. Dapat dikatakan cita-cita politik yang sangat realistis mengingat bangsa Indonesia yang penuh dengan keberanekaragaman budaya, agama, suku, adat, bahasa dan sebagainya. Tugas kita adalah menerjemahkan tujuan tersebut oleh alam kehidupan bermasyarakat.

2. Tugas Negara

Fungsi negara, ialah tujuan negara yang bersangkutan yang dijalankan oleh organisasi negara terkait dengan negara itu diadakan. Sedangkan, tugas adalah pelaksanaan lebih lanjut dari fungsi negara. Secara terminologis, tugas dapat disamakan dengan fungsi. Dengan usaha pencapaian tujuan negara itu, menunjukkan bahwa suatu negara juga harus melayani dan melindungi kepentingan masyarakatnya. Sehingga berdasarkan pengorganisasian fungsi negara, menurut greenberg dikutip budiman, mengemukakan aspek-aspek kelembagaan negara seperti istilah populer sekarang: rezim, aparat birokrasi, dan kebijakan publik lebih ditailnya. Fungsi-fungsi negara dilakukan dengan beberapa struktur yang tidak tergantung satu sama lain. Dalam hal ini dijelaskan oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya "*memahami ilmu politik*" secara teoritis terdapat dua kemungkinan pelaksanaan fungsi negara yakni: 1). Pemusatan fungsi-fungsi negara pada satu struktur. Biasanya ditemui pada salah seorang diktator atau kerajaan absolut ketika semua tugas dan kewenangan negara dipegang dengan satu tangan. Pemegangnya dapat saja menugaskan beberapa fungsinya secara vertikal ke bawah, tetapi semua bagian di bawahnya tunduk dan bertanggung jawab kepada orang yang satu. 2) "pemencaran fungsi-fungsi negara" kepada beberapa organ atas pusat struktur pemerintahan, dapat berujud "pembagian fungsi" dan dapat berupa "pemisahan fungsi", di samping itu pemencaran fungsi negara dapat dilakukan horizontal maupun secara vertikal/teritorial.

Pembagian fungsi negara itu berarti pemencaran fungsi negara pada bagian struktur pemerintahan yang satu dengan yang lain memiliki hubungan sederajat, tidak saling membawahkan, tetapi hubungan secara fungsional dalam usaha bersama mencapai tujuan negara. Kemudian, pemisahan fungsi negara kepada beberapa struktur negara yang satu dengan yang lain terpisah dan berdiri sendiri tetapi yang satu melakukan kontrol terhadap yang lain sebagai penimbang (*checks and balances*). Kedua bentuk pemencaran ini pada dasarnya merupakan pemencaran

secara horizontal atau disebut pemencaran fungsional (pembagian kekuasaan). Salah satu struktur pemerintahan yang mendapatkan fungsi dalam rangka pembagian maupun pemisahan mungkin mendelegasikan sebagian tugas dan kewenangan kepada daerah tingkat yang lebih rendah. Hal ini dinamakan pemencaran fungsi negara secara vertikal atau pemencaran secara teritorial (pembagian kekuasaan secara teritorial) dalam hal ini, pemencaran teritorial dibedakan menjadi tiga bahagian: 1). Sentralisasi, dalam asas sentralisasi pemerintah lokal yang menerima tugas dan kewenangan negara merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Karena itu bertanggung jawab penuh kepada pemerintah pusat., 2). Dekonsentrasi apabila pemerintah lokal yang menerima tugas dan kewenangan negara itu, selain tetap tunduk dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat tetapi memiliki sejumlah keleluasaan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan (sesuai karakteristik daerah), 3). Desentralisasi ialah pemencaran fungsi negara kepada pemerintah lokal yang berhak mengurus rumah tangga sendiri atau otonom. Pemerintah lokal yang memiliki otonomi ini menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan tugas kewenangan yang secara terinci diserahkan oleh pemerintah pusat, tetapi ia tidak bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Karena fungsi itu berasal dari pemerintah pusat maka pemerintah pusat dengan alasan yang secara hukum dan politik dapat saja mencabut sebahagian atau seluruh fungsi yang otonom itu.

Dalam rangka pengoperasian fungsi negara melalui aspek kelembagaan negara di atas, yang secara langsung menjelma menjadi kekuasaan negara. Para ilmuwan politik dari pemikir klasik sampai modern mengemukakan pemikirannya dalam rangka untuk mengontrol kekuasaan negara itu tidak sewenang-wenang dengan membagi atau memisahkan kekuasaan, walaupun pada prinsipnya tidak pernah secara keseluruhan diikuti oleh para birokrat. Pendapat-pendapat tersebut dapat digolongkan dan diberi istilah, yaitu: a). Eka praja, apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan. Bentuk ini sudah tentu diktator (*authokrasi*) karena

tidak ada *balances* (tandingan) dalam era pemerintahannya. Jadi yang ada hanya pihak eksekutif saja, dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahan fasisme, b). Dwi praja, apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan, c). Tri praja, apabila kekuasaan dipegang oleh tiga badan; d). Catur praja, apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan. Bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen, bila tidak akan tampak kemubaziran; dan e). Panca praja, apabila kekuasaan dipegang oleh lima badan.

Fungsi negara yang pertama dikenal adalah lima fungsi yang diperkenalkan di Perancis pada abad XVI, yaitu: Fungsi *diplomatic* (diplomasi), Fungsi *defencie* (pertahanan), Fungsi *financie* (finansial), Fungsi *justice* (keadilan). Fungsi *policy* (kebijakan). Fungsi-fungsi seperti di atas, diadakan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dari pada pemerintah yang waktu itu masih bersifat diktator, jadi belum memiliki arti seperti sekarang. Bila dibandingkan dengan sekarang, maka fungsi-fungsi di atas, hampir sama dengan departement.

Pemikiran Jhon Locke pada hakikatnya kekuasaan negara harus dipisahkan kepada tiga lembaga negara, yaitu (1) Kekuasaan legislatif, yaitu wewenang membuat undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif, yaitu wewenang mempertahankan dan melaksanakan undang-undang serta mengadili perkara. Wewenang mengadili ini adalah *Uivoering* atau pelaksanaan, karena merupakan bagian dari weweng eksekutif; dan (3) Kekuasaan federatif, adalah wewenang yang tidak termasuk ke dalam wewenang legislatif dan eksekutif. Misalnya hubungan luar negeri, kekuasaan menentukan perang dan damai, liga dan aliansi antar negara, dan transaksi-transaksi dengan negara asing. Demi alasan praktis, kekuasaan federatif dimasukkan kedalam kekuasaan eksekutif, namun kedua jenis kekuasaan itu harus dipegang oleh orang yang berbeda. Tidak boleh dipegang oleh satu orang atau lembaga.

Teori *Jhon Locke* di atas kemudian disempurnakan oleh *Montequieu* dengan membagi fungsi negara menjadi tiga fungsi tetapi masing-masing fungsi itu terpisah dan dilaksanakan oleh lembaga yang terpisah pula atau dengan kata lain, *la separation des pouvoirs* (pemisahan kekuasaan). Inti teori ini, bahwa agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan terbentuknya kekuasaan mutlak yang sewenang-wenang, maka kekuasaan itu perlu dipisahkan. Pemisahan ketiga kekuasaan itu satu sama lain, baik mengenai tugas dan fungsi, maupun mengenai alat perlengkapan atau organ yang menyelenggarakan. Dalam hal ini kekuasaan negara tersebut, yaitu: (1) Fungsi legislatif, yaitu membuat undang-undang. (2) Fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan undang-undang. (3) Fungsi yudikatif untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili), dan fungsi ini berdiri sendiri.

Jhon Locke memasukkan Yudisiil kekuasaan ke dalam kekuasaan eksekutif. Sebaliknya, *Mountesquieu* menganggap bahwa kekuasaan yudisiil sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Pemisahan tersebut didasari, bahwa kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pihak penguasa akan terjamin apabila ketiga kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisiil diadakan pemisahan mutlak satu sama lain. Oleh *Emmanuel Khan*, teori itu disebutnya "*Trias Politica*." Alasan dari pemberian nama *trias politica*, ialah karena konsep *Jhon Locke* dan *Mountesquieu* tentang kekuasaan negara dipisahkan ke dalam tiga fungsi atau tiga poros (*tri-as*) kekuasaan (*politica*). Secara idealita, *trias politica* memadai untuk memisahkan secara sistematis kekuasaan negara namun dalam praktiknya konsep itu dinilai terlalu *utopis*, karena ketiga hal di atas mengandung kelemahan, yaitu memiliki pengertian stuktur mapan yang terspesialisasikan untuk melaksanakannya, dan proses yang *eksplisit* untuk melaksanakannya; dan pada pelbagai masyarakat fungsi itu tidak dilaksanakan oleh satu struktur, dan adakalanya prosedur pelaksanaannya cenderung bersifat informal. Terbukti, tak satupun negara di Eropa bahkan Prancis (tanah kelahiran *Mountesquieu*) yang menerapkan teori ini persis seperti yang digagas *Montesquieu*. Negara

yang dianggap paling mendekati realisasi ide Montesquieu hanya Amerika yang konsisten memisahkan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara ketat dan diimbangi mekanisme hubungan yang saling mengendalikan secara seimbang.

Selain kedua pemikir di atas, juga ada pemikir klasik yang menjelaskan tentang fungsi negara, seperti Jean Jacques Rousseau. Menurut Jean Jacques Rosseau, apabila negara yang memiliki keabsahan memerintah atas kehendak umum atau kehendak rakyat itu, ingin menjalankan fungsinya secara baik maka negara harus memiliki dua bentuk kekuasaan atau keberadaan kedua lembaga ini. Karena tanpa kerjasama dan keberadaan kedua lembaga negara itu negara tidak bisa berbuat apa-apa. Dua bentuk kekuasaan itu, yaitu : (1) Kekuasaan legislatif (*legislatif power*) atau dengan kata lain kemauan; dan (2) Kekuasaan eksekutif (*executif power*) atau dengan kata lain kekuatan. Dibandingkan dengan pemikir-pemikir klasik di atas, lebih tepat digunakan pembagian fungsi yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Ia membagi fungsi pemerintahan menjadi tiga, dengan menggunakan istilah peraturan, yaitu (1) Pembuatan peraturan (*rule making*); (2) Penerapan peraturan (*rulling aplication*); dan (3) Penghakiman peraturan (*rule adjudication*). Yang dimaksud dengan peraturan berarti keputusan politik karena semua keputusan politik biasanya dirumuskan dalam peraturan peundang-undangan, seperti UU, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres) ataupun Instruksi Presiden (Inpres), Keputusan Menteri (Kepmen), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan Desa. Sedangkan, tiga fungsi itu cenderung bersifat multifungsional. Artinya, satu fungsi dapat dilaksanakan oleh lebih dari struktur sebaliknya struktur dapat melaksanakan lebih dari satu fungsi. Spesifikasi dari lembaga yang bertanggung jawab antara lain, fungsi pembuatan peraturan yang diselenggarakan oleh badan perwakilan rakyat, fungsi penerapan peraturan yang diselenggarakan oleh pemerintah (kabinet) dan birokrasi; dan fungsi penghakiman (penegakan)peraturan yang diselenggarakan oleh lembaga peradilan.

Selain pemikir-pemikir di atas, muncul berbagai pemikiran yang berbeda mengenai fungsi negara. Oleh Goodnow fungsi negara dibagi menjadi dua : (1) *Policy making* adalah kebijakan negara untuk waktu tertentu, untuk seluruh masyarakat. Orang yang menetapkan *policy making* disebut *policy makers*. Jadi yang dimaksud dengan *policy makers*, adalah orang yang menentukan kebijakan negara, tujuan-tujuan kenegaraan pada waktu tertentu untuk masyarakat seluruhnya. Atau menentukan tujuan mana yang baik untuk negara pada waktu tertentu; dan (2) *Policy executing*, adalah kebijakan yang harus dilaksanakan untuk tercapai *policy making*. Orang yang menetapkan *policy executing* adalah *policy executor*. Jadi, yang dimaksud *policy executor* , adalah orang-orang yang berusaha mencapai apa-apa yang telah diputuskan oleh *policy makers* tadi atau menentukan daya upaya, alat-alat apa dan sebagainya untuk mencapai tujuan tadi. Dengan timbulnya ajaran Goodnow ini, adalah sebagai reaksi terhadap suatu ajaran yang menghendaki cara pergantian orang-orang dalam pemerintahan. Ajaran ini terkenal sebagai *spoil system* yang diperkenalkan oleh Andrew Jackson, di AS, yang berpendapat bahwa apabila suatu pemerintah berganti, maka semua pegawai negara harus diganti oleh penguasa yang baru maksudnya untuk kelancaran jalannya pemerintahan, tanpa ada kemungkinan sabotase atau boikot dari mereka yang tidak sepaham. Bila sistem ini dilaksanakan benar-benar maka pemerintahan akan mengalami kekacauan, karena mencari dan mendidik pegawai-pegawai baru tidaklah mudah apalagi untuk mengisi jabatan tertentu, misalnya, Departemen Luar Negeri, Imigrasi dan sebagainya. Goodnow melihat fungsi secara prinsipil sehingga diperlukan dua fungsi negara. Menurut Goodnow terhadap *policy makers* boleh dilaksanakan sistem Andrew Jackson, sedang untuk *policy executor* tidak perlu dipakai, tapi yang dijalankan adalah berdasarkan keahlian. Ajaran Goodnow ini disebut juga *meried system*, karena mengutamakan kegunaannya.

Pemikiran tentang fungsi negara juga telah dihasilkan beberapa pemikir lainnya, sebagai berikut yaitu: a). Menurut Van Vollen Hoven; *Regeling*, kekuasaan membuat undang-undang, b). *Bestuur*, kekuasaan pemerintahan, c). *Politie*, kekuasaan kepolisian, c). *Rechtspraak*, kekuasaan mengadili. Menurut Lemaire; *Wetgeving*, kewenangan membuat undang-undang, c). *Bestuur*, kewenangan pemerintahan, *Politie*, kewenangan penertiban, *Rechtspraak*, kewenangan peradilan, d). *Bestuur Zorg*, kewenangan untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Abdul Kadir Audah bahwa Sultan Tanfiziyah, kekuasaan penyelenggara undang-undang, Sultan Tashri'iyah, kekuasaan pembuat undang-undang yaitu; Sultan Qadhaiyah, kekuasaan kehakiman, Sultan Maliyah, kekuasaan keuangan, dan Sultan Muraqabah, kekuasaan pengawasan masyarakat. Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Adapun tujuan dan fungsi negara a). Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, b). Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan, c). Melaksanakan ketertiban .

Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damai diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat yaitu; 1). Pertahanan dan keamanan. Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. 2). Menegakkan keadilan. Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan. Pendiri Negara Republik Indonesia (RI) menjamin dan melindungi hak asasi warganya. Hal ini dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara RI dibentuk “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidup-

an bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dalam pasal 28 E UUD 1945 (versi amandemen) dikatakan: "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya" (ayat 1) dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (ayat 2). Konstitusi Negara menjamin dan melindungi hak-hak asasi warganya. Lebih khusus lagi kebebasan beragama itu difasilitasi pemerintah melalui Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat sehingga para pemeluk agama yang berbeda satu sama lain dapat menjalankan hak asasinya. Dengan dasar konstitusi dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan, pemerintah berharap hubungan agama-agama dan kehidupan beragama di Indonesia rukun dan saling menghormati. Dengan demikian para pemeluk agama menampilkan agama yang berwajah kedamaian dan penuh cinta-kasih-sayang.

Dari dirinya sendiri, agama semestinya menjadi rahmat bagi sesama-sesama bila substansi ajaran agama benar-benar menjadi jantung kehidupan beragama. Di sinilah tugas pemimpin Negara demokrasi yaitu menegakkan hak asasi manusia universal, memfasilitasi dan mendukung kehidupan beragama yang memeluk dan menghargai kemanusiaan. Sebab kebebasan beragama sebagai bagian HAM merupakan salah satu fondasi Negara demokrasi

D. Pemerintah

Government bisa diartikan sebagai pemerintah, yaitu organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang. Pemerintah di sini misalnya raja, presiden, walikota, bupati, dan sebagainya. Pemerintahan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses pengambilan

keputusan dan proses dimana suatu keputusan diterapkan atau tidak diterapkan. Pemerintahan digunakan dalam berbagai konteks seperti pemerintahan nasional, pemerintahan lokal, dan sebagainya. Dari definisi tersebut, maka analisis tentang pemerintahan berfokus pada aktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan, penerapan keputusan yang telah dibuat, serta struktur formal dan informal yang telah diatur. Pemerintah (*government*) adalah salah satu aktor dalam pemerintahan. Aktor lain yang terlibat dalam pemerintahan bermacam-macam, tergantung pada tingkat pemerintahan yang didiskusikan. Contohnya di daerah pedesaan, aktor lainnya mungkin termasuk tuan tanah, asosiasi petani dan peternak, industri, lembaga penelitian, dan lainnya. Di daerah perkotaan, tentunya lebih kompleks. Pemerintah mempunyai peran untuk menghubungkan antar aktor yang terlibat atau mempengaruhi pemerintahan. Di tingkat nasional, para pelobi, donatur internasional, perusahaan multinasional, media massa, dan sebagainya mempunyai peran penting dalam proses pengambilan keputusan atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Di beberapa negara, sebuah sindikat kriminal juga berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan, hal ini kebanyakan terjadi di bagian perkotaan dan tingkat nasional. Semua aktor selain pemerintah dan militer termasuk bagian masyarakat sipil. Adapun bentuk-bentuk pemerintahan yaitu:

- a) Aristokrasi. Kata aristokrasi berasal dari kata "*aristoi*" artinya cerdik pandai, golongan ningrat (yang pada zaman dahulu jumlahnya sedikit), dan "*archein*" atau "*cratia*" artinya memerintah. Jadi aristokrasi adalah suatu pemerintahan yang dipimpin dan dipegang oleh sejumlah kecil para cerdik pandai yang memerintah berdasarkan keadilan.
- b) Otokrasi. Otokrasi berasal dari kata "*auto*" yang artinya satu atau sendiri, dan "*archein*" atau "*cratia*" artinya memerintah. Jadi autokrasi berarti pemerintahan yang berada di tangan satu orang.

- c) Demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata "*demos*" artinya rakyat, dan "*archein*" atau "*cratia*" artinya memerintah. Jadi demokrasi adalah suatu pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.
- d) Monarki. Istilah monarki berasal dari kata "*mono*" artinya satu, dan "*archein*" atau "*cratia*" artinya memerintah. Jadi monarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang, yang berkuasa, berbakat, dan mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga Negara yang lain, sehingga mendapatkan kepercayaan untuk memerintah dan pemerintahannya ditujukan untuk kepentingan rakyat biasanya merupakan kerajaan.
- e) Oligarki . Istilah oligarki berasal dari kata "*oligos*" artinya sedikit, kecil, dan "*archein*" atau "*cratia*" artinya memerintah. Jadi oligarki adalah pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok kecil yang memerintah demi kepentingan golongan-nya itu sendiri.
- f) Teokrasi. Istilah teokrasi berasal dari kata "*teo*" artinya tuhan, dan "*archein*" atau "*cratia*" artinya memerintah. Jadi teokrasi adalah pemeritahan yang tidak secara langsung dikuasai oleh masalah-masalah keduniawian, terutama yang berhubungan dengan kepentingan-kepentingan material, melainkan pemerintahan yang ditinjau dari segi ketuhanan, dari segi agama.

Dengan demikian suatu wilayah yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintah yang berdaulat. Bangsa di negara tersebut merupakan rakyat atau warga negara harus taat pada peraturan perundang-undangan dari kekuasaan yang sah, dalam hal ini pemerintah. Pemerintah merupakan pihak yang berwenang untuk membuat dan menerapkan hukum di suatu wilayah, dan merupakan salah satu dari aktor yang berperan dalam pemerintahan. Pemerintahan sendiri memiliki berbagai macam bentuk, seperti aristokrasi, okokrasi, demokrasi, monarki, oligarki, dan teokrasi.

E. Organisasi Masyarakat

Kebanyakan orang mulai berorganisasi jika keinginan-keinginannya dipenuhi oleh organisasi tersebut. Berbagai latar belakang mendorong orang masuk dalam organisasi. Ada yang berlatar belakang heroisme, patriotisme, karir, ikut-ikutan, ingin tahu, dendam atau apapun juga sebagai motivasi awal. Namun sesuai dengan perkembangannya, organisasi akan mengarahkan setiap anggotanya sesuai dengan kemampuan masing-masing agar berguna buat kepentingan dan tujuan organisasi. Sebagai sebuah organisasi perjuangan, sebuah organisasi revolusioner sangat ditentukan oleh kekuatan massa rakyat, anggota dan kepemimpinannya. Tetapi di atas semua itu: politik dan ideologilah yang akan lebih banyak menentukan watak perjuangan setiap anggota dan organisasi itu sendiri. Sebanyak apapun anggotanya, sekuat apapun fasilitas yang dimiliki oleh organisasi, ia akan tumpul dan tidak menjadi senjata perjuangan yang ampuh jika tidak dipimpin oleh ideologi dan politik. Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotanya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando bersama.

Secara mudah untuk mengerti kesatuan antara pimpinan, anggota dan massa rakyat dalam sebuah organisasi adalah dengan mengambil perumpamaan. Seperti sebuah kereta api, organisasi memelurkan lokomotif yang akan menarik dan memimpin perjalanan gerbong-gerbong (cabang-ranting-anggota-kader) yang berisikan penumpang (massa rakyat). Kereta api tersebut memerlukan cara atau jalan untuk mencapai tujuan akhirnya. Ia harus mampir di beberapa stasiun, mengisi bahan bakar, memperbaiki mesin, menambah atau mengurangi gerbong, menambah atau mengurangi penumpang, sesuai dengan kekuatannya. Organisasi juga dapat dilihat sebagai sebuah pedang,

alat tempur untuk mengalahkan musuh-musuh rakyat. Kekuatan dan ketajaman pedang sangat tergantung pada kemampuan pimpinan, anggota dan massa rakyat yang sedang melawan kezaliman dan ketidakadilan. Organisasi seperti pedang, kalau tidak terus diasah dan digunakan akan menjadi karatan dan tidak berguna. Oleh karena itu kekuatan organisasi sebenarnya sangat tergantung pada pertentangan kritis didalam tubuh organisasi dan pertempuran nyata melawan penindasan yang akan semakin membuat organisasi semakin kuat dan tajam.prinsip-prinsip dasar organisasi:

Dalam organisasi dikenal prinsip-prinsip organisasi yang berlaku secara keseluruhan disetiap tingkatan dan lini organisasi. Prinsip-prinsip ini melekat di setiap anggota, pimpinan dan organ-organ didalam organisasi. Ada lima prinsip penting yang menjadi landasan utama, yaitu; garis massa, disiplin dan demokratis, kolektivisme, kepeloporan, dan kepentingan individu di bawah kepentingan orang banyak; subordinasi organ yang lebih rendah tunduk pada organ yang lebih tinggi.

BAB. IV

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU PENGETAHUAN LAIN

Sejak dahulu kala ilmu politik erat hubungannya dengan sejarah dan filsafat. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik, oleh karena menyumbang bahan, yaitu data dan fakta dari masa lampau untuk diolah lebih lanjut. Perbedaan pandangan antara ahli sejarah dan sarjana ilmu politik ialah bahwa ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau dan inilah yang menjadi tujuannya, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lebih melihat ke depan (*future oriented*): bahan mentah yang disajikan oleh ahli sejarah, teristimewa sejarah kontemporer, oleh sarjana ilmu politik hanya dipakai untuk menemukan pola-pola ulangan (*recurrent patterns*) yang dapat membantu untuk menentukan suatu proyeksi masa depan. Sarjana ilmu politik tidak puas hanya dengan mencatat sejarah. Tetapi ia akan selalu mencoba menemukan dalam sejarah pola-pola tingkah laku politik (*patterns of political behavior*) yang memungkinkannya untuk, dalam-dalam batas-batas tertentu, menyusun suatu pola perkembangan untuk masa depan dan memberi gambaran bagaimana sesuatu keadaan dapat diharapkan akan berkembang dalam keadaan tertentu.

Untuk kita di Indonesia mempelajari sejarah dunia dan sejarah Indonesia khususnya merupakan suatu keharusan. Sejarah kita pelajari untuk ditarik pelajarannya, agar dalam menyusun masa depan kita tidak terbentur pada kesalahan-kesalahan yang sama. Misalnya, perlu sekali kita mempelajari revolusi-revolusi yang telah mengguncangkan dunia, yaitu revolusi Prancis, Amerika, Rusia dan China, supaya gejala revolusi yang telah kita alami sendiri dapat lebih kita mengerti dan tarik manfaatnya.

Begitu pula, misalnya, perlu sekali mempelajari faktor-faktor yang telah mendorong partai komuis indonesia (PKI) untuk menyelenggarakan pemberontakan medium pada tahun 1948 dan gerakan 30 september pada tahun 1965, supaya peristiwa-peristiwa semacam itu dapat dihindarkan di masa depan.

Usaha kita untuk meneliti sejarah kontemporer kita secara ilmiah masih sangat terbatas. Sarjana ilmu politik asing banyak menulis mengenai sejarah kontemporer indonesia seperti misalnya George MC. T. Kahin, *nationalism and revolution in indonesia*, yang membahas masa 1949 sampai 1959; dan daniel s. lev, *the transition to guided democracy*, yang membahas masa peralihan ke demokrasi terpimpin. Tokoh-tokoh kita sampai sekarang membatasi diri pada penulisan sejarah secara memoar (kenangan-kenangan), seperti soekarno, *an autobiography as told to cindy adams*; moh. Hatta, *sekitar proklamasi*; adam malik, *riwayat proklamasi*; sewaka, *dari zaman ke zaman*; T.B. simatupang, *laporan dari banaran*, dan sebagainya. Baru pada tahun 1976 suatu tim ahli di bawah pimpinan sartono kartodirjo berhasil menerbitkan *sejarah nasioanal indonesia*. Perlu juga disebut di sini buku *menjadi indonesia*, tulisan parakitri T. simbolon pada tahun 2006.

A. Ilmu Pengetahuan dengan Pendakatan Filsafat

Ilmu pengetahuan lain yang erat sekali hubungannya dengan ilmu politik ialah filsafat. Filsafat ialah usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (*universe*) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: apakah asas-asas yang mendasari fakta? Apakah yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering merupakan pedoman bagi manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya. Ilmu politik terutama sekali erat hubungannya dengan filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula dan nilai (*value*) dari negara. Negara dan manusia di dalamnya dianggap sebagai sebagian dari alam semesta. Dalam

pandangan filsuf yunani kuno, filsafat politik juga mencakup dan erat hubungannya dengan moral filosofi atau etika (*ethics*). Etika membahas persoalan yang menyangkut norma-norma baik/buruk seperti misalnya tindakan apakah yang boleh dinamakan baik/buruk, manusia apakah yang boleh dinamakan manusia baik/buruk; apakah yang dinamakan adil/tidak adil. Penilaian semacam ini, jika diterapkan pada politik menimbulkan pertanyaan sebagai berikut: apakah seharusnya tujuan dari negara; bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut; bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya. Dengan demikian kita sampai pada bidang filsafat politik yang membahas masalah politik dengan berpedoman pada suatu sistem nilai (*value system*) dan norma-norma tertentu. Contoh dari pandangan bahwa ada hubungan erat antara politik dan etika tercermin dalam karangan filsuf yunani plato, *politeia*, yang menggambarkan negara yang ideal. Di negara-negara barat pemikiran politik baru memisahkan diri dari etika mulai abad ke-16 dengan dipelopori oleh negarawan Itali Niccolo Macchiavelli. Akan tetapi di dunia barat akhir-akhir ini kembali timbul perhatian baru tentang filsafat dengan munculnya buku *a theory of justice*, karangan John Rawls tahun 1971. Rawls memperjuangkan distribusi kekayaan secara adil (*equity*) bagi pihak yang kurang mampu. (John Rawls, 1971).

B. Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya

Hubungan-hubungan ilmu politik tidak hanya terbatas pada sejarah dan filsafat, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai obyek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok (*group*). Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja

sama. Cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa manusia itu tidak dapat hidup tersendiri, tetapi selalu hidup dalam suatu komunitas. Gagasan bahwa secara mutlak manusia merupakan anggota (*group*) bukanlah penemuan baru. Sejak kira-kira tahun 400 S.M. filsuf yunani aristoteles berkata bahwa manusia merupakan *zoon politikon* (makhluk sosial atau makhluk politik) dan bahwa manusia yang hidup tersendiri adalah dewa atau binatang.

Mengenal ilmu-ilmu apa yang termasuk ilmu-ilmu sosial tidak ada persesuaian paham. Misalnya, sarjana-sarjana seperti Bert F. Hoselitz dan Edwin R.A. Seligman menyebut sejarah sebagai salah satu ilmu sosial, tetapi tidak menyebut ilmu administrasi atau ilmu komunikasi. Ada juga pihak lain yang menyangkal bahwa sejarah merupakan suatu ilmu sosial, sementara itu ilmu administrasi dan ilmu komunikasi di berbagai perguruan tinggi diperlukan sebagai ilmu sosial. Berhubung ada perbedaan pendapat ini, ada baiknya disebut di sini ilmu-ilmu yang oleh badan internasional seperti UNESCO disebut sebagai ilmu sosial, yaitu: sosiologi, psikologi sosial, antropologi budaya, hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu politik, ekonomi, statistik, kriminologi, demografi, dan ilmu administrasi. Beberapa dari ilmu sosial ini akan dibahas di bawah ini sebagai berikut:

1. Sosiologi

Pilihan ilmu-ilmu sosial, sosiologi yang paling pokok dan umum sifatnya. Sosiologi membantu sarjana ilmu politik dalam usahanya memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam masyarakat. Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-teori sosiologi, sarjana ilmu politik dapat mengetahui sampai dimana susunan dan stratifikasi sosial memengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan (*policy decisions*), corak dan sifat keabsahan politik (*political legitimacy*), sumber-sumber kewenangan politik (*sources of political authority*), pengendalian sosial (*social control*), dan perubahan sosial (*social change*). Mengenai masalah perubahan dan pembaharuan, sosiolog menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaharuan dalam

masyarakat. Apabila dalam masyarakat timbul golongan-golongan atau kelompok-kelompok baru yang memajukan kepentingan-kepentingan baru, maka nilai-nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan perubahan-perubahan dalam pola kehidupan politik. Pergerakan perburuhan di negara-negara industri dan pergerakan-pergerakan petani di negara agraris, misalnya, menyebabkan orientasi kepada nilai-nilai baru yang timbul sebagai akibat pergeseran golongan dan kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat. Perkembangan pertumbuhan penduduk dengan sendirinya akan mengakibatkan perubahan dalam stratifikasi sosial, hubungan antarkelas, ketegangan-ketegangan politik, dan meningkatnya masalah-masalah organisasi sosial dan politik.

Sosiologi maupun ilmu politik mempelajari negara. Akan tetapi sosiologi menganggap negara sebagai salah satu lembaga pengadilan sosial (*agent of social control*). Sosiologi menggambarkan bahwa pada masyarakat yang sederhana maupun kompleks senantiasa terdapat kecenderungan untuk timbulnya proses, pengaturan, dan pola-pola pengendalian tertentu yang formal maupun yang tidak formal. Selain dari itu sosiologi melihat negara juga sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memperhatikan bagaimana sifat dan kegiatan anggota asosiasi itu memengaruhi sifat dan kegiatan negara. Jadi, ilmu politik dan sosiologi sama dalam pandangannya bahwa negara dapat dianggap baik sebagai asosiasi (kalau melihat manusia) maupun sebagai sistem pengendalian (*system of controls*). Hanya bagi ilmu politik negara merupakan salah satu dari banyak asosiasi dan lembaga penengendalian dalam masyarakat.

2. Antropologi

Jasa sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh, maka antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil sederhana. Mula-mula

antropologi lebih banyak memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan di desa-desa dan di pedalaman, sedangkan sosiologi lebih memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi modern. Lambat laun antropologi dan sosiologi saling memengaruhi baik dalam obyek penelitian maupun dalam pembinaan teori, sehingga pada saat ini batas antara kedua ilmu sosial tadi telah menjadi kabur. Perhatian sarjana ilmu politik terhadap antropologi makin meningkat sejalan dengan bertambahnya perhatian dan penelitian tentang kehidupan serta usaha modernisasi politik di negara-negara baru. Mula-mula penelitian tentang negara-negara baru bekisar pada masalah-masalah yang bersifat makro seperti pengaruh kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, kedudukan dan peran elit nasional, masalah-masalah yang dihadapi pemerintah pusat negara-negara baru, *nation-building*, dan sebagainya. Semua ini didasarkan pada anggapan bahwa masalah daerah, terpecahnya berbagai bentuk desa di pedalaman, perbedaan suku bangsa dan agama pada akhirnya akan dapat diatasi oleh perkembangan kehidupan tingkat nasional. Antropologi justru menunjukkan betapa rumit dan sukaranya membina kehidupan yang bercorak nasional dari komunitas yang tradisional; betapa kebudayaan daerah, sistem warisan harta kekayaan, serta pola-pola kehidupan tradisional lainnya mempunyai daya tahan yang kuat terhadap usaha-usaha pembinaan kehidupan corak nasional tersebut; betapa dalam beberapa situasi faktor-faktor sosial budaya tersebut malahan lebih menjadi kuat dan lebih sadar melakukan perlawanan terhadap usaha-usaha *nation building*, apalagi jika ciri-ciri serta sifat-sifatnya tidak lebih dahulu diperhitungkan dengan seksama.

Penduduk Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang masing-masing mempunyai daerah asal dan kebudayaan sendiri, yang telah berakar sejak berpuluh-puluh tahun yang silam. Bagi seorang sarjana ilmu politik, keserasan akan kenyataan ini memungkinkannya untuk melaksanakan beberapa penelitian

yang khusus, seperti: besar-kecilnya pengaruh pemikiran dan pergerakan politik di berbagai daerah yang berbeda suku, agama, serta kehidupan sistem sosialnya (faktor-faktor perasaan ikatan primordial dalam kehidupan politik indonesia); sampai di mana pengertian dan kesadaran berbangsa indonesia terdesak atau dibatasi oleh pola-pola kesetiaan suku dan kebudayaan setempat; pengaruh komposisi golongan penduduk di suatu daerah atau kota tertentu terhadap corak dan gaya kehidupan politik di masing-masing tempat; sifat serta ciri-ciri khusus apa yang dimiliki suatu suku bangsa tertentu yang memudahkannya untuk berubah dan menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan kehidupan modern; dan masih banyak lagi judul-judul penelitian yang dapat digarap. Kecuali pengaruhnya di bidang teori, khususnya dalam menunjukkan perbedaan struktur sosial serta pola kebudayaan yang berbeda-beda pada tiap komunitas, antropologi telah juga berpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta yang kini sering dipakai dalam penelitian ilmu politik ialah metode serta pengamat (*participant observer*). Cara penelitian semacam ini, memaksa sarjana ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial “dari dalam” masyarakat yang menjadi obyek penelitiannya. Dengan hasil yang diperoleh dari praktik kerajaan semacam ini, sarjana ilmu politik dapat mengembangkan pembinaan teori atas dasar kenyataan yang konkret baik yang dialami maupun yang diamati sendiri.

3. Ilmu Ekonomi

Masa silam ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik (*political economy*), yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya seperti Portugis, Spanyol, Prancis, dan Jerman, pada abad ke-18 dan ke-19. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan pada umumnya ilmu tersebut kemudian memisahkan diri menjadi dua lapangan yang menghususkan perhatian terhadap perilaku manusia yang

berbeda-beda: ilmu politik (*political science*) dan ilmu ekonomi (*economics*). Ilmu ekonomi modern dewasa ini sesudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori, ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Oleh karena sifatnya yang ketat ini, ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial yang sering digunakan untuk menyusun perhitungan-perhitungan ke depan. Para sarjana ekonomi sedikit banyak sepakat kan penggunaan istilah serta pengertian dasar yang diperlukan untuk mencapai tujuan umum ilmu ekonomi, yaitu usaha manusia untuk mengembangkan serta membagi sumber-sumber yang langka untuk kelangsungan hidupnya.

Pemikiran yang berpangkal tolak dari faktor kelangkaan (*scarcity*) menyebabkan ilmu ekonomi berorientasi kuat terhadap kebijakan yang rasional, khususnya penentuan hubungan antara tujuan dan cara mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu ilmu ekonomi dikenal sebagai ilmu sosial yang sangat *planning-oriented*; pengaruhnya meluas pada ilmu politik seperti misalnya pengertian pembangunan ekonomi (*economic development*). Oleh karena pilihan tentang kebijakan yang harus ditempuh sering kali terbatas adanya, maka ilmu ekonomi dikenal pula sebagai ilmu sosial yang bersifat *choice-oriented*, hal mana telah berpengaruh pada pengkhususan penelitian mengenai *decision-making* dalam ilmu politik modern. Akhirnya pemikiran yang berpangkal tolak dari faktor kelangkaan telah memaksa ilmu ekonomi lebih banyak berikhtiar ke arah ramalan (*prediction*) berdasarkan perhitungan yang saksama, sehingga ilmu ekonomi modern jarang bersifat spekulatif. Ikhtiar menyusun ramalan ini berpengaruh pada sebagian sarjana ilmu politik untuk mendasarkan teori dan metodologinya pada suatu pendekatan yang lebih ilmiah, yang terkenal dengan pendekatan tingkah laku (*behavioral approach*). Dalam mengajukan kebijakan atau siasat ekonomi tertentu, seorang sarjana ekonomi dapat bertanya kepada seorang sarjana ilmu politik tentang politik manakah yang paling baik disusun guna mencapai tujuan ekonomi tertentu. Dalam mengajukan kebijakan untuk memperbesar produksi

nasional misalnya, sarjana ilmu politik dapat ditanya tentang cara-cara mengurangi hambatan politis yang mengganggu usaha ke arah tujuan itu. Pembangunan Lima Tahun di Indonesia di masa lalu memperhitungkan pula perkembangan sosial dan politik yang mungkin terjadi akibat pergeseran ekonomis yang timbul dari berhasil atau gagalnya kebijakan tertentu. Sebaliknya seorang sarjana ilmu politik dapat meminta bantuan sarjana ekonomi tentang syarat-syarat ekonomis yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan politis tertentu, khususnya menyangkut pembinaan kehidupan demokrasi.

Pesatnya perkembangan ilmu ekonomi modern, khususnya ekonomi internasional, kerja sama antara ilmu politik dan ilmu ekonomi makin dibutuhkan untuk menganalisis siasat-siasat pembangunan nasional. Seorang sarjana ilmu politik tidak dapat lagi mengabaikan pengaruh dan peran perdagangan luar negeri. Akhir-akhir ini ilmu ekonomi justru telah menghasilkan suatu bidang ilmu politik yang baru. Ini dinamakan pendekatan perilaku rasional (*rational choice*) yang lebih cenderung melihat manusia sebagai makhluk ekonomi (*economic creature*). Dianggap bahwa manusia dalam mengambil suatu keputusan selalu memperhitungkan untung rugi baginya secara ekonomis.

4. Psikologi Sosial

Psikologi sosial adalah pengkhususan psikologi yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan masyarakat, khususnya faktor-faktor yang mendorong manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok atau golongan. Jika sosiolog mempelajari kegiatan kehidupan sosial, bidang psikologi umumnya memusatkan perhatian pada kehidupan perorangan. Psikologi sosial berusaha untuk menyusun kerangka analisis yang dapat menghubungkan kedua bidang tersebut. Kegunaan psikologi sosial dalam analisis ilmu politik jelas dapat kita ketahui apabila kita sadar bahwa analisis sosial politik secara makro diisi dan diperkuat dengan analisis yang bersifat mikro. Psikologi sosial mengamati kegiatan manusia dari segi ekstern (lingkungan

sosial, fisik, peristiwa-peristiwa, dan gerakan massa) maupun dari segi intern (kesehatan fisik perorangan, semangat, dan emosi). Dengan menggunakan kedua macam analisis ini, ilmu politik dapat menganalisis secara lebih mendalam makna dan peran orang kuat, kondisi sosial ekonomi serta ciri-ciri kepribadian yang memungkinkannya memainkan peran besar itu. Ia menjelaskan bagaimana teknik Brainwashing dalam propoganda dan indoktrinasi politik serta faktor-faktor yang membangkitkan berkembangnya pemimpin yang kharismatik mempengaruhi proses politik pada umumnya.

Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan tidak resmi (*informal leadership*) turut menentukan hasil suatu keputusan dalam kebijakan politik dan kenegaraan; bagaimana sikap (*attitude*) dan harapan (*expectation*) masyarakat dapat melahirkan tindakan serta tingkah laku yang berpegang teguh pada tuntutan-tuntutan sosial (*conformity*); bagaimana motifasi untuk kerja dapat ditingkatkan sehingga memperbanyak produksi kerja melalui penanaman penghargaan terhadap waktu dan usaha; betapa nilai-nilai budaya yang telah bertahun-tahun lamanya diterima oleh masyarakat dapat melahirkan tingkah laku politik yang relatif stabil (budaya politik atau *political culture*) yang memberi dorongan kuat pada ketaatan terhadap aturan permainan *rules of the game*. Selain memberi pandangan baru dalam penelitian tentang kepemimpinan, psikologi sosial dapat pula menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggapnya baru, asing ataupun berlawanan dengan konsensus masyarakat, mengenai suatu gejala sosial tertentu. Psikologi sosial menjelaskan pula kondisi-kondisi apa yang akhirnya dapat meredakan sikap dan reaksi masyarakat terhadap gejala baru yang dihadapinya itu.

5. Geografi

Faktor-faktor yang berdasarkan geografi, seperti perbatasan strategis (*strategicfrontiers*), desakan penduduk (*population pressure*), daerah pengaruh (*sphere of influence*) mempengaruhi

politik. Montesquieu, seorang sarjana Prancis, untuk pertama kali membahas bagaimana faktor-faktor geografi mempengaruhi konstelasi politik suatu negara. Dalam masa sebelum Perang Dunia II, suatu cabang geografi mendapat perhatian besar, yaitu Geopolitik atau *Geopolitics*, yang biasanya dihubungkan dengan seorang Swedia bernama Rudolf Kiellen (1864-1933). Ia menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional. Dengan kekalahan Nazi Jerman yang banyak memakai argumentasi berdasarkan geopolitik (seperti faktor ras, *lebensraum*, faktor ekonomi dan sosial) untuk politik ekspansinya, geopolitik mengalami perkembangan. Di Indonesia fakta bahwa kita terdiri dari 17.000 pulau sehingga kita dinamakan *archipelago-state*, mempunyai akibat besar bagi eksistensi kita. Misalnya garis pantai yang harus dijaga terhadap penangkapan ikan ilegal dan untuk memelihara keamanan terhadap negara lain.

6. Ilmu Hukum

Terutama di negara-negara Benua Eropa, ilmu hukum sejak dulu kala erat hubungannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang (*law enforcement*) merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Cabang-cabang ilmu hukum yang khususnya menaruh perhatian pada negara ialah hukum tata negara (*Staatsrecht, public law*) dan ilmu negara (*Staatslehre, general theory of the state*). Analisis mengenai hukum serta hubungannya dengan negara mulai dikembangkan dalam abad ke-19, tetapi pada taraf itu terbatas pada penelitian mengenai negara-negara Barat saja. Sarjana hukum melihat negara sebagai lembaga atau instituta, dan menganggapnya sebagai organisasi hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara adalah menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum penertiban ini dipandang sebagai tata hukum. Manusia dilihat sebagai makhluk yang menjadi objek dari sistem hukum,

dan dianggap sebagai pemegang hak dan kewajiban politik semata-mata. Ilmu hukum tidak melihat manusia sebagai makhluk yang terpengaruh oleh faktor sosial, psikologi, dan kebudayaan. Akibatnya ialah bahwa ada kecenderungan pada ilmu hukum untuk meremehkan kekuatan-kekuatan sosial dan kekuatan-kekuatan lainnya yang berada di luar bidang hukum. Kalau seorang ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka seorang ahli ilmu politik lebih cenderung untuk, di samping menganggap negara sebagai *system of controls*, memandang negara sebagai suatu asosiasi, atau sekelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Dalam masyarakat terdapat banyak asosiasi, tetapi perbedaan antara negara dan asosiasi lainnya ialah bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengendalikan masyarakat (*agent of social control*) memakai kekerasan fisik. Selain itu ilmu hukum sifatnya normatif dan selalu mencoba mencari unsur keadilan. Aliran ini kuat sekali dalam kupasan-kupasan mengenai Negara Hukum (*Rechtsstaat*), yang menekankan bahwa perasaan keadilan (*sense of justice*) merupakan basis dari seluruh sistem norma yang mendasari negara. Sistem hukum adalah dasar legal dari negara; seluruh struktur dan fungsi negara ditetapkan oleh hukum.

Aliran yang meneliti negara dari sudut hukum semata-mata dipelopori oleh Paul Laband (1838-1918) dari Jerman; Kemudian aliran ini diteruskan oleh sarjana asal Austria, Hans Kelsen, pendiri Mazhab Wina. Hans Kelsen yang mengemukakan pandangan yuridis yang paling ekstrim menyamakan negara dengan tata hukum nasional (*national legal order*) dan berpendapat bahwa masalah kenegaraan harus diselesaikan dengan cara normatif. Ia menolak memperhitungkan faktor sosiologis oleh karena mengaburkan analisis yuridis. Ia memperjuangkan suatu teori hukum yang murni (*Reine Rechtslehre*), yaitu teori mengenai pembentukan dan perkembangan hukum secara formal terlepas dari isi materiil atau idiil norma-norma hukum yang bersangkutan. Hans Kelsen menganggap negara sebagai suatu badan hukum atau *Rechtspersoon* (*juristic person*), seperti misalnya suatu

Perseroan Terbatas (PT). Dalam definisi Hans Kelsen suatu badan hukum adalah: "Sekelompok orang yang oleh hukum diperlakukan sebagai suatu kesatuan, yaitu sebagai suatu pribadi (*person*) yang mempunyai hak dan kewajiban, misalnya saja suatu badan hukum boleh mempunyai , menjual atau membeli rumah, boleh menghadapkan pihak lain ke muka hakim, dan pada gilirannya ia dapat dihadapkan ke muka hakim oleh pihak lain. (Hens kelsen, 1961:181-191).

Perbedaan antara negara sebagai badan hukum dan badan-badan hukum lainnya ialah bahwa negara adalah badan hukum tertinggi yang mempunyai sifat mengatur dan menerbitkan. Ini berarti bahwa tata tertib yang diselenggarakan olehnya bersifat normatif yakni sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan sebagai patokan. Di samping pandangan yang ekstrim yuridis ada juga sarjana hukum yang tidak apriori menolak faktor-faktor sosial. George Jellink (1815-1911) yang sering disebut Bapak Ilmu Negara juga mendasarkan pandangannya atas dasar yuridis, tetapi di samping itu dia memandang perlu bahasan sosiologis. Ia mengemukakan teori Dua Sisi (*Zweiseiten Theorie*) bahwa negara perlu dibahas dari dua sudut yaitu sudut yuridis (*Allgemeine Staatsrechtslehre*) dan sudut kemasyarakatan (*Allgemeine Soziale Staatslehre*).

Sudut Kemasyarakatan ini oleh Jellinek tidak begitu diperkembangkan, pada masa itu (akhir abad ke-19) sosiologi masih sangat muda usianya dan pengaruhnya atas ilmu-ilmu pengetahuan lainnya masih sangat terbatas. Seorang tokoh ilmu negara yang lebih modern ialah Hermann Heller (*Mazhab Berlin*) yang kemudian sangat terpengaruh oleh aliran fikiran Anglo-Saxon, mengecam bahasan yang ekstrem yuridis dari Kelsen dan menamakannya Ilmu Negara tanpa negara (*Staatslehre ohne Staat*). Ia sendiri sangat mementingkan bahasan yang realistis dan menganggap negara sebagai organisasi kekuasaan. Seperti telah diemukakan di atas, pandangan yang ekstrem yuridis terlalu sempit dan kurang memuaskan untuk menganalisis negara, teristimewa negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena mendasar-

kan pandangannya atas suatu masyarakat yang sudah teratur, yang homogen sifatnya dan yang sudah berjalan beberapa lama. Hanya dalam masyarakat yang tidak ada perbedaan yang mencolok antara golongan-golongan dan kelas-kelas sosial di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, seperti di Negara-negara Eropa Barat pada masa sebelum Perang Dunia II, dapat timbul anggapan bahwa negara merupakan penjelmaan dari suatu orde yang semata-mata bersifat hukum.

Mengenai perbedaan antara ilmu politik dan ilmu negara, ada bermacam-macam pendapat. Hermann Heller telah menyimpulkan berbagai pendapat dalam *Encyclopaedia of the Social Sciences*:

- a) Ada sarjana yang menganggap ilmu politik sebagai suatu ilmu pengetahuan yang praktis, yang ingin membahas keadaan sesuai kenyataan (*realistic*), sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan yang teoritis yang sangat mementingkan segi normatif (normatif berarti memenuhi norma-norma dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan). Menurut Hermann Heller, perbedaan ini hanya perbedaan tekanan saja, sebab ilmu politik tidak dapat menjauhkan diri dari teori, tetapi juga memerhatikan segi normatif, sekalipun tidak sedalam ilmu negara.
- b) Ada golongan sarjana yang menganggap bahwa ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, yaitu proses-proses kegiatan dan aktivitas negara; perubahan negara yang terus-menerus yang disebabkan golongan-golongan yang memperjuangkan kekuasaan. Subjek ilmu politik ialah gerakan kekuatan di belakang evolusi yang terus-menerus itu. Sebaliknya, oleh sarjana-sarjana ini ilmu negara dianggap lebih mementingkan segi-segi statis dari negara, seolah-olah negara adalah beku dan membatasi diri pada penelitian lembaga kenegaraan yang resmi.
- c) Dianggap bahwa ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya, tetapi ilmu politik dianggap lebih konkrit dan lebih mendekati realitas.

- d) Perbedaan yang praktis ialah bahwa ilmu negara lebih mendapat perhatian dari ahli hukum, sedangkan ahli sejarah dan ahli sosiologi lebih tertarik kepada ilmu politik.(Herman heller, 1959:209-223)

BAB. V

UNSUR-UNSUR NEGARA SEBAGAI KONSEP POLITIK

A. Negara Kearah Politik

Negara menurut konsep ilmu politik? Pertanyaan tersebut perlu kiranya sebuah jawaban yang sistematis dan jelas, sebab kajian ilmu politik ada kaitannya dengan negara, dalam bagian ini tidak akan diberikan suatu definisi negara sebagai idea. (H.R.G. Greaves, 1958:1). Lebih diutamakan analisa dari pengertian negara daripada pendefinisian hal ini menurut hemat kami lebih bermanfaat karena hasil-hasil penganalisaan adalah positif dan lebih kongkrit dari pada pendefinisian. Lagi pula, ilmu politik telah memiliki terlampau banyak pendefinisian negara. Negara dapat dirumuskan dari segi hukum (*normlogisch*) sebagaimana dilakukan oleh Kelsen dan segenap anggota "aliran wina" lainnya: ataupun sebagai konsep sosiologis (*oppenheimer*) : ataupun kombinasi dari segi yuridis dan sosiologis (Jellinek dengan "*zwei seitenlhre*" nya) dan Prof. Nawiasky malahan merumuskan negara baik sebagai idea (*der staat als idee*) maupun sebagai pengetahuan sosial (*soziale tatsachee*) dan sebagai pengertian hukum (*rechts-begriff*). Prof. Nawiasky mengemukakan ajaran "*tiga segi*" dari negara. (*Drei Seitenlehre* Hans Nawiasky; 1945).

Memang benar bahwa pendefinisian negara tidak sesulit pendefinisian "hukum" misalnya, namun ia juga cukup sulit, beraneka ragam, definisi yang satu berbeda daripada yang lain, seperti siang dan malam. Hal ini mungkin menimbulkan rasa keanehan dan tidak dapat dimengerti. Kalimat pertama dari buku Laski "*An Introduction to Politics*", yang menyatakan bahwa tiap penduduk dunia pada masa ini adalah warga negara dari suatu negara. (L. E. Hakim dan Sanjoto, 1954). Akan menambah keaneh-

an dan perasaan tidak mengerti itu. Di samping itu, hampir semua wilayah di dunia ini takluk pada kekuasaan salah satu diantara seratus atau lebih. Kini tidak begitu mudah untuk menemukan suatu *terra nullius*, tanah-tanah yang tidak bertuan. Kita semua hidup bernegara. Mungkin tidak berlebih-lebihan jika dikatakan bahwa dimana ada manusia, disitu terdapat negara. Dan mungkin juga ada benarnya, jika dikatakan bahwa manusia bernegara adalah manusia yang beradab. Kita memandang negara sebagai perlengkapan mutlak dari kehidupan yang beradab di dunia. Di bawah naungan negara, kita mengembangkan dan memajukan kebudayaan serta peradaban. Dalam abad ini manusia mempersonifikasi negaranya. Negara itu dipandang sebagai bagian eksistensinya kita di dunia ini, sebagai bagian pribadinya sendiri, tidak lebih kuat atau lemah, baik atau buruk daripada keseluruhan kekuatan dan kelemahan, kebaikan dan keburukan daripada individu-individu yang menjadi warga negara itu.

Oleh karena itu, negara janganlah sekali-kali diobjektifir sebagai kebesaran tersendiri dengan kepribadian dan kehidupan tersendiri. Memperlengkapi negara dengan atribut-atribut obyektif yang terlepas dari dan berbeda dari pada atribut yang dimiliki oleh rakyat seluruhnya dapat menyebabkan pendewaan negara sebagai "*das irdische Gottheit*" atau sebagai "*der Gang Gottes in dem Welt*". Hasil daripada *apotheose* seperti itu adalah bahwa manusia sebagai hamba negara, makhluk-makhluk yang tidak berarti yang tidak mempunyai kehidupan sendiri di luar negara. Individu baru merupakan "manusia" dalam arti yang sempurna apabila menjadi warga dari suatu negara.

B. Unsur-Unsur Negara

Menurut Oppenheim-Lauterpacht, unsur-unsur negara adalah: a). Unsur pembentuk negara (Konstitutif): wilayah/ daerah, rakyat, pemerintah yang berdaulat, b). Unsur Deklaratif: pengakuan oleh negara lain, untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Wilayah/ Daerah

Menurut Oppenheim dalam buku *international law*, seperti dikutip oleh Muchtar Kusumatmadja dan Etty R. Agoes menerangkan bahwa tanpa adanya wilayah atau batas-batas tertentu, suatu negara tidak akan dianggap segala kedaulatannya dan eksistensinya. (Muchtar Kusumatmadja dan Etty R. Agoes, 2003: 161). Wilayah daratan ada di permukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Artinya, semua kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dalam batas-batas negara adalah hak sepenuhnya negara pemilik wilayah. Batas-batas wilayah daratan suatu negara dapat berupa: a). Batas alam, misalnya: sungai, danau, pegunungan, lembah, b). Batas buatan, misalnya: pagar tembok, pagar kawat berduri, parit, c). Batas menurut ilmu alam: berupa garis lintang dan garis bujur peta bumi. Lautan yang merupakan wilayah suatu negara disebut laut teritorial negara itu, sedangkan laut di luarnya disebut laut terbuka (laut bebas, *mare liberum*). Ada dua konsepsi pokok tentang laut, yaitu: 1) *Res Nullius*, yang menyatakan bahwa laut tidak ada pemiliknya, sehingga dapat diambil/ dimiliki oleh setiap negara; 2) *Res Communis*, yang menyatakan bahwa laut adalah milik bersama masyarakat dunia dan karenanya tidak dapat diambil/ dimiliki oleh setiap negara. Tidak ada ketentuan dalam hukum internasional yang menyeragamkan lebar laut teritorial setiap negara. Kebanyakan negara secara sepihak menentukan sendiri wilayah lautnya. Pada umumnya dianut tiga (3) mil laut (\pm 5,5 km) seperti Kanada dan Australia. Tetapi ada pula yang menentukan batas 12 mil laut (Chili dan Indonesia), bahkan 200 mil laut (El Salvador). Batas laut Indonesia sejauh 12 mil laut diumumkan kepada masyarakat internasional melalui Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957.

Pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay (Jamaica), ditandatangani traktat multilateral yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan lautan, misalnya: permukaan dan dasar laut, aspek ekonomi, perdagangan, hukum, militer dan lingkungan hidup. Traktat tersebut ditandatangani 119 delegasi

peserta yang terdiri dari 117 negara dan dua organisasi kebangsaan. Tentang batas lautan ditetapkan sebagai berikut: a). Batas laut territorial. Setiap negara berdaulat atas lautan teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis lurus yang ditarik dari pantai, b). Batas zona bersebelahan. Di luar batas laut teritorial sejauh 12 mil laut atau 24 mil dari pantai adalah batas zona bersebelahan. Di dalam wilayah ini negara pantai dapat mengambil tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara, c). Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). ZEE adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil laut diukur dari pantai. Di dalam wilayah ini, negara pantai yang bersangkutan berhak menggali kekayaan laut dan menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di wilayah ini serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya. Negara lain bebas berlayar atau terbang di atas wilayah itu serta bebas pula memasang kabel dan pipa di bawah laut, d). Batas landas benua. Landas benua adalah wilayah lautan suatu negara yang batasnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini negara pantai boleh melakukan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional, e). Udara. Wilayah udara suatu negara ada di atas wilayah daratan dan lautan negara itu.

Kekuasaan atas wilayah udara suatu negara itu pertama kali diatur dalam Perjanjian Paris pada tahun 1919 (dimuat dalam Lembaran Negara Hindia Belanda No.536/1928 dan No.339/1933). Perjanjian Havana pada tahun 1928 yang dihadiri 27 negara menegaskan bahwa setiap negara berkuasa penuh atas udara di wilayahnya. Hanya seizin dan atau menurut perjanjian tertentu, pesawat terbang suatu negara boleh melakukan penerbangan di atas negara lain. Demikian pula Persetujuan Chicago 1944 menentukan bahwa penerbangan internasional melintasi negara tanpa mendarat atau mendarat untuk tujuan transit dapat dilakukan hanya seizin negara yang bersangkutan. Sedangkan Persetujuan Internasional 1967 mengatur tentang angkasa yang tidak bisa dimiliki oleh negara di bawahnya dengan alasan segi

kemanfaatan untuk semua negara dan tujuan perdamaian, e). Wilayah Ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah tempat-tempat yang menurut hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu negara – meskipun tempat itu berada di wilayah negara lain. Termasuk di dalamnya adalah tempat bekerja perwakilan suatu negara, kapal-kapal laut yang berlayar di laut terbuka di bawah suatu bendera negara tertentu. Di wilayah itu pengibaran bendera negara yang bersangkutan diperbolehkan. Demikian pula pemungutan suara warga negara yang sedang berada di negara lain untuk pemilu di negara asalnya. Contoh: di atas kapal (*floating island*) berbendera Indonesia berlaku kekuasaan negara dan undang-undang NKRI.

2. Rakyat

Rakyat (Inggris: *people*; Belanda: *volk*) adalah kumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu masyarakat penghuni suatu negara, meskipun mereka ini mungkin berasal dari keturunan dan memiliki kepercayaan yang berbeda. Selain rakyat, penghuni negara juga disebut bangsa. Para ahli menggunakan istilah rakyat dalam pengertian sosiologis dan bangsa dalam pengertian politis. Rakyat adalah sekelompok manusia yang memiliki suatu kebudayaan yang sama, misalnya memiliki kesamaan bahasa dan adat istiadat. Sedangkan bangsa menurut Ernest Renan “adalah sekelompok manusia yang dipersatukan oleh kesamaan sejarah dan cita-cita”. Atau kumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, meskipun mereka berasal dari keturunan yang berlainan menganut kepercayaan yang berlainan, atau memiliki warna kulit yang berlainan. Hasrat bersatu yang didorong oleh kesamaan sejarah dan cita-cita meningkatkan rakyat menjadi bangsa. Dengan perkataan lain, bangsa adalah rakyat yang berkesadaran membentuk negara. Suatu bangsa tidak selalu terbentuk dari rakyat seketurunan, sebahasa, seagama atau adat istiadat tertentu kendati kesamaan itu besar pengaruhnya dalam proses pembentukan bangsa. Sekadar contoh, bangsa Amerika Serikat sangat hete-

rogen, banyak ras, bahasa dan agama; bangsa Swiss menggunakan tiga bahasa yang sama kuatnya; bangsa Indonesia memiliki ratusan suku, agama, bahasa dan adat istiadat yang berbeda. Secara geopolitis, selain harus memiliki sejarah dan cita-cita yang sama, suatu bangsa juga harus terikat oleh tanah air yang sama.

Ada beberapa pandangan tentang pengertian bangsayaitu 1).Otto Bauer berpendapat bahwa bangsa adalah suatu kesatuan yang terjadi karena persatuan yang telah dijalani rakyat., 2). Kranenburg dalam bukunya "*Allgemeine Staatslehre*" mengaitkan konsepsi bangsa dengan budi pekerti rakyat, 3). Jacobsen dan Lipman dalam buku "*Political Science*" menyatakan bahwa bangsa adalah suatu kesatuan budaya (*cultural unity*), 4). Ernest Renan dalam pidatonya di Universitas Sorbone (Paris) pada tanggal 11 Maret 1882 menyatakan bahwa bangsa adalah satu jiwa atau satu azas kerohanian yang ditimbulkan oleh adanya kemuliaan bersama di masa lampau. Bangsa tumbuh karena adanya solidaritas kesatuan., 5). G.S. Dipondo mengatakan bahwa rakyat hanyalah sebagian kecil dari bangsa, yaitu mereka yang tidak duduk dalam pucuk pimpinan. Sedangkan pengertian bangsa mencakup baik pimpinan maupun rakyat itu sendiri, 6). Padmo Wahyono menggunakan istilah bangsa sebagai unsur negara: bangsa dari suatu negara jika dilihat secara perorangan berarti warga negara.

Adapunistilah yang erat pengertiannya dengan rakyat yaitu a).Rumpun (ras), diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena berciri jasmaniah yang sama, misalnya: warna kulit, warna rambut, bentuk badan, wajah, etc.b).Bangsa (*volks*), diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena kesamaan kebudayaan, misalnya: bahasa, adat/ kebiasaan, agama dan sebagainya, c). Nation (*natie*), diartikan sebagai sekumpulan manusia yang merupakan suatu kesatuan karena memiliki kesatuan politik yang sama. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam negara karena manusialah yang berkepentingan agar organisasi negara dapat berjalan dengan baik. Rakyat suatu negara dibedakan antara: a)

Penduduk dan bukan penduduk; b) Warga negara dan bukan warga negara.

Penduduk ialah mereka yang bertempat tinggal atau berdomisili tetap di dalam wilayah negara. Sedangkan bukan penduduk ialah mereka yang ada di dalam wilayah negara, tetapi tidak bermaksud bertempat tinggal di negara itu. Warga negara ialah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara. Sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing (WNA). Georg Jellinek mengemukakan empat status bangsa, yaitu: 1). Status positif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif negara mengenai perlindungan atas jiwa raga, hak milik, kemerdekaan, dan sebagainya, 2). Status negatif, yaitu status yang menjamin warga negara bahwa negara tidak ikut campur terhadap hak-hak azasi (hak-hak privat) warga negaranya, 3). Status aktif, yaitu status yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan, misalnya melalui hak pilih (aktif: memilih, pasif: dipilih), 4). Status pasif, yaitu status yang memberikan kewajiban kepada setiap warga negara untuk taat dan tunduk kepada negara.

Aristoteles menyebut manusia sebagai *zoon politicon*, artinya makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya atau makhluk yang suka bermasyarakat. Manusia adalah makhluk individu (perseorangan) sekaligus makhluk sosial. Secara singkat yang disebut masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu. Penyebab manusia selalu hidup bermasyarakat antara lain adalah dorongan kesatuan biologis dalam naluri manusia, yaitu hasrat untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum, hasrat untuk membela diri, hasrat untuk melanjutkan keturunan. Golongan masyarakat antara lain terbentuk karenarasa tertarik kepada (sekelompok) orang lain tertentu, memiliki kegemaran yang sama dengan orang lain, memerlukan bantuan/ kekuatan orang lain, berhubungan darah dengan orang lain; dan memiliki hubungan kerja dengan orang lain. Dengan perkataan lain, aspek-

aspek yang mendorong manusia ke arah kerja sama dengan sesamanya adalah: a). Biologis: manusia ingin tetap hidup dan memertahankan kelangsungan hidupnya yang hanya bisa dicapai dengan bekerja sama dengan sesamanya, b). Psikologis: kesediaan kerja sama untuk menghilangkan kejemuan dan mempertahankan harga diri sebagai anggota pergaulan hidup bersama manusia, c). Ekonomis: kesediaan manusia untuk bekerja sama adalah agar dapat memenuhi dan memuaskan segala macam kebutuhan hidupnya, d). Kultural: manusia sadar bahwa segala usahanya untuk menciptakan sesuatu hanya bisa berhasil dalam kerja sama dengan sesamanya.

Adapun sifat-sifat golongan masyarakat itu pada umumnya dapat dibagi menjadi tiga macam golongan besar, yaitu; a). Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan: perkumpulan keluarga, b). Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan/ pekerjaan: perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat sekerja, perkumpulan sosial, kesenian, olahraga, c). Golongan yang berdasarkan hubungan tujuan/pandangan hidup atau ideologi: partai politik, perkumpulan keagamaan.

3. Bentuk pergaulan hidup masyarakat

Bentuk pergaulan hidup masyarakat yaitu; a) Berdasarkan hubungan yang diciptakan para anggotanya, b). Masyarakat paguyuban (*gemeinschaft*), apabila hubungan itu bersifat kepribadian dan menimbulkan ikatan batin, misalnya rumah tangga, perkumpulan kematian, *etc.*, c). Masyarakat patembayan (*gesellschaft*), apabila hubungan itu bersifat bukan-kepribadian dan bertujuan untuk mencapai keuntungan kebendaan, misalnya firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, *etc.* d). Berdasarkan sifat pembentukannya, yaitu masyarakat yang teratur oleh karena sengaja diatur untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya perkumpulan olahraga, masyarakat yang teratur dan terjadi dengan sendirinya karena adanya kesamaan kepentingan, misalnya para penonton pertandingan sepakbola, masyarakat yang tidak teratur, misalnya para pembaca harian Kompas, e).

Berdasarkan hubungan kekeluargaan: rumah tangga, sanak saudara, suku, bangsa, *etc.* f). Berdasarkan perikehidupan/kebudayaan: 1). Masyarakat primitif dan masyarakat modern, 2). Masyarakat desa dan masyarakat kota, 3). Masyarakat teritorial, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal di suatu daerah, 4). Masyarakat genealogis, yang anggota-anggotanya seketurunan (memiliki hubungan pertalian darah), 5). Masyarakat teritorial-genealogis, yang anggota-anggotanya bertempat tinggal di suatu daerah dan mereka seketurunan.

4. Pemerintah yang berdaulat

Istilah Pemerintah merupakan terjemahan dari kata asing *Government* (Inggris), *Gouvernement* (Prancis) yang berasal dari kata Yunani *κυβερναυ* yang berarti mengemudikan kapal (nahkoda). Dalam arti luas, pemerintah adalah gabungan dari semua badan kenegaraan (eksekutif, legislatif, yudikatif) yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara. Dalam arti sempit, Pemerintah mencakup lembaga eksekutif saja.

Menurut Utrecht, istilah Pemerintah meliputi pengertian yang tidak sama sebagai berikut: a). Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan atau seluruh alat perlengkapan negara dalam arti luas yang meliputi badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. b). Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara (*dhi.* Kepala Negara), c). Pemerintah sebagai badan eksekutif (Presiden bersama menteri-menteri : kabinet).

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari *sovereignty* (Inggris), *souveranete* (Prancis), *sovranus* (Italia) yang semuanya diturunkan dari kata *supremus* (Latin) yang berarti tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasaan yang tertinggi, tidak di bawah kekuasaan lain. Pemerintah yang berdaulat berarti pemerintah yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam negaranya dan tidak berada di bawah kekuasaan pemerintah negara lain. Maka, dikatakan bahwa pemerintah yang berdaulat itu berkuasa ke dalam dan ke luar: a). Kekuasaan ke dalam, berarti bahwa kekua-

saan pemerintah itu dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat dalam negara itu, b). Kekuasaan ke luar, berarti bahwa kekuasaan pemerintah itu dihormati dan diakui oleh negara-negara lain. Jean Bodin (1530-1596), seorang ahli ilmu negara asal Prancis, berpendapat bahwa negara tanpa kekuasaan bukanlah negara. Dialah yang pertama kali menggunakan kata kedaulatan dalam kaitannya dengan negara (aspek internal: kedaulatan ke dalam). Kedaulatan ke dalam adalah kekuasaan tertinggi di dalam negara untuk mengatur fungsinya. Kedaulatan ke luar adalah kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan serta memelihara keutuhan wilayah dan kesatuan bangsa (yang selayaknya dihormati oleh bangsa dan negara lain pula), hak atau wewenang mengatur diri sendiri tanpa pengaruh dan campur tangan asing. Grotius (Hugo de Groot) yang dianggap sebagai bapak hukum internasional memandang kedaulatan dari aspek eksternalnya, kedaulatan ke luar, yaitu kekuasaan mempertahankan kemerdekaan negara terhadap serangan dari negara lain.

Sifat-sifat kedaulatan menurut Jean Bodin: a). Permanen/ abadi, yang berarti kedaulatan tetap ada selama negara masih berdiri., b) Asli, yang berarti bahwa kedaulatan itu tidak berasal adari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Tidak terbagi, yang berarti bahwa kedaulatan itu merupakan satu-satunya yang tertinggi di dalam negara. Tidak terbatas, yang berarti bahwa kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun, karena pembatasan berarti menghilangkan ciri kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi. Para ahli hukum sesudahnya menambahkan satu sifat lagi, yaitu tunggal, yang berarti bahwa hanya negaralah pemegang kekuasaan tertinggi. Macam-macam teori kedaulatanyaitu 1). Teori Kedaulatan Tuhan. Teori ini merupakan teori kedaulatan yang pertama dalam sejarah, mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (*Causa Prima*). Menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini

umumnya dianut oleh raja-raja yang mengaku sebagai keturunan dewa, misalnya para raja Mesir Kuno, Kaisar Jepang, Kaisar China, Raja Belanda (*Bidde Gratec Gods*, kehendak Tuhan), Raja Ethiopia (*Haile Selasi*, Singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan). Demikian pula dianut oleh para raja Jawa zaman Hindu yang menganggap diri mereka sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ken Arok bahkan menganggap dirinya sebagai titisan Brahmana, Wisnu, dan Syiwa sekaligus.

5. Pengakuan oleh negara lain

Pengakuan oleh negara lain didasarkan pada hukum internasional. Pengakuan itu bersifat deklaratif/ evidenter, bukan konstitutif. Proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1776, namun Inggris (yang pernah berkuasa di wilayah AS) baru mengakui kemerdekaan negara itu pada tahun 1783. Adanya pengakuan dari negara lain menjadi tanda bahwa suatu negara baru yang telah memenuhi persyaratan konstitutif diterima sebagai anggota baru dalam pergaulan antarnegara. Dipandang dari sudut hukum internasional, faktor pengakuan sangat penting, yaitu: a). tidak mengasingkan suatu kumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional, b) Menjamin kelanjutan hubungan-hubungan internasional dengan jalan mencegah kekosongan hukum yang merugikan, baik bagi kepentingan-kepentingan individu maupun hubungan antar-negara.

Menurut Oppenheimer, pengakuan oleh negara lain terhadap berdirinya suatu negara semata-mata merupakan syarat konstitutif untuk menjadi *an international person*. Dalam kedudukan itu, keberadaan negara sebagai kenyataan fisik (pengakuan *de facto*) secara formal dapat ditingkatkan kedudukannya menjadi suatu *judicial fact* (pengakuan *de jure*). Pengakuan *de facto* adalah pengakuan menurut kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri dan menjalankan kekuasaan sebagaimana negara berdaulat lainnya. Sedangkan pengakuan *de jure* adalah pengakuan secara hukum bahwa suatu negara telah berdiri dan diakui kedua-

latannya berdasarkan hukum internasional. Perbedaan antara pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure* antara lain adalah: a). Hanya negara atau pemerintah yang diakui secara *de jure* yang dapat mengajukan klaim atas harta benda yang berada dalam wilayah negara yang mengakui, b). Wakil-wakil dari negara yang diakui secara *de facto* secara hukum tidak berhak atas kekebalan-kekebalan dan hak-hak istimewa diplomatik secara penuh, c). Pengakuan *de facto*- karena sifatnya sementara-pada prinsipnya dapat ditarik kembali, d). Apabila suatu negara berdaulat yang diakui secara *de jure* memberikan kemerdekaan kepada suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka itu harus diakui secara *de jure* pula.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Unsur-unsur negara terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945. Pengakuan pertama diberikan oleh Mesir, yaitu pada tanggal 10 Juni 1947. Berturut-turut kemerdekaan Indonesia itu kemudian diakui oleh Lebanon, Arab Saudi, Afghanistan, Syria dan Burma. Pengakuan *de facto* diberikan Belanda kepada Republik Indonesia atas wilayah Jawa, Madura dan Sumatra dalam Perundingan Linggarjati tahun 1947. Sedangkan pengakuan *de jure* diberikan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Pengakuan terhadap negara baru dalam kenyataannya lebih merupakan masalah politik daripada masalah hukum. Artinya, pertimbangan politik akan lebih berpengaruh dalam pemberian pengakuan oleh negara lain. Pengakuan itu merupakan tindakan bebas dari negara lain yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang terorganisasi secara politik, tidak terikat kepada negara lain, berkemampuan menaati kewajiban-kewajiban hukum internasional dalam statusnya sebagai anggota masyarakat internasional.

Menurut Starke, tindakan pemberian pengakuan dapat dilakukan secara tegas (*express*), yaitu pengakuan yang dinyatakan secara resmi berupa nota diplomatik, pesan pribadi kepala negara atau menteri luar negeri, pernyataan parlemen, atau melalui traktat. Pengakuan juga dapat dilakukan secara tidak

tegas (*implied*), yaitu pengakuan yang ditampakkan oleh hubungan tertentu antara negara yang mengakui dengan negara atau pemerintahan baru. Ada dua teori pengakuan yang saling bertentangan: a). Teori Konstitutif, yaitu teori yang menyatakan bahwa hanya tindakan pengakuanlah yang menciptakan status kenegaraan atau yang melengkapi pemerintah baru dengan otoritasnya di lingkungan internasional, b). Teori Deklaratoir atau Evidenter, yaitu teori yang menyatakan bahwa status kenegaraan atau otoritas pemerintah baru telah ada sebelum adanya pengakuan dan status itu tidak bergantung pada pengakuan yang diberikan. Tindakan pengakuan hanyalah pengumuman secara resmi terhadap fakta yang telah ada. Pendukung teori pengakuan antara lain: Brierly, Francois, Fischer, Williams, Erich, Tervooren, Schwarzen Berger, Konvensi Montevideo 1933.

Pelopop teori kedaulatan Tuhan antara lain: Augustinus (354-430), Thomas Aquino (1215-1274), juga F. Hegel (1770-1831) dan F.J. Stahl (1802-1861). Karena berasal dari Tuhan, maka kedaulatan negara bersifat mutlak dan suci. Seluruh rakyat harus setia dan patuh kepada raja yang melaksanakan kekuasaan atas nama dan untuk kemuliaan Tuhan. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan. Maka, raja/ pemerintah selalu benar, tidak mungkin salah.

a) *Teori Kedaulatan Raja*

Abad Pertengahan Teori Kedaulatan Tuhan berkembang menjadi Teori Kedaulatan Raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kekuasaan raja berada di atas konstitusi. Ia bahkan tak perlu menaati hukum moral agama, justru karena "status"-nya sebagai representasi/ wakil Tuhan di dunia. Maka, pada masa itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya.

Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli (1467-1527) melalui karyanya, *Il Principe*. Ia mengajarkan bahwa negara harus dipimpin oleh seorang raja yang berkekuasaan mutlak. Sedangkan Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan

negara memang dipersonifikasikan dalam pribadi raja, namun raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar-bangsa, dan konstitusi kerajaan (*leges imperii*). Di Inggris, teori ini dikembangkan oleh Thomas Hobbes (1588-1679) yang mengajarkan bahwa kekuasaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus.

b) *Teori Kedaulatan Negara*

Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi terletak pada negara. Sumber kedaulatan adalah negara, yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara, diperlukan negara, dan diabdikan kepada kepentingan negara. Demikianlah F. Hegel mengajarkan bahwa terjadinya negara adalah kodrat alam, menurut hukum alam dan hukum Tuhan. Maka kebijakan dan tindakan negara tidak dapat dibatasi hukum. Ajaran Hegel ini dianggap yang paling absolut sepanjang sejarah. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tiran, teristimewa melalui kepala negara yang bertindak sebagai diktator. Pengembangan teori Hegel menyebar di negara-negara komunis. Peletak dasar teori ini antara lain: Jean Bodin (1530-1596), F. Hegel (1770-1831), G. Jellinek (1851-1911), Paul Laband (1879-1958)

c) *Teori Kedaulatan Hukum*

Berdasarkan pemikiran teori ini, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Hukum lah (tertulis maupun tidak tertulis) yang membimbing kekuasaan pemerintahan. Etika normatif negara yang menjadikan hukum sebagai “panglima” mewajibkan penegakan hukum dan penyelenggara negara dibatasi oleh hukum. Pelopor teori Kedaulatan Hukum antara lain: Hugo de Groot, Krabbe, Immanuel Kant dan Leon Duguit.

d) *Teori Kedaulatan Rakyat (Teori Demokrasi)*

Teori ini menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat. Ciri-cirinya adalah: kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat (teori ajaran demokrasi) dan konstitusi harus menjamin hak azasi manusia. Beberapa pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat yaitu; a). J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan itu perwujudan dari kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (*social contract*), b). Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat, c). John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurut dia, perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban azasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan, d). Montesquieu yang membagi kekuasaan negara menjadi: kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif (*Trias Politica*).

BAB. VI

KEPEMIMPINAN WANITADALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN

Bangsa Indonesia, seperti halnya bangsa-bangsa lain di dunia, dalam memasuki millenium ketiga dengan perasaan yang penuh harapan di samping ketidakpastian yang muncul, akibat belum adanya gambaran secara pasti apa yang akan terjadi di era millennium ketiga tersebut. Umat manusia dewasa ini dan di masa depan telah menghadapi berbagai pilihan dan dilemma-dilema, sejauh mana kemudian pilihan-pilihan itu tetap berorientasi pada peningkatan martabat kemanusiaan (Zaini, 1994). Usaha mengantisipasi bentuk dan isi setiap perubahan yang akan terjadi ke depan, maka bangsa Indonesia perlu senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya manusia (*Human resource*) pada umumnya dan khususnya kualitas sumber daya wanita dengan perubahan konsepsi, yang mengandung arti mendefinisikan kembali pembangunan dalam perspektif yang baru. Salah satu perubahan khusus yang terjadi pada posisi kaum wanita terhadap pria menyebabkan masyarakat merasakan suatu transisi dan penyesuaian struktur, Menyangkut perkembangan kedudukan dan identitas diri wanita, untuk dapat turut serta dengan pria dalam menciptakan transformasi yang diciptakan dan untuk turut serta menjadi pelaku pembangunan bangsa (Pengurus Pusat PWI, 1991).

Untuk dapat menjawab tantangan tersebut di atas, maka perlu meningkatkan peran dan kedudukan wanita yang diarahkan pada sasaran untuk meningkatkan kualitas wanita dan terciptanya iklim sosial budaya yang mendukung bagi wanita untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peranannya dalam

berbagai dimensi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Peningkatan peran dan kedudukan wanita, menurut Mustadjar (2000), meningkatkan taraf pendidikan wanita, meningkatnya kualitas sumber daya wanita dalam kaitannya dengan ilmu pengetahuan, meningkatkan derajat kesehatan wanita dan keluarganya, meningkatnya peran ganda wanita dalam mempertinggi harkat dan martabat wanita.

Kebijaksanaan dan strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan tidak selalu memiliki dampak, manfaat dan akibat yang sama terhadap laki-laki dan wanita, pembangunan tidak selamanya bersifat gender neutral, pada umumnya laki-laki dan wanita memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat; laki-laki dan wanita memiliki akses dan kontrol yang tidak sama terhadap berbagai sumber daya dan akibat dari berbagai kebijaksanaan dan strategi pembangunan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap wanita (Pandu, 1996).

Problematisasi dan peranan kaum wanita dari dulu hingga saat ini, menjadi topik menarik dan aktual untuk dianalisis dan diperbincangkan, mengingat masih adanya sikap masyarakat yang menilai hubungan antara pria dan wanita (*gender relationship*) hanya berdasar pertimbangan biologis atau sosial ekonomi semata-mata. Sikap masyarakat tersebut di atas, jelas tidak mendukung pelaksanaan ketetapan politik yang tertuang di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN 1999 Bab V), bahwa perlu meningkatkan kedudukan dan peran wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kebijaksanaan Nasional dengan memperjuangkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dalam pengertian bahwa wanita mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan berbangsa dan segenap kegiatan pembangunan. Walaupun harus diakui bahwa partisipasi dan kesempatan dalam merumuskan dan pengambilan keputusan kebijaksanaan pembangunan, dalam artian mendapat kepercayaan menjadi pemimpin khususnya dalam birokrasi pemerintah masih kurang.

UUD 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2, memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, (BP. 7 Pusat, 1990). Ini berarti bahwa kaum wanita juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berperan langsung dalam birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai pada tingkat manajemen eksekutif puncak.

Menurut Hamka dalam Kumalasari (1991) bahwa kedudukan wanita dalam Islam mendapat jaminan yang tinggi dan mulia, bukan saja orang laki-laki yang memimpin wanita, bahkan wanita juga memimpin laki-laki (*ba'dhum auliyaa-u ba'dhin*). Selanjutnya dikatakan bahwa kaum laki-laki yang beriman dan kaum wanita yang beriman memiliki tugas yang sama kedudukannya dalam "*amar ma'ruf nahyi munkar*" (menegakkan kebenaran dan keadilan, mengokohkan akhlak yang tinggi dan mencegah munkar, yang merusak dan mengacaukan ketenteraman). Pendapat di atas dipertegas dengan makna yang sama oleh Syuhudi (1994) bahwa al-Qur'an sendiri memberi peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum pria untuk melakukan berbagai amal kebajikan dan lebih lanjut dia menyatakan bila wanita memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, serta masyarakat bersedia menerima sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin.

Pandangan ajaran Islam menegaskan bahwa laki-laki dan wanita sama-sama berkewajiban terhadap tugas agamanya, maka kewajiban melaksanakan tugas-tugas kemasyarakatan akan sama pula. Hal tersebut merupakan pemandu untuk mewujudkan wanita-wanita mujahidah, sebagai ibu dan pendidik, wanita berilmu dan menghormati kemanusiaannya, serta dapat berperan aktif mengubah wajah umat dari yang negatif kepada yang positif dan

menunjukkan isyarat akan kebolehan wanita aktif menekuni dunia politik dan pemerintahan.

Mustadjar (2000) mengemukakan kemampuan menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan serta profesionalisme yang dimiliki wanita sebagai keunggulan kompetitif, mereka juga berhak untuk diberi kesempatan menduduki jabatan-jabatan penting dalam masyarakat dan pemerintahan (politik). Ibrahim (1989) menyatakan *internasional council of Women* dalam peringatan 100 tahun usianya menyebutkan bahwa wanita amat menentukan masa depan umat manusia. Oleh karena itu diharapkan dapat ikut lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan di semua tingkatan dalam semua bidang kehidupan. Dipertegas oleh John Naisbit dan Patricia Aburdance (1993), dengan memperlihatkan adanya gelombang perubahan-perubahan besar berupa kecenderungan hadirnya apa yang mereka sebut dasawarsa kepemimpinan wanita, yakni tugas-tugas di bidang bisnis telah berubah, demikian pula dengan tenaga kerjanya dan prinsip pengorganisasian bergeser dari manajemen kepemimpinan yang membuka pintu bagi wanita. Pendapat ini, diperkuat oleh Muliaty (2000) bahwa pergulatan pemikiran seputar problem kepemimpinan wanita dasawarsa terakhir ini semakin marak, meliputi peran konsep kemitraan antara pria dan wanita, senantiasa menjadi agenda perdebatan oleh gerakan-gerakan emansipasi wanita dan gerakan feminisme di tingkat nasional maupun internasional.

Melihat beberapa uraian sebelumnya Nampak adanya dukungan terhadap peluang kaum wanita untuk dapat tampil sebagai pemimpin, baik dalam paradigma kebijaksanaan nasional maupun dalam perspektif keagamaan serta dukungan moral dari para futurolog dalam memberikan gambaran positif peluang masa depan kaum wanita untuk dapat terlihat dalam pengambilan keputusan, atau pemimpin di berbagai bidang kehidupan. Pembangunan nasional ke depan, banyak ditentukan oleh peranan birokrasinya, termasuk peranan wanita sebagai pemimpin dalam birokrasi pemerintahan, baik sebagai pemikir, perencana, pengambilan keputusan maupun sebagai pengawas pembangun-

an. Namun jumlah kaum wanita yang tampil dan mendapatkan kesempatan untuk menduduki tampuk kepemimpinan birokrasi masih sangat kurang, utamanya pada tingkat manajemen eksekutif puncak (Kumalsari, 1994). Kaum wanita dalam melakukan peranannya masih menghadapi banyak tantangan dan keterbatasan disebabkan oleh berbagai hal, adanya sikap masyarakat yang kurang mendukung wanita menjadi pemimpin, belum tercapainya prinsip mitra kesejajaran antara pria dan wanita, minimnya keterampilan, pengalaman kerja dan lainnya.

Tjokrowinoto (1996) mengemukakan beberapa penyebab kaum wanita belum dapat tampil secara maksimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan cenderung menempati posisi terbelakang, penyebabnya adalah: *Pertama*, adanya dikotomi maskulin/feminim peranan manusia sebagai akibat dari determinasi biologis seringkali mengakibatkan proses marginalisasi wanita. *Kedua*, adanya dikotomi peran domestik yang berakar dari *syndroma* bahwa para wanita adalah di rumah pada gilirannya melestarikan pembagian antara fungsi produktif dan fungsi reproduktif antara laki-laki dan wanita. *Ketiga*, adanya konsep “beban kerja ganda” (*double burden*) yang melestarikan wawasan bahwa tugas wanita terutama adalah di rumah sebagai ibu rumah tangga, cenderung mengalami proses aktualisasi potensi wanita secara utuh. *Keempat*, adanya syndrome subordinasi dan peran marginal wanita telah melestarikan bahwa peran dan fungsi wanita dalam masyarakat adalah bersifat sekunder. Selanjutnya masih kuatnya pandangan-pandangan bahwa wanita lebih cocok dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di banding laki-laki, atau pandangan bahwa wanita lebih menggunakan perasaan dari pada rasionya, sehingga wanita tidak cocok dengan bidang-bidang pekerjaan yang keras dan rasional termasuk bidang politik yang dianggap hanya cocok untuk laki-laki. Ini merupakan gambaran mengenai adanya diskriminasi klasik terhadap kaum wanita (Rasdiyanah, 1999).

Faktor lain, nilai-nilai sosial budaya dan agama masyarakat setempat terkadang ikut berpengaruh terhadap keberadaan kaum wanita, hal ini dapat dilihat dalam realitas kehidupan masyarakat, adanya struktur ketidakadilan sosial seperti terjadinya marjinalisasi, subordinasi, pelabelan negatif (*stereotype*) dan peran gender wanita (fakih, 1999). Di sisi lain dapat dilihat pada keberadaan kaum wanita Sulawesi Selatan (Bugis Makassar) yang berhati-hati untuk menjadi pemimpin karena takut dan malu (*siri'*) yang telah membudaya dalam masyarakat dan dalam diri kaum wanita untuk tidak melanggar tata aturan (tradisi dan norma-norma) yang hidup dalam masyarakat. Sedemikian besarnya pengaruh *siri'* dalam diri wanita (Bugis Makassar) sehingga kaum wanita tidak suka menonjolkan dirinya untuk diangkat menjadi pemimpin, bahkan tak kadang menghindari dari jabatan yang disodorkannya (Kumalsari, 1994).

A. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*leadership*" yang berasal dari kata "*to lead*" yang berarti pimpinan (memimpin), yang mempunyai tugas untuk memberi pengarahan dan membimbing bawahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Limer, 1993). Pemahaman terhadap suatu konsep atau definisi tentang suatu objek merupakan langkah awal di dalam kerangka mempelajari, memahami, menganalisa serta menarik kesimpulan terhadap suatu objek tersebut, sekaligus mempermudah seseorang atau kelompok melakukan pengkajian lebih lanjut. Untuk mendapatkan rumusan kepemimpinan, maka akan dikemukakan beberapa definisi kepemimpinan yang disetir oleh Paul Hersay dan Kenneth dalam Wahjosumidjo (1987), yaitu: a). *Leadership is the activity of influencing exercised to strive willingly for group objectives* (George R. Tenry). Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok, b). *Leadership is influencing people to follow In the achievement of a common goal* (Harold

Koontz and Cyril O'Donnel). Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan.

Sumarjan dalam Worang (1983) memberi arti kepemimpinan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar pihak lain tersebut dengan kemauannya bersedia berbuat yang dikehendaki oleh pemimpin. Siagian (1985) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah kemauan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin satuan kerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangsi nyata dalam mencapai tujuan organisasi. Lebih lanjut Siagian (1988), mendefenisikan kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain yang menjadi bawahan seseorang sedemikian rupa sehingga perilaku tersebut menjadi pendorong kuat bagi tindak tanduk positif demi kepentingan organisasi secara keseluruhan. Siagian juga menekankan bahwa kepemimpinan itu selalu bersifat situasional, kondisional, temporal dan spatial.

Davis dan Newstrom (1985) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mendorong dan membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan organisasi formal yang terdiri dari beberapa tingkat, kemampuan mematuhi merupakan salah satu persyaratan kepemimpinan yang baik, sebagai pendukung model kepemimpinan jalur tujuan (*path-goal leadership*), Davis menyatakan bahwa aktivitas kepemimpinan adalah untuk menciptakan lingkungan kerja melalui struktur, dukungan dan imbalan yang membantu para pegawai mencapai tujuan organisasi. Tasmara (1997) mengemukakan bahwa dalam hal kepemimpinan sudah barang tentu ada suatu tujuan tertentu yang akan dicapai sehingga seseorang pemimpin (*leader*) membutuhkan pengikut (*follower*) untuk dapat merealisasikan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan pada beberapa batasan di atas, Nampak bahwa di dalam kepemimpinan terdiri dari tiga unsur penting yaitu, kemampuan mempengaruhi orang lain, kemampuan mengarahkan orang-orang yang dipimpinnya dan kemampuan megarahkan pada tujuan yang telah direncanakan. Sejalan dengan pendapat di atas, Soekanto (1996) mengemukakan bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah kemampuan seseorang (pimpinan atau *leader*) untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Memahami beberapa pengertian kepemimpinan tersebut di atas maka seseorang dapat disebut pemimpin jika dia dapat mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian pengertian kepemimpinan akan timbul di manapun dan kapanpun asalkan memenuhi unsur seperti ada orang yang mampu mempengaruhi, ada orang yang akan dipengaruhi, dan orang yang mempengaruhi memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mengarahkan kepada tercapainya suatu tujuan.

Berbagai teori telah memberikan landasan pemikiran dan konsep kepemimpinan yang menyebutkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh potensi dan faktor lain yang mempengaruhi serta sejauh mana seorang pemimpin tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagai pemimpin. Teori genetis, berpendapat bahwa orang dapat menjadi pemimpin karena sudah ditakdirkan menjadi pemimpin dengan bakat-bakat yang di bawah sejak lahir dan “teori sosial” mengemukakan bahwa kepemimpinan itu bukan ditakdirkan, akan tetapi dibentuk oleh pengaruh lingkungan, maka “teori ekologis” mengakui keduanya, artinya bahwa seorang itu hanya akan bisa menjadi pemimpin yang baik apabila ia pada waktu dilahirkan telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan dan bakat-bakat kepemimpinan mana kemudian dapat dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman-pengalaman yang mendukung untuk itu (Sunundhia dan Widiyanti, 1998).

Berhubungan dengan teori di atas, Soekanto (1996) mengemukakan bahwa munculnya seorang pemimpin merupakan hasil dari suatu proses dinamis yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kelompok, untuk mencapai tujuan sehingga sifat-sifat sebagai prasyarat seorang pemimpin tidaklah sama pada setiap masyarakat. Syarat-syarat ataupun sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dapat dilihat dari pendapat Gerungan (1964) yaitu: 1). *Ability in abstract thinking* (kemampuan berpikir abstrak). Seorang pemimpin haruslah mempunyai kecakapan untuk berpikir abstrak yang lebih tinggi dari rata-rata anggota yang mereka pimpin, 2). *Emosional stability* (kestabilan emosi). Berdasarkan banyak penelitian menunjukkan bahwa pemimpin-pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki emosi yang stabil dan kemampuan mengendalikan diri. 3). *Social perception* (persepsi sosial); kecakapan untuk dapat melihat dan memahami perasaan-perasaan, sikap-sikap dan kebutuhan-kebutuhan anggota-anggota yang dipimpinya.

Tasmara (1997) menjelaskan bahwa: *Social perception* ialah kecakapan untuk cepat melihat dan memahami akan perasaan-perasaan, sikap-sikap dan kebutuhan-kebutuhan anggota-anggota lainnya yang sekelompok. *Ability in abstract thinking* ialah kemampuan intelegensi yang cukup tinggi, mampu menganalisa persoalan dan mengambil keputusan dengan cepat dan tepat demi kepentingan kelompoknya. *Emotional stability* (keseimbangan perasaan) ialah suatu situasi emosi di mana memiliki sifat yang cukup tangguh dan konsisten dalam menghadapi berbagai persoalan. Kritik maupun situasi-situasi yang rumit (sifat sabar dan istiqamah). Tasmara menegaskan bahwa *emotional stability* merupakan sifat yang tidak dipisahkan dari seorang pemimpin, sebab hanya dengan keseimbangan emosilah, keputusan-keputusan yang diambil akan tetap matang dan tidak dipengaruhi oleh warna subyektif aktif akibat adanya depresi dan kekalutan perasaan.

Menurut Asta Brata dalam Soekanto (1996) bahwa kepemimpinan itu, dapat berhasil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1). *Indra-brata*, dapat memberikan kesenangan dalam jasmani, 2). *Yama-brata*, yang menunjukkan pada keahlian dan kepastian hukum, 3). *Surya-brata*, yang menerangkan bawahan dengan mengajak mereka untuk bekerja persuasif, 4). *Caci-brata*, yang memberikan kesenangan rohaniah, 5). *Bayu-brata*, yang menunjukkan kepada pendidikan dan dapat merasakan kesukaran-kesukaran pengikut-pengikutnya, 6). *Dharma-brata*, menunjuk kepada suatu sikap yang dapat dihormati, 7). *Agni-brata*, sifat memberikan semangat kepada anak buah, 8). *Paca-brata*, yaitu menunjukkan kelebihan dalam ilmu pengetahuan, kepandaian dan keterampilan.

De Beuk dalam Macdonald (1999) memberikan daftar beberapa syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik yaitu: a). Pemimpin yang baik harus memfasilitasi, menciptakan momentum dan kondisi yang memungkinkan pertukaran informasi serta peluang untuk diskusi dan membuat keputusan, b). Pemimpin harus menjaga dan mengendalikan, artinya kemampuan memastikan dalam pengambilan keputusan dan bagaimana keputusan itu dapat dijalankan dalam praktek, c). Pemimpin harus memiliki kemampuan merangsang dan memberikan dorongan kepada kelompoknya dalam organisasi, d). Pemimpin harus mendelegasikan kewenangannya sebaik mungkin kepada orang yang terlibat didalamnya, e). Pemimpin yang baik harus memiliki kemampuan mengambil kewenangan untuk menentukan keputusan bila dirasa perlu.

Selanjutnya, Tasmara (1997) mengemukakan bahwa dalam perspektif ajaran Islam seorang pemimpin harus memenuhi kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut: 1). Dia mampu mendayagunakan waktu secara efisien dan efektif (*wal ashri*), 2). Dia memiliki kesadaran yang tinggi atas posisi dirinya sebagai manusia dalam hubungannya dengan Tuhan-Nya dan hubungannya dengan sesama manusia (*Innal Insana Lafii Khusrin*), 3). Dia memiliki kecintaan serta keyakinan yang mendalam atas

missionya (*Amanuu*), 4). Dia mampu menyatakan dan mewujudkan missionya tersebut di dalam bentuk *action* (*Amalussaliha*), 5). Dia memihak akan pengembangan ilmu dan penegakan kebenaran, serta mampu mengkomunikasikan kebenaran tersebut (*watawa Shaubil haqqi*), 6). Dia memiliki kesabaran yang tinggi (*Watawa Shaubisshabri*).

Beberapa kemampuan tambahan dapat menunjang keberhasilan dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan bagi seorang pemimpin, dikemukakan oleh Floyd Ruch dalam Tasmara (1997) yaitu *Structuring the situation*, *Controlling group behavior*, *Spokesman of the group*, *Structuring the situation* dapat dipahami bahwa seorang pemimpin harus mampu mengambil kesimpulan-kesimpulan terhadap situasi rumit yang dihadapi kelompoknya, artinya dalam situasi yang rumit sekalipun pemimpin harus mampu memberikan suatu kesimpulan yang dapat diterima oleh anggota kelompoknya.

Controlling group behaviour, artinya seorang pemimpin harus mampu menilai dan bahkan mengarahkan sikap dan tingkah laku anggota kelompoknya sesuai dengan harapan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. *Spokesman of the group*, artinya dalam situasi tertentu pemimpin harus mampu tampil kedepan berbicara atas nama kelompoknya, dalam hal ini seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan mengkomunikasikan rencana atau keinginannya sehingga mampu diterima oleh anggota yang dipimpinnya. Pendapat para ahli tentang keberadaan seorang pemimpin nampaknya memiliki pandangan beragam dari sudut pandangan yang berbeda, namun dapat dipahami bahwa munculnya seorang pimpinan pada umumnya merupakan suatu proses yang dinamis dan didukung berbagai kemampuan dimiliki sebagai prasyarat untuk dapat tampil sebagai pemimpin, baik kemampuan yang bersifat abstrak maupun kemampuan skill, professional.

Syarat-syarat yang lebih bersifat operasional tentang kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dikemukakan pula oleh Mulyati dalam Limer, dkk (1993), yaitu: (1)

Kemampuan mengambil keputusan, (2) Memberi pengarahan dalam pembagian tugas, (3) Menguasai materi dalam penggunaan sarana penunjang kegiatan, (4) Mampu mengawasi, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan, (5) Mampu memberi bimbingan dan supervise, (6) dan mampu member koreksi.

Pendapat para ahli tentang kriteria-kriteria, atau syarat-syarat seorang pemimpin, maka dapat dikelompokkan meliputi: kemampuan berpikir abstrak dalam arti luas, dan kestabilan emosional serta ditambah dengan kemampuan yang lebih operasional, yaitu perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengawasan, profesionalisme, pengambilan keputusan. Menurut Bird dalam Cahyono (1984) dalam suatu kesimpulan tentang adanya empat syarat yang bersifat umum dari kepemimpinan yakni, kemampuan intelegensi, prakarsa, keterbukaan dan *sense of humor*.

B. Kepemimpinan Wanita

Poesposoetjipto (1996) menyebutkan hasil penelitian perempuan dalam organisasi bisnis yang pernah dilakukan *asian institute of management* di Indonesia pada tahun 1985-1987, atas sponsor CIDA, bahwa hasil penelitian menunjukkan masih kurangnya perempuan Indonesia yang berhasil menjadi manajer (pemimpin) dibandingkan dengan pria namun dari segi keterampilan manajerial, manajerial perempuan Indonesia mempunyai ciri kepemimpinan yang berorientasi kepada manusia dan dalam mengambil keputusan, ia cenderung berhati-hati, senantiasa berdasarkan dengan fakta yang relevan dengan permasalahan yang ada bahkan sedapat mungkin keputusan itu, tidak mengecewakan atau membuat sakit seseorang (gaya manajemen yang murah hati atau *benevolent*).

Alice Sargent dalam Mulyati (2000) mengemukakan ciri khas manajer atau pemimpin yang sukses ialah mereka yang memiliki percaya diri yang besar dan sanggup menghargai orang lain. Oleh sebab itu, manajer atau pemimpin yang sukses mereka yang memiliki sifat-sifat seperti sabar, lembut tetapi tegas, luwes

dan manusiawi, di mana sifat-sifat ini banyak berhubungan dengan naluri kewanitaan sedangkan sifat tegas, rasional, banyak bertalian dengan sifat pria. Addams dalam artikel berjudul *American Sargent* dalam Mulyati (2000) menegaskan bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan sebuah masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai kewanitaan akan lebih produktif, damai dan adil dengan pertimbangan bahwa secara biologis lebih unggul karena insting keibuan mereka (Ollen Burger dan Moore, 1996). Gornick (1988) menyatakan bahwa seorang wanita tumbuh serta menyadari bahwa berdasarkan temperamen dan bakat, wanita yang berpotensi ilmunan, maka wanitapun menjadi seorang ilmuwan. Hasil wawancara Gornick (1998) dengan banyak ilmuwan (baik wanita maupun pria) menyatakan bahwa wanita dan pria tidak adanya bedanya, baik dalam cara mengorganisasikan pikirannya, mengajukan pertanyaan sains, maupun menerapkan bermacam-macam penyelidikan. Pemikiran-pemikiran tersebut di atas, merupakan dorongan yang kuat bagi kaum wanita untuk dapat tampil sebagai pemimpin, baik sebagai pemimpin diri sendiri, keluarga dan masyarakat maupun pemimpin Negara. Memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada kesempatan menjadi pemimpin, hal ini dianggap penting karena pada dasarnya bahwa wanita adalah makhluk rasional juga (Fakih, 1999). Lebih lanjut Stuner dalam Limer, dkk (1993) mengemukakan bahwa beberapa hasil penelitian akhir-akhir ini menunjukkan bahwa bilamana wanita disertai tugas sebagai pemimpin, mereka akan sama efektifnya dengan pemimpin pria.

Indonesia pada zaman pemerintahan kolonialisme dan imperialisme, telah banyak wanita yang menduduki singgasana kerajaan seperti dicatat oleh Subadio dan Ihromi (1986) misalnya mencatat bahwa di Pontianak (negeri gendis) pada tahun 1824 telah memerintah seorang raja wanita yaitu Dayang Bomi. Juga di Aceh sepeninggal Sultan Iskandar Muda digantikan oleh putrinya dengan nama Sultan Tajul'alam Tsafiyahuddin. Sulawesi selatan juga telah banyak raja wanita memerintah, malahan sekaligus memimpin pasukan melawan Belanda, seperti kerajaan Balanipa

Mandar di POLMAS di bawah pemerintahan Maraddia (Ratu) H. Andi Deppu sebagai raja ke-52 dan H.A. Syahribulan (Puang Mandag) sebagai raja ke-53 (Raja terakhir), dan kerajaan di daerah Sulawesi Selatan lainnya (Kumalasari, 1991). Berdasarkan kenyataan sejak zaman lampau di Sulawesi Selatan seorang wanita Bugis-Makassar telah memegang beberapa tugas pemerintahan. Kedudukan wanita Bugis-Makassar dapat dilihat betapa dihargai oleh masyarakatnya sesuai kenyataan dan hukum adat yang berlaku. Mangemba dalam Kumalasari (1991) mengungkapkan bahwa hak dan kewajiban seorang wanita yang “*materruk*” (pandai) dan “*malampek nawa-nawa*” (cerdik) terdiri atas 4 (empat) perkara yaitu:

- a) *Mula-mulanna*, menjadi anak *indok* anak *tettongridecengge tudang ripaccingge* (ia berkewajiban menjadi seorang ibu utama yang saleh dan suci).
- b) *Maduanna*, *mancaji pattaro tettong rilempuk-e punnai cirinna enrenge lampek nawa-nawa me-wali sibaliperrick woroanena sappak laleng atuwong* (ia berkewajiban menjadi seorang benda-harawan yang jujur, hemat dan cerdik membantu suami sepenuhnya dalam perjuangan hidup).
- c) *Matellunna*, *mancaji rapok riatutuian siri’na enrenge sangkawanana enrenge bonapatinna ri tomatuanna, ri selessureng ma-coana iarega ri woroanena* (ia berhak menjadi tanggungan berat, mendapat jaminan penuh untuk ketinggian martabatnya dan atas kesucian kehormatannya dari orang tuanya, saudara tua atau suami).
- d) *Maepakna*, *wedditoi situnreng puang adek-e jemba tebbek-e makka-l mancaji dulung papole upek aselewangeng* (ia berhak pula diangkat oleh rakyat dengan persetujuan Majelis adat sebagai seorang “pelopor” untuk mencapai keamanan dan kemakmuran).

Ditinjau dari segi persaingan, tampaknya sebagian besar kaum wanita keinginan bersaing untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi yakni pada birokrasi pemerintahan, manajemen eksekutif puncak atau jabatan-jabatan penting lainnya kurang

atau sangat sedikit. Hal ini berkaitan dengan berbagai faktor luar seperti adanya kesan di masyarakat bahwa wanita kurang cocok jadi pemimpin maupun faktor kelemahan lainnya yang dimiliki kaum wanita. Dikemukakan dalam "*Woman as a manager*" bahwa ada tiga hal yang merupakan rintangan bagi wanita sebagai pemimpin yaitu; 1). Kurangnya wanita yang terlatih baik di dalam maupun di luar organisasi untuk mengisi potensi-potensi kepegawaian, 2). Wanita sendiri kurang menyadari potensi kepemimpinannya, sehingga ia tidak termotivasi bersaing untuk menjadi pemimpin, 3). Masih adanya persepsi yang negatif terhadap kepemimpinan wanita baik oleh wanita sendiri maupun pria dalam organisasi. Sedangkan menurut Notopura (1974) melihat bahwa masih banyaknya pandangan negatif terhadap wanita yang bekerja di luar rumah yaitu: a). Adanya persepsi sebagian masyarakat yang memandang bahwa wanita yang bekerja dianggap memiliki status yang rendah, b). Adanya prasangka negatif dari masyarakat yang menyangkut hubungan kerja wanita dan pria atau sebaliknya, c). Adanya kenyataan diantara sesama tenaga kerja (karyawan pria) yang sering menganggap dirinya lebih unggul dan lebih kapabel dari para karyawan.

Bila dianalisa kelebihan dan kelemahan yang dimiliki kaum wanita di atas dan khususnya mengenai hambatan kaum wanita untuk dapat tampil sebagai pemimpin, menurut anggapan paham fenisme liberal juga disebabkan oleh kelemahan mereka sendiri. Dengan kata lain, jika sistem sudah memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan wanita tidak mampu berkompetisi dan kalah, yang perlu disalahkan adalah kaum wanita itu sendiri (fakih, 1999). Mengsikapi setiap masalah yang ada pada kehidupan kaum wanita dalam kaitannya untuk dapat berperan aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan, menurut Mustadjar (2000), bahwa dewasa ini fokus penanganan kemajuan wanita tidak semata-mata ditujukan kepada wanita saja, tetapi lebih ditujukan kepada hubungan sosial dan hubungan peranan antara laki-laki dan wanita dengan pendekatan gender. Lebih lanjut Mustadjar (2000)

mengemukakan bahwa wanita sebagai kelompok jender berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara dengan laki-laki. Faktor-faktor yang mendukung upaya peningkatan peran wanita melalui konsep jenderisasi yakni semakin mapannya kehendak politik untuk meningkatkan peranan wanita setara dengan laki-laki sebagai jender ditandai dengan masuknya dalam GBHN sejak 1976 hingga GBHN 1999, perhatian aparat pemerintah terhadap peranan wanita semakin tinggi, pengertian dan kesadaran masyarakat tentang wanita sebagai sumber daya manusia semakin mapan, wawasan berpikir bagi wanita semakin luas karena pengaruh kemajuan iptek, adanya gelombang perubahan dari masyarakat industri ke masyarakat informasi yang lebih bersahabat dengan potensi perempuan. Di samping itu perlu diantisipasi faktor-faktor yang menghambat seperti hambatan sosiologis, sosial budaya, psikologis, fisik, teologis, sistem kemasyarakatan, dan hambatan historis (Ibrahim, 1995 dan Rasdiyanah, 1999). Dengan demikian wanita mempunyai keunggulan-keunggulan maupun sifat-sifatnya yang dapat menunjang dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kepemimpinan di samping keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Artinya wanita juga memiliki kemampuan menjadi pemimpin yang baik sebagaimana juga yang dimiliki kaum pria.

C. Realitas Hakikat Sikap

Kata sikap berasal dari bahasa Inggris yakni kata *attitude* yang berarti keadaan sikap secara mental yang bersifat subyektif untuk melakukan sesuatu kegiatan. Suatu kecenderungan untuk bereaksi dengan cara tertentu terhadap sesuatu perangsang atau situasi yang dihadapi. Menurut Morgan dalam Soelaiman (1987) mendefenisikan sikap adalah kecenderungan untuk berespons, baik secara positif ataupun negatif, terhadap orang, objek, atau situasi. Lebih lanjut Morgan menjelaskan bahwa sikap terkandung suatu penilaian emosional yang dapat berupa suka, tidak suka, senang, sedih, cinta, benci dan sebagainya, karena dalam sikap ada suatu "kecenderungan berespons", bila bertemu suatu

objek. Ellis dalam Purwanto (1986) mengemukakan tentang sikap sebagai berikut: *Attitude involve some knowledge of situation. However, the essential aspect of the attitude is found in the fact that some characteristic feeling or emotion is experienced, and as we would accordingly expect, some definite tendency to action is associated.*

Ellis menekankan bahwa faktor yang memegang peranan penting di dalam sikap ialah faktor perasaan atau emosi dan faktor reaksi atau respons (kecenderungan) untuk bereaksi. Dimana sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (*like*) dan tidak senang (*dislike*) menuntut dan melaksanakannya atau menghindari sesuatu. Pendapat Ellis tersebut menunjukkan bahwa di dalam sikap itu sendiri memiliki muatan tentang adanya pengalaman hidup terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, seseorang memanifestasikan sikapnya dalam menolak atau menerima, senang atau tidak senang terhadap sesuatu objek, hal ini sejalan dengan pendapat Berkowit (1972), mengatakan bahwa sikap adalah merupakan suatu respon evaluatif, yakni bentuk respon yang dinyatakan sebagai sikap itu sendiri oleh proses evaluasi dalam diri individu yang memberi kesimpulan nilai terhadap stimulus dalam bentuk positif atau negatif, senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, yang kemudian mengkristal sebagai potensi relasi terhadap objek sikap.

Koentjaraningrat dalam Husnawati (1973) mengemukakan bahwa sikap adalah keadaan mental di dalam jiwa dari seseorang individu untuk bereaksi terhadap situasi lingkungan sosial, ekonomi dan budayanya, sikap berada pada diri seseorang individu dan dipengaruhi oleh sistem nilai budaya dan norma. Sedangkan Esier (1980), mendefenisikan sikap sebagai gagasan yang mencakup emosi, kepercayaan, prasangka, apresiasi, predisposisi, dan kesiapan untuk bertindak. Demikian pula dengan pendapat Anastasi (1976) mengemukakan bahwa istilah sikap sering diartikan sebagai kecenderungan menyenangkan atau tidak menyenangkan sekumpulan stimulus yang dihadapkan pada individu. Di mana setiap individu pada suatu waktu menerima

bermacam-macam stimulus dan stimulus yang diterima oleh setiap individu haruslah kuat untuk dapat mempresepsikan secara sadar setiap objek sikap (Walgito, 1994).

Memahami beberapa pengertian sikap di atas menunjukkan adanya perbedaan pendapat diantara para ahli dalam memberikan batasan, namun dapat dipahami bahwa para ahli memiliki kesamaan dalam melihat sikap sebagai salah satu aspek yang turut mewarnai kepribadian seseorang di dalam merespon setiap stimulus, di mana sikap ini dibentuk oleh adanya pengalaman hidup setiap individu terhadap lingkungan sekitarnya. Pernyataan di atas, sesuai yang dikemukakan oleh Gordon Allport dalam Azwer (1998) sikap adalah semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap sesuatu objek dengan cara tertentu, dalam hal ini adalah suatu kecenderungan potensi atau kemampuan untuk bereaksi apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Lebih lanjut azwer (1998), mengemukakan bahwa ada yang dikenal dengan sikap sosial yakni sikap yang terbentuk dari adanya interaksi sosial yang dialami oleh individu. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan saling mempengaruhi antara individu dan saling mempengaruhi pola perilaku masing-masing individu atau kelompok sebagai anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap adalah keadaan mental dalam jiwa seseorang dalam melaksanakan suatu kecenderungan untuk bertindak atau bereaksi terhadap stimulus atau objek tertentu yang menghasilkan respon positif (senang atau suka) atau respon negatif (tidak senang atau tidak suka) terhadap suatu objek. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka sikap masyarakat adalah kecenderungan masyarakat dalam memberikan penilaian dalam bertindak atau bereaksi dengan respon positif (senang, suka) atau respon negatif (tidak senang, tidak suka) terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan.

Uraian sebelumnya mengungkapkan bahwa, pengertian *attitude* dapat diterjemahkan dengan sikap terhadap objek tertentu yang dapat merupakan sikap pandangan atau sikap yang terkait dengan perasaan, di mana sikap tersebut merupakan kecenderungan untuk menilai atau bertindak sesuai dengan objek yang disikapi (Gerungan, 1964). Sikap tidak lahir dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat di dalam individu yang menyebabkan tersimpulnya suatu objek tertentu. Faktor-faktor tersebut menurut Bloom dalam Nurmaida (1998) yaitu: 1). Faktor kognitif yakni terdiri dari pengetahuan, ingatan, pemahaman, konsep, penjelasan atau fakta, 2). Faktor afektif, yakni terdiri dari respon, karakter, kepribadian, menghargai, menganggap dan mengorganisasikan, 3). Faktor psiko-motorik yakni terdiri dari kelakuan, keterampilan dan penampilan.

Menurut Walgito dalam Arwin (1990), mengemukakan bahwa secara garis besar pembentukan sikap itu akan ditentukan oleh dua faktor pokok yaitu: a). Faktor individu itu sendiri atau faktor dari dalam, b). Faktor dari luar atau ekstern. Faktor yang berkaitan dengan individu menanggapi dunia luarnya bersifat selektif, ini berarti bahwa apa yang datang dari luar tidak semuanya begitu saja diterima, tetapi individu mengadakan seleksi, mana yang akan diterima atau disetujui. Sedangkan faktor luar adalah keadaan yang ada di luar diri individu yang merupakan stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap. Sistem nilai yang dianut seseorang di dalam kelompok masyarakat turut mempengaruhi dalam menentukan sikap, karena sistem nilai dalam diri seseorang menyebabkan segala aktivitasnya dipengaruhi oleh sistem nilai tersebut.

Menurut Walgito dalam Arwin (1990), bahwa perubahan dan pembentukan sikap banyak dipengaruhi oleh faktor individu sendiri atau faktor dari dalam, bagaimana individu merespon dunia luarnya yang bersifat selektif, sedangkan faktor luar yang dimaksudkan yaitu hal-hal yang merupakan rangsangan atau stimulus untuk membentuk atau merubah sikap. Mar'at (1982),

menyatakan bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap objek tersebut. Lebih lanjut diperjelas Mar'at (1982), memandang sikap dari dua sisi, yakni: *pertama*; secara operasional, sikap menunjukkan konotasi adanya kesesuaian reaksi terhadap kategori stimulus, *kedua*; penggunaan praktis, sikap seringkali dihadapkan dengan ransangan sosial dan reaksi yang bersifat emosional.

Pendapat tersebut di atas, menunjukkan bahwa faktor eksternal sangat besar pengaruhnya terhadap sikap seseorang dalam melakukan respon terhadap stimulus yang datang dari lingkungan sekeliling. Sedangkan faktor internal dapat disimpulkan dengan mengemukakan pendapat Azwer (1998), struktur sikap terdiri atas tiga komponen yang saling menunjang yaitu kognitif (*cognitive*), komponen efektif (*affective*), dan komponen konatif (*conative*), dimana komponen kognitif merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap, komponen efektif merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional dan komponen konatif merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sikap yang dimiliki seseorang.

Menurut Soelaiman (1987) bahwa komponen-komponen sikap, yaitu: a). Kognitif, artinya memiliki pengetahuan mengenai objek yang akan disikapinya, terlepas pengetahuan itu benar atau salah, b). Afektif, artinya dalam bersikap akan selalu mempunyai evaluasi emosional (setuju atau tidak setuju) mengenai objek yang disikapinya, c). Konatif, artinya kecenderungan bertingkah laku bila bertemu dengan objek sikapnya, mulai dari bentuk yang positif (tindakan sosial) sampai kepada yang sangat aktif (tindakan agresif).

D. Birokrasi

Kamus besar bahasa Indonesia, kata birokrasi diartikan, sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hirarki dan jenjang jabatan dan

birokrasi diartikan pula sebagai cara beberapa atau susunan pekerjaan yang serba lamban serta menuntut tata aturan (administrasi dan sebagainya) yang banyak liku-likunya (Depdikbud, 1997). Santoso (1993), mengemukakan bahwa terminology “birokrasi” dalam literatur ilmu administrasi negara dan ilmu politik sering dipergunakan dalam beberapa pengertian yang terkadang dalam istilah birokrasi, yaitu *Rasional organization* (organisasi yang rasional), *Organization inefficiency* (ketidakefisienan organisasi), *Rule of officials* (pemerintahan oleh para pejabat), *Public of administration* (administrasi negara), *Administration by officials* (administrasi oleh para pejabat), *Type of organization with specific charesteristic and quality as hierarchies and rules* (bentuk organisasi dengan ciri-ciri dan kualitas tertentu seperti hirarki dan peraturan-peraturan), *An essential quality of modern society* (salah satu ciri yang esensial dari masyarakat).

Arnold Brecht dalam Albrow (1989), mendefenisikan “birokrasi” sebagai pemerintahan oleh para pejabat dan membedakan dua pengertian kekuasaan: hak sah untuk mengatur dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Albrow (1989), mengemukakan 7 (tujuh) pengertian yang terkandung dalam istilah “birokrasi”, yaitu 1) Birokrasi sebagai organisasi rasional, 2) Birokrasi sebagai efesiensi organisasi, 3) Birokrasi sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh pejabat, 4) Birokrasi sebagai administrasi negara, 5) Birokrasi sebagai administrasi yang dijalankan oleh pejabat, 6) Birokrasi sebagai sebuah organisasi, 7) Birokrasi sebagai masyarakat modern. Dalam arti yang sempit atau terbatas, birokrasi adalah sama dengan organisasi pemerintahan, sehingga pengertian ini sejalan dengan istilah “*governmental bureaucracy*” seperti dijelaskan oleh Almond dan Powell (Abdullah, 1989).

Berdasarkan dari rumusan pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa posisi birokrasi dalam kontelasi institusi pemerintahann dimanapun hingga saat ini sangat menentukan, sehingga tanpa birokrasi yang efektif, suatu pemerintahan atau negara akan kesulitan untuk menterjemahkan kebijaksanaan, dan

mengoperasionalisasikannya. Max Weber adalah seorang tokoh yang hampir selalu pemikirannya dirujuk apabila seseorang ingin membicarakan birokrasi. Pada hal sebenarnya Weber tidak pernah mendefenisikan secara jelas tentang birokrasi itu sendiri. Bagi Weber, apabila ada sebuah organisasi yang ada skala besar dan rasional maka itu disebutnya sebagai organisasi dengan tipe *legal rasional*, yaitu hubungan kekuasaan bersumber pada peraturan atau ketentuan formal, hubungan tidak bersifat pribadi, pejabat yang diangkat berdasarkanaturan formal, adanya spesialisasi (Muljarto dalam Jarjis, 1999). Birokrasi diidentikkan Weber dengan kekuasaan, dimana sang penguasa sadar akan haknya sebagai yang memerintah, sedangkan yang diperintah sadar bahwa adalah suatu kewajiban untuk taat akan perintah penguasa. Selanjutnya Weber mengemukakan bahwa sebenarnya ada tiga tipe kekuasaan, yaitu kekuasaan kharismatik, kekuasaan tradisional, dan kekuasaan legal-rasional.

Berbagai macam pengertian yang sering didapatkan dalam pengertian birokrasi, maka dapat disistimasikan dalam tiga kategori, yaitu *a*). Birokrasi dalam pengertian yang baik atau rasional (*bureau-rationality*), *b*). Birokrasi dalam pengertian sebagai suatu sistem (*bureau-system*), *c*). Birokrasi dalam pengertian netral (*value-free*), artinya tidak terikat dengan pengertian baik dan buruk. Birokrasi dari pengertian di atas mengandung berbagai macam pengertian, namun birokrasi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah keseluruhan organisasi pemerintah, yang memiliki sistem, hirarki, atau aturan-aturan yang menjangkau tugas-tugas negara dalam berbagai unit organisasi pemerintah di bawah departemen dan lembaga non departemen, baik di pusat maupun di daerah.

Birokrasi bukanlah suatu fenomena yang baru, birokrasi sudah ada sejak berdirinya kerajaan Romawi dan Mesir walaupun dalam bentuk-bentuknya yang masih sangat sederhana. Akan tetapi kecenderungan ke arah birokrasi menjadi semakin pesat seiring dengan kemajuan peradaban dan tuntutan akan kebutuhan umat manusia dari masa ke masa. Birokrasi begitu penting

dalam masyarakat modern, menuntut kebijaksanaan pemerintah sebagai satu-satunya yang dikenal relatif efektif hingga saat ini, semua pemerintah menggunakannya tidak peduli siapa, di mana dan bagaimanapun sistem pemerintahannya. Adapun ciri-ciri pokok dari struktur birokrasi, dapat dilihat pendapat Max Weber dalam Blau dan Mayer (1987) sebagai berikut:

- 1) Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas-tugas resmi.
- 2) Pengorganisasian kantor mengikuti prinsip hirarki.
- 3) Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak dan konsisten dan penerapan juga aturan-aturan dalam konsensus tertentu.
- 4) Seorang pejabat dalam menjalankan tugas-tugasnya harus bersemangat dan tidak bersifat pribadi.
- 5) Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi oleh kemungkinan pemecatan sepihak.
- 6) Pengalaman secara universal dilihat dari sudut pandang yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

Max Weber dalam Johnson (1994:226) lebih lanjut mengemukakan bahwa ada empat tipe ideal birokrasi diantaranya: a) Adanya struktur hirarki, b) Adanya posisi jabatan, c) Adanya aturan-aturan, dan d) Personil dengan kualifikasi yang tepat. Martin Albrow telah merangkum ide Max Weber dalam Santoso (1993) bahwa ciri-ciri birokrasi yang ideal yaitu: 1) Adanya suatu struktur hirarki, 2) Adanya serangkaian posisi-posisi, jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas, 3) Adanya aturan-aturan, regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata cara organisasi dan tingkah laku para anggotanya, 4) adanya personil secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karier, dengan promosi yang didasarkan pada kualifikasi dan penampilan.

Beetham (1990) dalam bukunya, *bureaucracy*, membedakan adanya sepuluh atau sebelas ciri-ciri yang mendasari ide Weber tentang birokrasi, tetapi direduksi kedalam empat ciri utama, yaitu; a). Hirarki yakni masing-masing pejabat memiliki kompetensi yang ditentukan dengan jelas di dalam hirarki pembagian tugas dan tanggung jawab terhadap pimpinannya dalam segala pelaksanaan tugasnya, b). Kontinuitas yakni lembaga membentuk jabatan-jabatan dibayar secara penuh waktu dengan struktur karir yang menyediakan prospek bagi perkembangan dan peningkatan regular, c). Imporsonalitas, yakni segala tugas dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang dijabarkan dengan tegas, tanpa adanya pilih kasih ataupun favoritism dan mempertahankan dokumen-dokumen serta catatan tertulis bagi setiap transaksi, d). Keahlian atau profesionalisme, yakni para pejabat dipilih sesuai dengan keahlian, dilatih untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, dan peluang melakukan pengawasan terhadap pengetahuan yang disimpan di dalam dokumen.

Beetham (1990) memberikan kontribusi untuk mencapai semua kriteria efisiensi dari ciri sentral sebuah birokrasi adalah pembagian kerja yang sangat sistematis, sedangkan problem administratif yang kompleks dipecah-pecah dalam tugas-tugas yang bersifat unit-unit wilayah kerja, kemudian dikoordinir di bawah hirarki komando yang bersifat sentralistik. Dalam birokrasi yang telah modern, paling tidak yang telah menganut model rasional di mana pembagian tugas sudah jelas polanya. Durkheim seorang ahli sosiologi berkebangsaan Perancis pernah mengemukakan bahwa pertukaran tercipta karena adanya saling ketergantungan yang menyatu dalam sistem sosial. Solidaritas organis yang didasarkan atas pembagian kerja disebut sebagai faktor yang membentuk integrasi. Sebagaimana Durkheim dikutip benvenista (1991:6) mengatakan bahwa masyarakat yang telah maju hanya dapat mempertahankan eksistensinya kalau pembagian kerja sudah dilakukan. Hukum dan moralitas merupakan totalitas ikatan yang membuat kesatuan antara kelompok-kelompok individu sebagai sebuah kumpulan yang koheren.

Durkheim memusatkan perhatian pada fungsi sosial dari solidaritas organis. Orang yang berbeda dapat hidup berdampingan karena mereka saling membutuhkan dalam sebuah perjuangan demi mempertahankan eksistensi mereka masing-masing. Jadi secara teoritik sebenarnya sudah bisa dipahami bahwa esensi birokrasi adalah pembagian kerja secara rasional dan sistematis. Menurut Abdullah dalam Jarjis (1999) bahwa sekurang-kurangnya birokrasi dapat dibedakan atas tiga kategori, diantaranya: a) birokrasi pemerintahan umum (*regulative function*), b) birokrasi pembangunan (*development function*), dan c) birokrasi pelayanan (*service provider*). Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia, ketiga kategori birokrasi dimaksud dijabarkan seperti berikut; 1). Birokrasi pemerintahan umum, yaitu: rangkaian organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum termasuk memelihara ketertiban dan keamanan dari tingkat pusat sampai daerah (propinsi, kabupaten, kecamatan, serta kelurahan/desa). Tugas-tugas tersebut lebih bersifat “mengatur” atau “*regulative function*”. 2). Birokrasi pembangunan atau fungsional, yaitu: unit organisasi pemerintah yang menjalankan salah satu bidang dan atau sektor yang khusus guna mencapai suatu tujuan pembangunan seperti kesehatan, industri pertanian, pendidikan dan lain-lain. Fungsi pokoknya adalah “*development function*”, 3). Birokrasi pelayanan, yaitu: unit organisasi yang pada hakekatnya bagian dan atau langsung berhubungan dengan masyarakat. Dalam kategori ini dapat disebutkan antara lain; sekolah (SD-SLTA), kantor koperasi, bank rakyat tingkat desa dan berbagai unit organisasi lainnya yang memberikan pelayanan langsung bagi masyarakat atas nama pemerintah. Fungsi utamanya adalah “*service function*”,(Abdullah dalam Jarjis, 1999).

Memahami berbagai uraian tentang ciri-ciri dalam struktur birokrasi pemerintahan, maka dapat disimpulkan bahwa birokrasi pemerintahan merupakan lembaga yang sangat berkuasa dengan kemampuan yang sangat besar dalam menciptakan atau berbuat kebaikan dan keburukan, untuk itu perlu ada aturan

main yang mampu mengontrolnya agar dapat berfungsi secara efektif dan efisien, berhasilguna dan berdayaguna dalam menata kehidupan masyarakat.

E. Realitas SosialKepemimpinan Wanita

Persoalan tentang kepemimpinan wanita terhadap teori yang disampaikan menunjukkan bahwa; *Pertama*, sikap masyarakat, haruslah dipahami sebagai suatu proses kecenderungan masyarakat menilai baik atau buruk, setuju atau tidak setuju terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan sebagai proses stimulus yang diindra, baik yang muncul dari dalam diri sendiri maupun faktor dari lingkungan sekitarnya dengan diberi makna dan arti secara sadar. *Kedua*, adanya sikap masyarakat yang kurang mendukung terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan, lebih dikarenakan banyak hambatan atau tantangan yang dimiliki oleh kaum wanita untuk dapat tampil pada tingkatan kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan seperti nilai-nilai sosial kultural, nilai-nilai keagamaan (tingkat pemahaman) yang dianut masyarakat setempat, tantangan psikologis dan biologis, minimnya skill (keterampilan), kurangnya pengalaman kerja dan terbatasnya pendidikan (pengetahuan), belum tersosialisasinya kesetaraan jender, dan adanya ketidakadilan sosial. *Ketiga*, untuk dapat mengetahui hubungan antara sikap masyarakat dengan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan, hal ini terkait dengan kemampuan kepemimpinan kaum wanita dalam hal kemampuan dalam perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengawasan, profesionalisme dan pengambilan keputusan, menjadi indikator untuk mengukur mampu tidaknya kaum wanita menjadi pemimpin dalam birokrasi pemerintahan di suatu wilayah. *Keempat*, sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan dapat dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat umur, dan status sosial masyarakat. Ada beberapa hal yang dilihat secara konteks realitas tentang kepemimpinan wanita yaitu:

a) Sikap, Pendidikan, Umur dan Sosial

Sikap masyarakat yang dimaksud yakni tanggapan atau kecenderungan (respon) masyarakat menilai (setuju atau tidak setuju) terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di suatu wilayah, sebagai proses stimulus yang diindra baik dari dalam maupun dari luar individu yang diberi makna dalam arti secara sadar. Variabel sikap masyarakat tentang kepemimpinan wanita, dalam penelitian ini adalah total skor yang diperoleh berdasarkan hasil angket dan wawancara yang telah dilakukan.

Pemberian skor dalam mengukur sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita ini adalah mengacu pada ketetapan respon masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam instrument (skala likert) sikap tentang kepemimpinan wanita yang terdiri dari lima option A, B, C, D, E dimana A; sangat setuju, B; setuju, C; netral, D; tidak setuju, E; sangat tidak setuju. Dengan prinsip pernyataan positif di beri skor 5, 4, 3, 2, 1, sedangkan pernyataan negatif dengan skor 1, 2, 3, 4, 5.

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terakhir diperoleh responden. Pendidikan formal tersebut dilihat dari jenjang tertinggi sampai terendah dengan indikator: PT, SLTA, SLTP, dan SD). Tingkat umur atau usia adalah tingkat umur setiap responden yang mengacu pada umur terendah (minimal) sampai umur tertinggi (maksimal) yang diperoleh melalui angket yang telah diberikan. Status sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kedudukan responden dalam masyarakat, dengan indikator terdiri dari unsur cendekiawan atau intelektual, tokoh agama, birokrat atau PNS, wiraswasta atau pedagang dan unsur pemuda atau mahasiswa. Hal tersebut sejalan dengan Ralp Linton dalam Karel J. Weeger (1993: 59) bahwa status sosial dinyatakan sebagai posisi yang diduduki oleh seseorang dalam masyarakat atau sistem sosial tertentu.

b) Konteks kepemimpinan wanita

Kepemimpinan wanita ialah kemampuan wanita untuk memimpin dalam suatu kedudukan (jabatan) di birokrasi pemerintahan yang pelaksanaannya senantiasa berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan yang resmi (formal). Variabel ini sebagai acuan penilaian (sikap) masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan dengan indikator-indikator yang terdiri dari kemampuan: perencanaan, pengorganisasian, motivasi, pengawasan, profesionalisme, pengambilan keputusan. Penelitian ini dilakukan di wilayah propinsi Sulawesi selatan pada Kota Makassar. Kota Makassar memiliki 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 1.281.168 orang (kantor Pemda Tk II Kota Makassar, 2000). Populasi penelitian ini adalah semua masyarakat yang berdomosili tetap di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh wanita dalam 6 wilayah kelurahan yang tersebar pada 5 wilayah kecamatan dengan jumlah penduduk 35.671 orang. Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menentukan wilayah-wilayah penelitian secara *purposive sampling*. Setelah mempertimbangkan bahwa wilayah tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang sama yakni dipimpin oleh wanita, yang terdiri atas Kelurahan Mario Kecamatan Mariso dengan jumlah penduduk 8.820 orang, Kelurahan Bontolebang Kecamatan Mamajang dengan jumlah penduduk 4.497, dan Kelurahan Labuang baji Kecamatan Mamajang dengan jumlah penduduk 5.769, Kelurahan Parang Layan Kecamatan Bontoala dengan jumlah penduduk 5.769, Kelurahan Sinri Jala Kecamatan Panakukang dengan jumlah penduduk 3.316 orang, Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk 11.207 orang, maka jumlah penduduk keseluruhan dari 6 kelurahan sebanyak 35.671 orang (Kantor Pemda Tk. II Kota Makassar, 2000).

Penentuan ukuran sampel didasarkan pada hasil penelaan pendahuluan (*pra survey*), maka teknik pengambilan untuk responden dilakukan dengan teknik sampling kuota, yakni teknik menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri khas

(karakteristik) tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 1997). Jumlah sampel untuk masyarakat adalah 100 orang.

Instrumen yang diujicobakan adalah instrumen sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita. Tujuan dilaksanakan uji coba adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen, sebagai syarat bagi suatu instrumen yang layak digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen merupakan merupakan suatu hal yang penting dalam pengukuran, terutama terhadap instrumen yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Penelitian yang dilakukan dengan biaya yang relatif besar dan waktu yang lama, tidak akan banyak artinya jika instrumen yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak valid. Anderson sebagaimana dikutip Arikunto (1991:63) mengatakan *a test is valid if it measure it purpose to measure*. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen itu mengukur apa yang ingin diukur. Agar instrumen yang dikembangkan memiliki validitas, instrumen harus disusun berdasarkan pengembangan kerangka teoritis dari variabel yang dipilih, mensintesis teori-teori yang dikemukakan untuk menarik indikator-indikator. Dan guna menjamin keterwakilan seluruh aspek yang akan diukur perlu disusun kisi-kisi instrumen berdasarkan indikator-indikatornya. Untuk menguji validitas butir soal yang telah disusun terlebih dahulu diadakan uji coba instrumen, kemudian dilakukan analisis butir, yaitu dengan mengkorelasikan skor butir soal dengan skor total instrumen tersebut. Untuk keperluan pengukuran validitas butir instrumen digunakan rumus *korelasi product moment dari Pearson*.

Reliabilitas instrumen menyangkut kepercayaan terhadap instrumen. Suatu instrumen dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika instrumen tersebut memberikan hasil yang tetap. Hal ini berarti instrumen yang sama atau pada subjek yang lain baik pada waktu yang sama maupun pada waktu yang berbeda. Reliabilitas ini ditunjukkan dengan angka koefisien

reliabilitas yang tinggi. Untuk menentukan koefisien reliabilitas instrumen digunakan rumus *alpha Crombach*.

Sampel uji coba instrumen diambil dari populasi yang tidak termasuk dalam sampel penelitian. Dengan demikian sampel uji coba instrumen penelitian setara dengan sampel penelitian. Setelah instrumen diisi dan dikembalikan oleh responden, selanjutnya dibuat tabulasi data dan diolah dengan bantuan computer program SPSS. Hasil dari uji coba tersebut adalah sebagai berikut: a). Instrumen sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita. Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan rumus *korelasi product moment* dari Pearson dan membandingkannya dengan nilai r tabel untuk $n = 20$ diperoleh 5 butir instrumen yang memiliki nilai lebih kecil dari r tabel. Sehingga 35 butir instrumen sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita yang diujicobakan dinyatakan 30 butir yang memenuhi validitas item. Adapun hasil perhitungan reliabilitas instrumen diperoleh $r = 0,83$. Hal ini berarti instrumen sikap masyarakat terhadap kepemimpinan wanita memiliki nilai ketetapan yang cukup tinggi. Kisi-kisi instrumen dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan tujuan metode analisis yang digunakan analisis statistik deskriptif yang dilakukan dengan persentase dengan rata-rata dengan tabulasi silang. Untuk menguji kebenaran hipotesis digunakan analisis statistik inferensial, metode analisis yang digunakan adalah *Chi-Kuadrat*. Selanjutnya indeks keeratan hubungan (IKH) diperoleh dari perbandingan koefisien kontingensi (C) dengan koefisien kontingensi maksimum (C maks). Untuk memberikan penjelasan kualitatif berdasarkan nilai IKH, digunakan nilai konversi sebagai berikut: 0,80 - 1,00 hubungan sangat kuat, 0,60 - 0,70 hubungan kuat, 0,40 - 0,59 hubungan sedang, 0,20 - 0,39 hubungan lemah, dan 0,00 - 0,19 hubungan sangat lemah.

Hasil analisis statistik tersebut di atas, akan diperjelas dengan uraian yang bersifat deskriptif yang data atau informasinya diperoleh lewat wawancara mendalam. Kota Makassar secara administratif merupakan ibukota provinsi Sulawesi Selatan

yang terletak dibagian barat pulau Sulawesi, yakni terletak pada posisi 5° 8'6"19" lintan selatan 199° 24'17"38" bujur timur, dengan batas-batas wilayah 1) Sebelah utara dengan Kabupaten Pangkep, 2) Sebelah timur dengan Kabupaten Maros, 3). Sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa, 4). Sebelah barat dengan Selat Makassar. Jumlah penduduk Kota Makassar pada akhir tahun 1999 tercatat sekitar 1.191.456 jiwa yang terdiri dari 581.322 laki-laki dan 610.124 perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 3,24 persen. Penduduk tersebut tersebar dalam wilayah Kota Makassar di sebelas kecamatan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 95 persen, yang berarti setiap kasus 100 penduduk wanita terdapat 95 penduduk laki-laki, (Kantor Statistik Kota Makassar, 1999). Sedangkan keadaan penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga, penduduk dan kepadatan dirinci menurut kecamatan di Kota Makassar tahun 1999.

c) Keadaan Sosial Budaya

1) *Pendidikan*

Pendidikan kualitas sumber daya manusia pembangunan dapat ditingkatkan dengan menyediakan fasilitas pendidikan secara fisik maupun tenaga guru yang memadai. Pada tahun 1999/2000 jumlah sekolah, guru dan murid di Kota Makassar pada setiap jenjang pendidikan yaitu: Tingkat pendidikan dasar, jumlah sekolah 479 unit dengan jumlah guru dan murid masing-masing 4 823 dan 128 875 orang. Sekolah lanjutan tingkat pertama, jumlah sekolah 162 unit dengan jumlah guru dan murid masing-masing 3 390 dan 51 0006 orang. Sekolah menengah (SMU/SMK), jumlah sekolah 162 unit dengan jumlah guru dan murid masing-masing 4 298 dan 54 398 orang. Jumlah Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi sebanyak 52, yang terdiri dari tiga perguruan tinggi negeri dan 49 perguruan tinggi swasta. Pada tahun 1999/2000 jumlah mahasiswa yang tercatat adalah 103 211 orang, terdiri dari 39 247 mahasiswa perguruan tinggi negeri dan 63 964

mahasiswa perguruan tinggi swasta (Kantor Statistik Kota Makassar, 1999).

2) *Keagamaan*

Garis-Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia senantiasa menekankan bahwa penduduk yang besar dan berkualitas tinggi merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional. Demikian pula halnya dalam bidang keagamaan di Kota Makassar dalam pembangunan agama di samping ditujukan untuk lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan memelihara kerukunan antar umat beragama, serta meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan pembangunan.

Penduduk Kota Makassar mayoritas beragama Islam (88,6 persen) selebihnya beragama Kristen (Katolik dan Protestan) sekitar 9,3 persen, sedangkan Hindu dan Budha masing-masing 0,5 persen dan 1,5 persen. Bila dilihat penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijadikan indikator tingkat rasionalitas dan cara berpikir suatu penduduk atau seseorang, dimana pendidikan dapat diperoleh dibangku sekolah secara formal maupun secara informal di lingkungan keluarga dan masyarakat. Di samping itu tingkat pendidikan dapat merupakan faktor pendorong seseorang dalam berkreasi, dengan aktivitas yang lebih produktif.

3) *Keagamaan*

Bidang keagamaan di Kelurahan Mario ditinjau dari jumlah umat penganut agama, ternyata bahwa penduduk yang menganut agama Islam jumlahnya paling besar yakni 4.541 orang, dan penganut agama Kristen (Protestan dan Katolik) berjumlah 530 orang sedangkan Hindu 50 orang dan Budha 67 orang.

4) *Sarana dan Prasarana*

Sarana dan prasarana di Kelurahan Mario meliputi bidang kesehatan, komunikasi, perumahan, tempat ibadah, fasilitas pendidikan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Prasarana yang ada di Kelurahan Mario, dinilai masyarakat cukup baik walaupun masih perlu ditingkatkan, jalanan khusus dalam kelurahan yang sudah teraspal 4 Km untuk poros Kabupaten 12 Km, ditambah dengan jalan yang cukup baik disetiap lingkungan dan 5 RW, sedangkan kondisi bangunan perumahan dapat dirinci yakni rumah permanen berjumlah 564 buah, semi permanen berjumlah 230 buah dan non permanen berjumlah 95 buah.

d) Sikap Masyarakat Terhadap Kemampuan Kepemimpinan Wanita Dalam Birokrasi Pemerintahan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif mengenai sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di Kota Makassar diperoleh skor rata-rata 108,02 dari skor kriterium atau skor maksimal ideal sebesar 150 dengan simpangan Baku 13,85. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita berada pada skor persentase sebesar 72,01 persen. selain skor rata-rata, diperoleh modus sebesar 113 dan median sebesar 110. Ini berarti pada umumnya skor sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita adalah sebesar 113, dan ada 50 persen masyarakat memiliki skor 110 ke bawah dan 50 persen lainnya memiliki skor 110 ke atas.

Gambaran bahwa penilaian masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita berada pada skor persentase 72,01 persen, yang menunjukkan bahwa secara umum masyarakat mempunyai sikap yang positif terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan. Ini sejalan dengan pernyataan informan AK (58 tahun) bahwa: "Dalam era globalisasi seperti sekarang ini, wanita memiliki peluang yang lebih besar untuk tampil menjadi pemimpin diberbagai bidang kehi-

dupan, karena wanita dan laki-laki pada dasarnya memiliki potensi yang sama sehingga bila diberikan kesempatan wanita dapat menjadi pemimpin yang baik, dalam hal kemampuan manajemen wanita cukup mampu dan tidak sedikit wanita sekarang banyak yang memiliki kemampuan manajemen di atas kemampuan laki-laki, termasuk kemampuan dalam birokrasi pemerintahan". Wanita memiliki potensi kepemimpinan yang sama dengan laki-laki dalam hal kemampuan manajemen secara umum maupun kemampuan kepemimpinan dalam birokrasi, sepanjang wanita diberikan kesempatan dan peluang yang sama dalam mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian tergambarlah bahwa pada dasarnya masyarakat mempunyai sikap atau penilaian yang positif terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan. Sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita lebih jelas apabila dilihat dari berbagai aspek yang berkaitan dengan kemampuan kepemimpinan yaitu; kemampuan perencanaan, kemampuan organisasi, kemampuan motivasi, kemampuan pengawasan, kemampuan profesionalisme dan kemampuan pengambilan keputusan.

- 1) Kemampuan Perencanaan. Hasil analisis statistik deskriptif mengenai sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dilihat dari aspek kemampuan perencanaan diperoleh skor rata-rata sebesar 18,63 dari skor kriterium atau skor maksimal ideal sebesar 25 dengan simpangan baku 3,15. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita pada aspek perencanaan berada pada skor persentase sebesar 74,52 persen..
- 2) Kemampuan Organisasi. Hasil analisis statistik deskriptif mengenai sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dilihat dari aspek kemampuan organisasi diperoleh skor rata-rata sebesar 18,51 dari skor kriterium atau skor maksimal ideal sebesar 25 dengan simpangan baku 3,65. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap masyarakat

terhadap kemampuan kepemimpinan wanita pada aspek motivasi berada pada skor persentase sebesar 74,04 persen.

- 3) Kemampuan Pengawasan. Hasil analisis statistik deskriptif mengenai sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dilihat dari aspek kemampuan pengawasan diperoleh skor rata-rata 17,55 dari skor kriteria atau skor maksimal ideal sebesar 25 dengan simpangan baku 3,36. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita pada aspek pengawasan berada pada skor persentase sebesar 70,20 persen.
- 4) Kemampuan Profesionalisme. Hasil analisis statistik deskriptif mengenai sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dilihat dari aspek kemampuan profesionalisme diperoleh skor rata-rata 17,98 dari skor kriteria atau skor maksimal ideal sebesar 25 dengan simpangan baku 3,37. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita pada aspek profesionalisme berada pada skor persentase sebesar 71,92 persen.
- 5) Kemampuan Pengambilan Keputusan. Hasil analisis statistik deskriptif mengenai sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dilihat dari aspek kemampuan pengambilan keputusan diperoleh skor rata-rata 17,25 dari skor kriteria atau skor maksimal ideal sebesar 25 dengan simpangan baku 3,84. Hal ini memberikan gambaran bahwa sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita pada aspek pengambilan keputusan berada pada skor persentase sebesar 69,00 persen.

Ringkasan hasil analisis deskriptif berdasarkan skor rata-rata dan skor persentase pada enam aspek kemampuan kepemimpinan wanita yang dipelajari dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Aspek Yang Diukur	Skor Rata-rata	Skor	Ideal persentase (%)
1	Kemampuan Perencanaan	18.63	25	74,52
2	Kemampuan Organisasi	18.10	25	72,40
3	Kemampuan Motivasi	18.51	25	74,04
4	Kemampuan Pengawasan	17.55	25	70,20
5	Kemampuan Profesional	17.98	25	71,92
6	Kemampuan Pengambilan Keputusan	17.25	25	69,00

Sumber: Data Primer setelah diolah, 20009

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat dilihat dengan jelas bahwa tingkat kemampuan kepemimpinan wanita yang paling lemah adalah pada aspek kemampuan pengambilan keputusan, dan tingkat kemampuan kepemimpinan yang paling tinggi adalah pada aspek kemampuan perencanaan. Secara berturut-turut tingkat kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan berdasarkan penilaian masyarakat terhadap keenam indikator atau aspek yang diukur adalah sebagai berikut: 1) Kemampuan perencanaan sebesar 74,52 persen, 2) Kemampuan motivasi sebesar 74,04 persen, 3) Kemampuan organisasi sebesar 72,401 persen, 4) Kemampuan profesionalisme sebesar 71,92 persen, 5) Kemampuan pengawasan sebesar 70,20 persen dan, 6) Yang paling lemah adalah kemampuan pengambilan keputusan sebesar 69,00 persen.

Deskripsi sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita berdasarkan keenam aspek yang diukur, sesuai dengan hasil wawancara dengan responden dan pernyataan yang dikemukakan oleh informan LD (60 tahun) sebagai berikut: "wanita memiliki kemampuan yang tinggi dalam melakukan perencanaan, hal ini dapat dilihat dalam kemampuan wanita mengelola manajemen dalam rumah tangga, baik perencanaan dalam pengelolaan maupun perencanaan dalam pengembangan, sehingga bila seorang wanita berada dalam suatu organisasi sudah dapat dipastikan bahwa wanita akan mampu membuat perencanaan, pengelolaan dan mengembangkan organisasi dengan baik". (wawancara, 27 september 2000).

Hasil analisis deskriptif dan wawancara di atas, menggambarkan bahwa sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di Kota Makassar positif dan khususnya aspek kemampuan perencanaan dalam organisasi. Adapun pada aspek kemampuan pengambilan keputusan wanita ditunjukkan oleh hasil deskripsi data pada kategori yang lemah, ini sejalan dengan pernyataan AK (60 tahun) sebagai berikut:

“Kemampuan kepemimpinan wanita pada dasarnya sama dengan kemampuan yang dimiliki laki-laki, bahkan dalam hal kemampuan mengelola administrasi wanita kadang lebih tertib, rapih dan disiplin, sedangkan titik kelemahan wanita dalam hal kepemimpinan adalah kemampuan mengambil keputusan yang cepat, maupun kerja-kerja yang lebih operasional di lapangan yang membutuhkan keberanian dan ketegasan dalam bertindak”.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa kelemahan wanita dalam kepemimpinan dan khususnya kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan adalah lemahnya aspek kemampuan dalam mengambil keputusan maupun kemampuan yang berkaitan dengan kerja-kerja operasional di lapangan. Namun demikian pernyataan tersebut juga menjelaskan berbagai kelebihan-kelebihan wanita disbanding dengan laki-laki, khususnya pada aspek pengelolaan. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang terlihat dalam memberikan penilaian terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di Kota Makassar, pada umumnya berpendidikan sarjana, yaitu sejumlah 57 orang atau 57 persen dan yang lainnya berpendidikan menengah, yakni sejumlah 43 orang atau 43 persen dan tidak ada responden yang berpendidikan rendah, dengan demikian dapat dipahami bahwa responden yang memberikan penilaian atau sikap terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan memiliki pengetahuan yang cukup bila ditinjau dari pendidikan responden.

Dari 100 responden yang terpilih menjadi sampel penelitian, ditemukan umur masing-masing responden bervariasi yakni dari umur terendah 19 tahun dan yang tertinggi umur 70 tahun. Penyebaran responden berdasarkan tingkat umur. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang terlibat dalam memberikan penilaian terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di Kota Makassar, pada umumnya sudah berumur dewasa, baik secara fisik, mental dan pemikiran dalam memberikan sikap, ini dapat dilihat dari kedua kelompok umur dewasa tersebut digabungkan hingga persentase sampai 74,00 persen, sementara responden 19 - 30 tahun hanya berjumlah 26,00 persen. meskipun demikian semua responden dari tiga kelompok umur tersebut masih termasuk dalam kategori usia produktif sebagaimana standar yang ditetapkan oleh Departemen Tenaga Kerja bahwa usia produktif di Indonesia yaitu berumur 10 tahun sampai dengan 64 tahun. Dari 100 responden yang terpilih menjadi sampel penelitian, ditemukan status sosial responden yang bervariasi, yakni status cendekiawan, tokoh agama, birokrasi/ PNS, wiraswasta/pedagang dan pemuda/mahasiswa. Hal ini berarti bahwa masyarakat yang terlibat dalam memberikan penilaian terhadap kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di Kota Makassar, apabila dilihat dari status sosial nampak adanya penyebaran responden yang sebanding pada masing-masing kelompok status sosial.

Sedangkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di Kota Makassar” digunakan tabel kontingensi dan analisis chi kuadrat terhadap semua aspek kemampuan kepemimpinan yang dipelajari. Responden berpendidikan SLTA, diperoleh 1 yang bersikap negatif dan 42 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 2,33 persen yang bersikap negatif dan 97,67 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 6,25 persen bersikap negatif dari 16 responden

yang memiliki sikap negatif dan 50,00 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 1,00 persen bersikap negatif dan 42,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-1, diperoleh 13 yang bersikap negatif dan 40 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 24,53 persen yang bersikap negatif dan 75,47 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 81,25 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 47,62 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 13,00 persen bersikap negatif dan 40,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-2, diperoleh 2 yang bersikap negatif dan 2 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 50,00 persen yang bersikap negatif dan 50,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 2,38 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 2,00 persen bersikap negatif dan 2,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan wanita diperoleh nilai $X^2 = 12,291$ dengan nilai signifikansi 0.0002. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungantingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata tingkat pendidikan dengan sikap masya-

rakat terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan.

Adapun keeratan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan wanita termasuk pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontigensi (C) sebesar 0,331 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707, diperoleh IKH sebesar 0,47 berada pada rentang (0,40 - 0,59) atau tingkat hubungan sedang. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan perencanaan dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 18.

Responden berpendidikan SLTA, diperoleh 12 yang bersikap negatif dan 31 yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 27,91 persen yang bersikap negatif dan 72,09 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 75,00 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 36,00 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 12,00 persen bersikap negatif dan 31,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-1, diperoleh 4 yang bersikap negatif dan 49 yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 7,55 persen yang bersikap negatif dan 92,45 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 25,00 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 58,33 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 4,00 persen bersikap negatif dan 49,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-1, diperoleh 4 yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan dan tidak ditemukan yang bersikap negatif, hal ini setara dengan 100,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 4,76 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 4,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita diperoleh nilai $X^2 = 8,116$ dengan nilai signifikan 0.0173. Karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan.

Adapun keeratan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita termasuk pada kategori rendah. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontigensi (C) sebesar 0.274 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707, diperoleh IKH sebesar 0,38 berada pada rentang (0,20 - 0,39) atau tingkat hubungan rendah. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan organisasi dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 19.

Responden berpendidikan SLTA, diperoleh 17 yang bersikap negatif dan 26 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 39,53 persen yang bersikap negatif dan 60,47 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 70,83 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 34,21 persen

bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 17,00 persen bersikap negatif dan 26,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-1, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 46 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 13,21 persen yang bersikap negatif dan 86,79 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 29,17 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 60,53 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 46,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-2, diperoleh 4 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan dan tidak ditemukan yang bersikap negatif, hal ini setara dengan 100,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 5,26 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 4,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita diperoleh nilai $X^2 = 10,337$ dengan nilai signifikan 0.0005. Karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan.

Adapun keeratan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita termasuk pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontigensi (C) sebesar 0.306 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707, diperoleh IKH sebesar 0,43 berada pada rentang (0,40 - 0,59) atau tingkat hubungan sedang. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan motivasi dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 19.

Responden berpendidikan SLTA, diperoleh 19 yang bersikap negatif dan 24 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 44,19 persen yang bersikap negatif dan 55,81 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 59,38 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 35,29 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 19,00 persen bersikap negatif dan 24,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-1, diperoleh 12 yang bersikap negatif dan 41 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 22,64 persen yang bersikap negatif dan 77,36 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 37,50 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 60,29 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap negatif dan terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 12,00 persen bersikap negatif dan 41,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-2, diperoleh 1 yang bersikap negatif dan 3 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 25,00 persen yang bersikap negative dan 75,00 persen yang bersikap

positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 3,13 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 4,41 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 1,00 persen bersikap negatif dan 3,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita diperoleh nilai $X^2 = 5,158$ dengan nilai signifikansi 0.0759. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan pengawasan dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 21.

Responden berpendidikan SLTA, diperoleh 14 yang bersikap negatif dan 29 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 32,56 persen yang bersikap negatif dan 67,44 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 73,68 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 35,80 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 14,00 persen bersikap negatif dan 29,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-1, diperoleh 5 yang bersikap negatif dan 48 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 9,43 persen yang bersikap negatif dan 90,57 persen yang bersikap

positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 26,32 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 59,26 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 5,00 persen bersikap negatif dan 48,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-2, diperoleh 4 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan dan tidak ditemukan yang bersikap negatif, hal ini setara dengan 100,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 4,94 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 4,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita diperoleh nilai $X^2 = 9,226$ dengan nilai signifikansi 0.0005. Karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan.

Adapun keeratan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita termasuk pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontigensi (C) sebesar 0.291 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707, diperoleh IKH sebesar 0,41 berada pada rentang (0,40 - 0,59) atau tingkat hubungan sedang. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi

hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan motivasi dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 22.

Responden berpendidikan SLTA, diperoleh 14 yang bersikap negatif dan 29 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 32,56 persen yang bersikap negatif dan 67,44 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 42,24 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 43,28 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 14,00 persen bersikap negatif dan 29,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-1, diperoleh 17 yang bersikap negatif dan 36 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 32,08 persen yang bersikap negatif dan 67,92 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 51,52 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 53,73 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 17,00 persen bersikap negatif dan 36,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berpendidikan S-2, diperoleh 2 yang bersikap negatif dan 2 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 50,00 persen yang bersikap negatif dan 50,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 6,06 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negative dan 2,99 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan ke-

putusan wanita dalam kepemimpinan, serta 2,00 persen bersikap negatif dan 2,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita diperoleh nilai $X^2 = 0,547$ dengan nilai signifikansi 0.7607. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan pengambilan keputusan dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 23.

Secara umum ditemukan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan. Apabila dilihat pada ke enam aspek yang diukur ditemukan empat aspek yang mempunyai hubungan yang nyata yakni: kemampuan perencanaan, kemampuan organisasi, kemampuan motivasi dan kemampuan profesionalisme. Adapun kemampuan pengawasan dan kemampuan pengambilan keputusan tidak ditemukan hubungan yang nyata.

Dengan demikian bahwa terjadi perbedaan pendapat atau sikap masyarakat dalam menilai kemampuan kepemimpinan wanita, baik kepemimpinan yang bersifat umum maupun kepemimpinan dalam birokrasi pemerintahan, banyak dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan maupun status sosial seseorang di dalam masyarakat". (wawancara, 24 September 2000).

e) Kepemimpinan dalam konteks realitas sosial wanita

Untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan, “terdapat hubungan antara tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita” digunakan tabel kontingensi dan analisis chi kuadrat terhadap semua aspek kemampuan kepemimpinan yang dipelajari. Hal tersebut terdeteksi secara obyektifitas lewat uji statistik sebagai berikut:

1) *Hubungan Tingkat Umur Dengan Kemampuan Perencanaan*

Responden umur 19 – 30 tahun, diperoleh 6 yang bersikap negatif dan 20 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 23,08 persen yang bersikap negatif dan 76,92 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 37,50 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 23,81 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 6,00 persen bersikap negatif dan 20,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden umur 31 – 50 tahun, diperoleh 9 yang bersikap negatif dan 38 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 19,15 persen yang bersikap negatif dan 80,85 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 56,25 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 45,24 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 9,00 persen bersikap negatif dan 38,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden umur 51 – 70 tahun, diperoleh 1 yang bersikap negatif dan 36 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 3,705 persen yang bersikap negatif dan 96,30 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 6,25 persen

bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 30,95 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 1,00 persen bersikap negative dan 26,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan wanita diperoleh nilai $X^2 = 4.353$ dengan nilai signifikansi 0.1134. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang nyata tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat umur dengan kemampuan perencanaan dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 24.

2) *Hubungan Tingkat umur Dengan Kemampuan Organisasi*

Responden umur 19 – 30 tahun, diperoleh 5 yang bersikap negatif dan 21 yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 19,23 persen yang bersikap negatif dan 80,77 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 31,25 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 25,00 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 5,00 persen bersikap negatif dan 21,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden umur 31 – 50 tahun, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 40 yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 14,89 persen yang bersikap negatif dan 85,11 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi

wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 43,75 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 47,62 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 40,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden umur 51 – 70 tahun, diperoleh 4 yang bersikap negatif dan 23 bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 14,81 persen yang bersikap negatif dan 85,19 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 25,00 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 27,38 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 4,00 persen bersikap negatif dan 23,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita diperoleh nilai $X^2 = 0,273$ dengan nilai signifikan 0.8724. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang nyata tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan organisasi dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 25.

e) *Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kemampuan Motivasi*

Responden umur 19 – 30 tahun, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 19 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 26,92

persen yang bersikap negatif dan 73,08 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 29,17 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 25,00 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 19,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden umur 31 - 50, diperoleh 12 yang bersikap negatif dan 35 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 25,53 persen yang bersikap negatif dan 74,47 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 50,00 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 46,05 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 12,00 persen yang bersikap negatif dan 35 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden umur 51 - 75, diperoleh 5 yang bersikap negatif dan 22 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 18,52 persen yang bersikap negatif dan 81,48 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 20,83 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 28,95 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 5,00 persen bersikap negatif dan 22,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita diperoleh nilai $X^2 = 0,657$ dengan nilai signifikan 0.7309. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat

umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang nyata tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat umur dengan kemampuan motivasi dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 26.

f) *Hubungan Tingkat Umur Dengan Kemampuan Pengawasan*

Responden umur 19 – 30 tahun, diperoleh 8 yang bersikap negatif dan 18 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 30,77 persen yang bersikap negatif dan 76,92 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 25,00 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 24,39 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 8,00 persen bersikap negatif dan 18,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden umur 31 – 50 tahun, diperoleh 15 yang bersikap negatif dan 32 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 31,91 persen yang bersikap negatif dan 68,09 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 46,88 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 47,06 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap negatif dan terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 15,00 persen bersikap negatif dan 32,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden umur 51 – 70 tahun, diperoleh 9 yang bersikap negatif dan 18 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 33,33 persen yang bersikap negatif dan 66,67 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemim-

pinan.. Selain itu diperoleh pula 28,13 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 26,47 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 9,00 persen bersikap negatif dan 18,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita diperoleh nilai $X^2 = 0,40$ dengan nilai signifikansi 0.9800. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidika dengan kemampuan pengawasan.

g) *Hubungan Tingkat umur Dengan Kemampuan Profesionalisme*

Responden umur 19 – 30 tahun, diperoleh 3 yang bersikap negatif dan 23 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 11,54 persen yang bersikap negatif dan 88,46 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 15,79 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 24,40 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 3,00 persen bersikap negatif dan 23,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden 31 – 50 tahun, diperoleh 13 yang bersikap negatif dan 34 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 27,66 persen yang bersikap negatif dan 72,34 persen yang bersikap positif terhadap kemam-

puan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 68,42 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 41,98 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 13,00 persen bersikap negatif dan 34,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden umur 51 - 70 tahun, diperoleh 3 yang bersikap negatif dan 24 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 11,11 persen yang bersikap negatif dan 88,89 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 15,79 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 29,63 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 3,00 persen bersikap negatif dan 24,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita diperoleh nilai $X^2 = 4,322$ dengan nilai signifikansi 0.1152. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak ada hubungan yang nyata tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan profesionalismes dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 28.

h) *Hubungan Tingkat umur Dengan kemampuan Pengambilan Keputusan*

Responden umur 19 – 30 tahun, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 19 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 26,92 persen yang bersikap negatif dan 72,08 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 21,21 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 28,36 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 19,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden umur 31 – 50 tahun, diperoleh 18 yang bersikap negatif dan 29 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 38,30 persen yang bersikap negatif dan 61,70 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 54,55 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 43,28 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 18,00 persen bersikap negatif dan 29,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden 51 – 70 tahun, diperoleh 8 yang bersikap negatif dan 19 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 29,63 persen yang bersikap negatif dan 70,37 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 24,24 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negative dan 28,36 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan

tusan wanita dalam kepemimpinan, serta 8,00 persen bersikap negatif dan 19,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita diperoleh nilai $X^2 = 1,170$ dengan nilai signifikansi 0.5572. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan tingkat pendidikan dengan kemampuan pengambilan keputusan.

i) *Hubungan Status Sosial Dengan Sikap masyarakat dalam konteks sosial.*

Untuk menjawab hipotesisi yang telah diajukan, “terdapat hubungan antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita” digunakan tabel kontingensi dan analisis chi kuadrat terhadap semua aspek kemampuan kepemimpinan yang dipelajari. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut:

1) *Hubungan status sosial Dengan Kemampuan Perencanaan*

Responden berstatus cendekiawan, diperoleh 5 yang bersikap negatif dan 13 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 27,78 persen yang bersikap negatif dan 72,22 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 31,25 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 15,48 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepe-

mimpinan, serta 5,00 persen bersikap negatif dan 13,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus Tokoh Agama, diperoleh 22 yang bersikap positif dan tidak ditemukan yang bersikap negatif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 100,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 26,19 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 22,00 persen bersikap positif dari seluruh responden. Responden berstatus birokrasi/PNS, diperoleh 19 yang bersikap positif dan tidak ditemukan yang bersikap negatif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 100,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 22,62 persen bersikap positif dari 84 responden positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 19,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus wiraswasta/pedagang, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 13 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 35,00 persen yang bersikap negatif dan 65,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 47,75 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 15,48 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 13,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus pemuda/mahasiswa, diperoleh 4 yang bersikap negatif dan 17 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 19,05 persen yang bersikap negatif dan 80,95 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita

dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 25,00 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 20,24 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, serta 4,00 persen bersikap negatif dan 17,00 persen bersikap positif dari seluruh responden. Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan wanita diperoleh nilai $\chi^2 = 15.184$ dengan nilai signifikansi 0.0004. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Adapun keeratan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontingensi (C) sebesar 0,363 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707 diperoleh IKH sebesar 0,51 berada pada rentang (0,40 – 0,49) atau tingkat hubungan sedang. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan status sosial dengan kemampuan perencanaan dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 30.

2) *Hubungan Status Sosial Dengan Kemampuan Organisasi*

Responden berstatus cendekiawan, diperoleh 18 yang bersikap positif dan tidak ditemukan yang bersikap negatif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 100,00 persen bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 21,43 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 18,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus Tokoh Agama, diperoleh 1 yang bersikap negatif dan 21 yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 4,55 persen yang bersikap negatif dan 95,45 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 6,25 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 25,00 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 1,00 persen bersikap negatif dan 21,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus birokrasi/PNS, diperoleh 19 yang bersikap positif dan tidak ditemukan yang bersikap negatif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 100,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 22,62 persen bersikap positif dari 84 responden positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 19,00 persen bersikap positif dari seluruh responden. Responden berstatus wiraswasta/pedagang, diperoleh 9 yang bersikap negatif dan 11 yang bersikap positif terhadap kemampuan perencanaan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 45,00 persen yang bersikap negatif dan 55,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 56,25 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 13,10 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 9,00 persen bersikap negatif dan 11,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus pemuda/mahasiswa, diperoleh 6 yang bersikap negatif dan 15 yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 28,57 persen yang bersikap negatif dan 71,43 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita

dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 37,50 persen bersikap negatif dari 16 responden yang memiliki sikap negatif dan 17,86 persen bersikap positif dari 84 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan, serta 6,00 persen bersikap negatif dan 15,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita diperoleh nilai $X^2 = 24.180$ dengan nilai signifikansi 0.0000. Karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan.

Adapun keeratan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan organisasi wanita dalam kepemimpinan pada kategori kuat. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontingensi (C) sebesar 0,441 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707 diperoleh IKH sebesar 0,62 berada pada rentang (0,60 – 0,79) atau tingkat hubungan kuat. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan status sosial dengan kemampuan organisasi.

3) *Hubungan Status Sosial dengan Kemampuan Motivasi*

Responden berstatus cendekiawan, diperoleh 4 yang bersikap negatif dan 14 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 22,22 persen yang bersikap negatif dan 77,78 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 16,67 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 18,42 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan,

serta 4,00 persen bersikap negatif dan 14,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus tokoh agama, diperoleh 22 yang bersikap positif dan tidak ditemukan yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 100,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 28,95 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 22,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus birokrasi/PNS, diperoleh 2 yang bersikap negatif dan 17 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 10,53 persen yang bersikap negatif dan 89,47 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 8,33 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 22,37 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 2,00 persen bersikap negatif dan 17,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden berstatus wiraswasta/pedagang, diperoleh 10 yang bersikap negatif dan 10 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 50,00 persen yang bersikap negatif dan 50,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 41,67 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 13,16 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 10,00 persen bersikap negatif dan 10,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus pemuda/mahasiswa, diperoleh 8 yang bersikap negatif dan 13 yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 38,10 persen yang bersikap negatif dan 61,90 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 33,33 persen bersikap negatif dari 24 responden yang memiliki sikap negatif dan 17,11 persen bersikap positif dari 76 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan, serta 8,00 persen bersikap negatif dan 13,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita diperoleh nilai $X^2 = 18,569$ dengan nilai signifikan 0.0000. Karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan.

Adapun keeratan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan motivasi wanita dalam kepemimpinan pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontingensi (C) sebesar 0,396 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707 diperoleh IKH sebesar 0,56 berada pada rentang (0,40 – 0,59) atau tingkat hubungan sedang. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan status sosial dengan kemampuan motivasi dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 32.

4) *Hubungan Status Sosial Dengan Kemampuan Pengawasan*

Responden berstatus cendekiawan, diperoleh 5 yang bersikap negatif dan 13 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara

dengan 27,78 persen yang bersikap negatif dan 60,67 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 15,63 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 14,81 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 5,00 persen bersikap negatif dan 13,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden berstatus tokoh agama, diperoleh 8 yang bersikap negatif dan 14 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 36,36 persen yang bersikap negatif dan 63,64 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 25,00 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 20,59 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap negatif dan terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 8,00 persen bersikap negatif dan 14,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus birokrasi/PNS, diperoleh 6 yang bersikap negatif dan 13 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 31,58 persen yang bersikap negatif dan 68,42 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 18,75 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 19,21 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 6,00 persen bersikap negatif dan 13,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus wiraswasta/pedagang, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 13 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 35,00 persen yang bersikap negatif dan 65,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita

dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 21,88 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 19,12 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 13,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus pemuda/mahasiswa, diperoleh 6 yang bersikap negatif dan 15 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 28,57 persen yang bersikap negatif dan 71,43 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 18,75 persen bersikap negatif dari 32 responden yang memiliki sikap negatif dan 22,06 persen bersikap positif dari 68 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan, serta 6,00 persen bersikap negatif dan 15,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita diperoleh nilai $X^2 = 0,583$ dengan nilai signifikansi 0.9697. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengawasan wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan status sosial dengan kemampuan pengawasan dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 33.

5) *Hubungan Status Sosial Dengan Kemampuan Profesionalisme*

Responden berstatus cendekiawan, diperoleh 3 yang bersikap negatif dan 15 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara

dengan 16,67 persen yang bersikap negatif dan 83,33 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 15,79 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 18,52 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 3,00 persen bersikap negatif dan 15,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus tokoh agama, diperoleh 1 yang bersikap negatif dan 21 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 4,55 persen yang bersikap negatif dan 95,45 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 5,26 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 25,93 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 1,00 persen bersikap negatif dan 21,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus birokrasi/PNS, diperoleh 19 yang bersikap positif dan tidak seorang pun bersikap negatif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 100,00 persen bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 23,46 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 19,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus wiraswasta/pedagang, diperoleh 8 yang bersikap negatif dan 12 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 40,00 persen yang bersikap negatif dan 60,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 42,11 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki

sikap negatif dan 14,81 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 8,00 persen bersikap negatif dan 12,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus pemuda/mahasiswa, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 14 yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 33,33 persen yang bersikap negatif dan 66,67 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 36,84 persen bersikap negatif dari 19 responden yang memiliki sikap negatif dan 17,28 persen bersikap positif dari 81 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 14,00 persen bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita diperoleh nilai $X^2 = 16,042$ dengan nilai signifikansi 0.0002. Karena nilai signifikan tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa ada hubungan yang nyata status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan.

Adapun keeratan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan profesionalisme wanita dalam kepemimpinan pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan perbandingan koefisien kontingensi (C) sebesar 0,372 dengan koefisien kontingensi maksimum (C Maks) sebesar 0,707 diperoleh IKH sebesar 0,53 berada pada rentang (0,40 - 0,59) atau tingkat hubungan sedang. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan status sosial dengan kemampuan profesionalisme.

6) *Hubungan Status Sosial Dengan kemampuan Pengambilan Keputusan*

Responden berstatus cendekiawan, diperoleh 5 yang bersikap negatif dan 13 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 27,78 persen yang bersikap negatif dan 72,22 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 15,15 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 19,40 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 5,00 persen bersikap negatif dan 13,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden. Responden berstatus tokoh agama, diperoleh 10 yang bersikap negatif dan 12 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 45,45 persen yang bersikap negatif dan 54,55 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Selain itu diperoleh pula 30,30 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 17,91 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 10,00 persen bersikap negatif dan 12,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus birokrasi/PNS, diperoleh 5 yang bersikap negatif dan 14 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 26,32 persen yang bersikap negatif dan 73,68 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 15,15 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 20,90 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 5,00 persen ber-

sikap negatif dan 14,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus wiraswasta/pedagang, diperoleh 6 yang bersikap negatif dan 14 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 30,00 persen yang bersikap negatif dan 70,00 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 18,18 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 20,90 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 6,00 persen bersikap negatif dan 14,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Responden berstatus pemuda/mahasiswa, diperoleh 7 yang bersikap negatif dan 14 yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, hal ini setara dengan 33,33 persen yang bersikap negatif dan 66,67 persen yang bersikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan.. Selain itu diperoleh pula 21,21 persen bersikap negatif dari 33 responden yang memiliki sikap negatif dan 20,90 persen bersikap positif dari 67 responden yang memiliki sikap positif terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan, serta 7,00 persen bersikap negatif dan 14,00 persen yang bersikap positif dari seluruh responden.

Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita diperoleh nilai $X^2 = 2,232$ dengan nilai signifikansi 0.6932. Karena nilai signifikan tersebut lebih besar dari taraf signifikansi yang digunakan ($\alpha = 0,05$), maka dapat dikatakan hubungan status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita tidak signifikan. Dengan kata lain pada taraf kepercayaan 95 persen ditemukan bahwa tidak terdapat hubungan yang nyata status sosial dengan

sikap masyarakat terhadap kemampuan pengambilan keputusan wanita dalam kepemimpinan. Hasil analisis chi square dan tabel kontingensi hubungan status sosial dengan kemampuan pengambilan keputusan dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 35.

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1). Pada umumnya masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis penilaian masyarakat berdasarkan masing-masing indicator atau aspek yang dinilai bahwa tingkat kemampuan kepemimpinan wanita yang paling lemah adalah pada aspek kemampuan pengambilan keputusan, sedangkan tingkat kemampuan yang paling tinggi adalah pada aspek kemampuan perencanaan. 2). Berdasarkan hasil analisis chi kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan sebelumnya, maka ditemukan bahwa: *Pertama*, ada hubungan yang nyata antara tingkat pendidikan dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan pada aspek kepemimpinan yaitu kemampuan perencanaan, kemampuan organisasi, kemampuan motivasi dan kemampuan profesionalisme. Adapun kemampuan pengawasan dan kemampuan pengambilan keputusan tidak terdapat hubungan yang nyata. *Kedua*, tidak ada hubungan yang nyata antara tingkat umur dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan pada keenam aspek kepemimpinan. *Ketiga*, ada hubungan yang nyata antara status sosial dengan sikap masyarakat terhadap kemampuan kepemimpinan wanita dalam birokrasi pemerintahan pada empat aspek kepemimpinan yaitu kemampuan perencanaan, kemampuan organisasi, kemampuan motivasi dan kemampuan profesionalisme. Adapun kemampuan pengawasan dan kemampuan pengambilan keputusan tidak terdapat hubungan yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 1989. *Budaya Birokrasi Di Indonesia*, Seminar AIPI. Yogyakarta
- Albrow, M. 1989. *Birokrasi*, Diterjemahkan Oleh M. Rusli, dkk. Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya.
- Anastasi, A. 1988. *Psychological Testing*, 6 th ad. New York: Macmillan Public Hing Company.
- Arikunto, 1991. *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Arwin, 1990. *Kepedulian Masyarakat Terhadap Keberhasilan Lingkungan Hubungan Dengan Tingkat Pendidikan Di Kelurahan Labuang Baji Kotamadya Ujung Pandang*, Skripsi S1` FIP IKIP Ujung Pandang.
- Azwer, Sarifuddin, 1998. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Menuju Masyarakat Madani*, Rosda Karya, Jakarta
- Agustino, Leo, 2007. *Perihal Ilmu Politik*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Arifin Rahman, 2002, *Sistem Politik Indonesia dalam Prespektif Struktural Fungsional*, SIC, Surabaya
- Beetham, David, 1990. *Birokrasi*, Terjemahan Oleh Sahad Simamora. Jakarta: Bumi Akasara.
- Benveniste, Guy, 1991. *Birokrasi*, Terjemahan Oleh Sahad Simamora. Jakarta: Rajawali.
- Berkowitz, L., 1972. *Social Psychology*, Glenview, III: Scot, Fosesman & Company.
- Blau dan Mayer, 1987. *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Terjemahan Oleh Gary R.J. Jakarta: UI Press.

- Budiardjo, Miriam. 2008,. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- BP-7 Pusat, 1990. *Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan pancasila, Garis-Garis Besar Haluan Negara*. Jakarta: BP-7 Pusat.
- Barents j, 1965, ilmu politika: suatu pengenalan lapangan, terjemahan L.M. sitorus , jakarta: P. T. pembangunan
- Cahyono, Cheppi Hari, 1984. *Psikologi Kepemimpinan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Chilcote, Ronald. 2007. *Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradiqma*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Davis, K, and S.W. Newstrom, 1985. *Human Behavior at Work; Organozational Behavior*. Seventh Edition, Mc Graw-Hill.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djohan, Djoharmansya, 1990. *Problematika Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____1997, *introduction to political analysis* , New York: Winthrop Publisher
- Deliar Noer, 1965, *pengantar ke pemikiran politik*, Medan: Dwipa
- David Easton, 1965, *a Systems of Political Life*, New York
- Dorus Lilijawa, 2007, *Mengapa Takut Berpolitik*, Yayasan Pusataka Nusatama, Yogyakarta
- Departemen Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV.Nala Dana, Jakarta
- Eiser, J., dan Richard, 1980. *Cognitive Social Psychology*. London: Mc Graw-Hill

- Efrisa, 2008. Ilmu Politik,. Dari Ilmu Politik sampai Sistem Pemerintahan, Alfabeta, Bandung
- Fakih, Mansour, 1999. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara. 1999 Yogyakarta: PT. Pabelan.
- Gerungan, W.A., 1964. *Psikologi Sosial*. Bandung: Eresco.
- Gornick, V., 1988. *Women in Science*, Terjemahan Oleh Aminati Susilaradiya Sumakno, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Harmawati, 1995. *Sikap Ibu Rumah Tangga Terhadap Kebiasaan Sarapan Pagi Anak-anaknya*
- Gaffar,Affan. 1993. Demokrasi Politik, Makalah Seminar, Perkembangan Demokrasi Di Indonesia 1945. Widyagraha, LIPI, Jakarta
- Heller, Hermann. 1959. "Political Science." Dalam *Encyclopedia of the Social Sciences*. New york: The Macmillan Co.
- Hoogerwerf A., 1972, *Politologie: Begrippen En Problemen*, Alphen An Den Rijn: Samson Uitgeverij, 1972
- Harold D. Laswell, 1959, *Who Gets What, When, How* (New York: Meridian Books, ince.
- H.R.G. Greaves, 1958, *The Foundations of Political Theory*, Allen and Unwin
- Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law An State* Harvard University Press
- Hans Nawiasky, 1945, *Allgemeine Staatslehre*, koln
- Hendardi, Standar Demokrasi, Jakarta, Surya,Jumat 19 November 1999

- H. J. Laski 1954, *An Introduction to Politics*, di terjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh L. E. Hakim dan Sanjoto dengan Judul *Pengantar Ilmu Politik* (Pustaka Sarjana No. 1); Yayasan Pembangunan, Jakarta
- Herman heller, 1959 , “political science,” *encyclopedia of the social sciences*, new york: the macmillan co.
- Ibrahim, Marwah Daud, 1994. *Teknologi, Emansipasi dan Transendensi, Wacana Peradaban Dengan Visi Islami*. Bandung: Mizan.
- Islam, Saiful. 2006. HAM dalam perspektif Islam, Makalah.LKPMP.Makassar
- Iman Munawar, Ek. *Asas-asas Kepemimpinan Dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Iswara, F 1982, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung : Bina Cita
- Ibnu Kencana, 1997. Ilmu Politik, Renica Cipta, JakartaJarjis, Khairul, 1999. Dampak Birokrasi Modern terhadap Otaritas Tradisional Dalam Masyarakat Minangkabau. Thesis S2 Program Pasca Sarjana UNHAS.
- Johnson, Doyle Paul, 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Terjemahan Oleh Robert M.Z. Lawang, Jakarta: Gramedia.
- John Rawls, A, 1971, *Theory of Justice* . Press of Harvard University Press
- Joyce M. Mitchell dan William C. Mitchell , 1969, *Political Analipsis and Public Policy: An Introductionto Political Science*, chicago, rand Mc. Nally
- Kantor Pemda TK II Makassar, 2000. *Data Statistik*. Biro Pemerintahan Desa: Kota Makassar.
- Kartadirjo, Sartono, 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.

- Kusnadi, Saragih, 2008. *Ilmu Negara, Gaya Media Pratama*, Jakarta
- Kumalasari, 1991. *Tenaga Kerja Wanita Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Sulawesi Selatan Ditinjau Dari Sudut Kepemimpinan*, Makassar. Thesis S2 Program Pasca Sarjana UNHAS.
- _____, 1994. *Dilema Kepemimpinan Wanita Dalam Birokrasi Pemerintahan Di Sul-Sel. Ujung Pandang: Kopertis Wilayah IX Sulawesi Selatan*.
- Kompas, Rabu, 24 November 1993 *Kehidupan Demokrasi Di Indonesia*, Jakarta
- Karl W. Deutsch, 1972, *Politics And Government: How People Decide Their Fate*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Limer, Himasuri, dkk., 1993. *Persepsi Pria Terhadap Kepemimpinan Wanita Di Kotamadya Ujung Pandang*, Hasil Penelitian IKIP Ujung Pandang.
- Macdonald, mandy, dkk., 1999. *Gender and Organizational Change*, Terjemahan Oleh Intan Naomi.
- Mar'at, L., 1982. *Sikap manusia Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahfud, Moh.1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gamma Media.
- Muliaty, 2000. *Diskriminasi Perempuan Dalam Perspektif Gender*. Makalah, Fak. Dakwah IAIN Alauddin Makassar.
- Munawir Sjadzali, 1993, *Islam dan tatanegara, ajaran, sejarah, dan pemikiran*, Jakarta: UI pres
- Mustadjar, Musdalia, 2000. *Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Thesis S2 Program Pascasarjana UNHAS.

- May rudyT, 2003, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Refika Aditama, Bandung
- Miriam Budiarjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Muchtar Kusumatmadja dan Etty R, 2003. *Agoes, Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni
- Marbun B. N. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- M. Solly Lubis, 2003, *Ilmu Negara*, Bandung: Mandar Maju
- Naisbitt John, Aburdance Patricia, 1990. *Megatrend 2000, Ten New Direction For The*, Terjemahan Oleh Budijanta, Jakarta: Bina Rupa Akasara 1993.
- Notopuro, Hardjito, 1974. *Masalah Wanita Kedudukan dan Peranannya*. Jakarta.
- Nurmaida, Andi, 1998. *Pengetahuan dan Sikap Siswa Tata Busana Terhadap Mata Pelajaran Pengelolaan Usaha Di SMK Negeri 8 Ujung pandang*. Skripsi S1 FPTK IKIP Ujung Pandang.
- Ollemburger Jane C, Moore Helen A., 1996. *A Sociology of Woman*, Terjemahan Oleh Budi Yan Sumaryana. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ossip K. fletchteim, ed., 1952, *Fundamental of Political Science*, New York: Ronald Pres Co
- Pandu, Maria P., 1998. *Kunpulan Makalah Gender dan Pembangunan Bidang Sosiologi*, Makassar: Program Pasca Sarjana UNHAS.
- Pengurus Pusat PWI, 1986. *Wanita dan Pers Dukungan Terhadap Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poesposoetjipto, Shanti, L., 1996. *Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

- Poerwadarminta,WJS. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.Jakarta
- Peter H. Merkl, 1967, *Continuity And Change*, New york: Harper And Row
- Purwanto, M. Ngalim, 1986. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Karya.
- Rahman, Ruslan, 1990. *Parabela dan Perubahan Sosial: Suatu Analisis Antropologi Sosial*. Thesis S2 UNM Makassar.
- Rasdiyanah, Andi, 1999. *Gender Dalam Perfektif Islam*, Makalah Pada Seminar Sehari Persfektif Gender Di Sulawesi Selatan Menyonsong Millenium Ketiga, Makassar.
- Rosyada, dkk.2003 . *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, ICCI UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Rodee, dkk.2008. *Pengantar Ilmu Politik*.Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Roger F. Soltau, 1961, *An Introduction to Politics*, London: Logmans.
- RobsoW. A. n, 1954, *The University Teaching of Social Sciences: Political Science, Teaching in The Social Sciences*; Paris: UNESCO Pulungan J. Suyuthi, M.A. 2002, , *fikih siyasah: ajaran, sejarah, dan pemikiran*, jakarta: rajawali pers dan LSIK
- Santoso, Priyo Budi, 1993. *Birokrasi Pemerintahan Orde Baru; Persfektif Kultural dan Struktural*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarmono, Sarlito W., 1985. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: CV. Remaja Jaya.
- Siagian, Sondang P., 1988. *Teori dan Praktek Pengambilan Keputusan*. Jakarta: CV. Haji Masagung.

- Singarimbuan, Masri dan Sofyan Effendi, 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sinindhia, Y.W. dan Ninik widiyanti, 1998. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Sinilele, 2007, Ahdan. dan Satrawaty, Nila. Makassar : Kencana
- Soekanto, Soerjono, 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soelaeman M. Munandar, 1987. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT. Eresco.
- Sudjana, 1992. *Metode Statiska*. Bandung: Tarsito.
- Svilia, dkk., 1999. *An Introduction to Research Methods*. Manila: Philipines Rex Book Store.
- Syurhudi, 1994. *Pemahaman Hadist Nabi Secara Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'anati Al Hadits, Tentang Ajaran Islam Yang Universal, Temporal dan lokal*. Makassar: IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- Syani, Abdul. 2002. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta
- Syarbaini, Sayahrial.dkk. 2004. *Sosiologi dan Politik, Ghalian Indonesia*, Bogor
- Sanit, Arbi. 2008. *Sistem Politik Indonesia, Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembagunan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Tasmara, Toto, 1997. *Komunikasi dakwah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Thomas P.jenkin, 1987, *The Study Of Political Theory* , New York: Random House Inc
- Thoha, Miftah, 1991. *Perspektif Perilaku Birokrasi*. Jakarta: rajawali Pers.

- Tiro, Muhammad Arif, 1999. *Analisis Data Frekuensi Dengan Chi-Kuadrat*. Makassar: University Press.
- Tjokrowinoto, moeljarto, 1996. *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Teuku May Rudy, SH, MA, MIR, 1993, *Pengantar Ilmu Politik , wawasan pemikiran dan kegunaannya*, Bandung : PT. eresco,
- Veeger, J. Karel, 1993. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wahjosumidjo, 1987. *Kepemimpinan dan Motivasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Walgito, Bimo, 1990. *Psikologi Sosial suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Walgito, Bimo, 1994. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Worang, Budi L., 1983. *Pengantar Sosiologi Suatu Ringkasan*. Yogyakarta: Universitas Atma jaya.
- W. A. Robson, 1954*The University Teaching of Social Sciences: Political Science* (Teaching in The Social Sciences; Paris: UNESCO
- Zaini, M. Yahya, 1994. *Pidato Dies Natalis Ke-47 HMI, Menggerakkan Kembali Komitmen Keislaman, Keindonesiaan dan kemahasiswaan Menyongsong PJPT II*. Jakarta: PB. HMI.

RIWAYAT PENULIS



Dr. H. Abd. Rasyid M., S.Ag., M.Pd., M.Si., M.M., lahir di Gresik Surabaya 27 Agustus 1969. Aktivitas sebagai Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar. Dalam karya ilmiah menulis beberapa buku dan editor buku. Buku yang ditulis yaitu: Pengantar Sosiologi, Pengantar Ilmu Politik, Panduan Orientasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi, Strategi Komunikasi dan Dakwah, Sosiologi (*Konsep dan Asumsi Dasar Teori-Teori Sosiologi*). Sebagai editor buku:

Analisis Sumber Daya Manusia, Retorika dalam Komunikasi, Farmakologi II, Sejarah Peradaban Islam Klasik, Problem Sosial, Penulisan Karya Tulis Ilmiah di UIN Alauddin, Perubahan sosial (*Efektivitas Komunikasi dan Dakwah*), Buku Pedoman Mutu Penelitian, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen dan Kepemimpinan dalam Islam, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, Sosiologi Dakwah, Metode Penelitian Komunikasi, Teknologi Pembelajaran berbasis TIK. Manajemen Sumber Daya manusia, Ilmu Sosiologi Agama, Perspektif Pendidikan Islam, Relasi diri dengan Lingkungan. Di samping itu, juga telah menulis puluhan makalah dan puluhan jurnal lokal, Nasional dan Internasional, beberapa jurnal yaitu: Peranan Intelektual Muslim dalam Masyarakat, Islam dan Peradaban Masyarakat Kontemporer, Pemberdayaan *Civil Society* di Indonesia, Resolusi Konflik Dalam Masyarakat Indonesia, Strategi Pengentasan Kemiskinan; Perspektif Ekonomi Kerakyatan, Dakwah dalam Perspektif Jamaah Tabligh, *Social Behavior of Religious Communities of An-Nadzir Assembly*, Eksistensi Sosiologi di Tengah Kemajuan Sains dan Teknologi, dll.. Untuk melengkapi karya-karyanya, ia telah beberapa kali mengadakan penelitian, yaitu: Disiplin Civitas Akademika IAIN Kendari, Analisis Kualitas SDM dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pada IAIN Alauddin Makassar, Respon Masyarakat Terhadap Strategi Komunikasi Muballigh/Dai dalam Berdakwah di Pemukiman Kumuh Kota Makassar, Analisis Kualitas SDM Dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Mahasiswa Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Pengembangan Kualitas Paedagogik dan Profesionalisme Dosen UIN Alauddin Makassar, Sikap Masyarakat Terhadap Kepemimpinan Wanita Dalam Birokrasi Pemerintahan di Kota Makassar, Respons Masyarakat Terhadap Keberadaan Komunitas An-Nadzir di Gowa, Penelitian Disertasi; tentang Perilaku Sosial Komunitas An-Nadzir, studi Kasus Pola Interaksi Sosial Komunitas An-Nadzir dengan Komunitas Lokal di Kelurahan Romang Lompoe Kabupaten Gowa, Perilaku Komunikasi Orang Bugis dalam Tatakrama Hubungan Antar Manusia Menurut Ajaran Islam. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Jurusan Pengembangan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Insentif Terhadap Kinerja Pegawai UIN Alauddin Makassar, Strategi Menangkal Pengaruh Ajaran Sesat di Kecamatan Somba Opu, Problematika Rumah Kost Terhadap

Kehidupan Masyarakat di sekitar UIN Alauddin Makassar. Faktor-Faktor Yang Berkontribusi Terhadap Peningkatan Kepemimpinan Jurusan PMI Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sedangkan pengalaman kerja akademik yaitu Pembantu/wakil Dekan II Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin, Priode 2008-2012, Ketua Lembaga Penelitian (LEMLIT) UIN Alauddin Makassar priode 20011 s/d 2012, Kapala Pusat Penelitian dan Penerbitan (PUSLITPEN) UIN Alauddin Gowa Samata Priode 2013 sampai 2015, Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Priode 2015 s/d 2019

Jika berminat menjadi agen buku ini,
Silahkan menghubungi E-mail : marketing@buatbuku.com
atau Nomor HP kantor kami : **0821-3954-7339**

Akan mendapatkan keuntungan menarik

 **Penerbit WADE**
buatbuku.com